



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN)
(Studi RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung
Jakarta Timur)**

SKRIPSI

**LINDA DWI ERLIA WIJAYANTI
1006816994**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN)
(Studi RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung
Jakarta Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana ilmu administrasi**

**LINDA DWI ERLIA WIJAYANTI
1006816994**

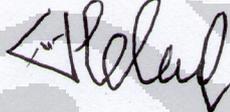
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2012**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Linda Dwi Erlia Wijayanti

NPM : 1006816994

Tanda Tangan : 

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Linda Dwi Erlia Wijayanti
NPM : 1006816994
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) (Studi RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Kusnar Budi M. Bus (.....)

Penguji : Drs. Lisman Manurung, M.Si., Ph.D. (.....)

Ketua Sidang : Dr. Waluyo Iman Isworo M.Ec (PA) (.....)

Sekretaris Sidang : Dra. Afiati Indri Wardani M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juni 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmatnya sehingga skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) (Studi RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur) telah peneliti selesaikan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial di bidang ilmu administrasi negara pada Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI;
2. Drs. Asrori, MA, FLMI., selaku ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
3. Dra. Afiati Indri Wardani M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Drs. Kusnar Budi M.Bus., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengerahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
5. Drs. Lisman Manurung, M.Si., Ph.D., selaku penguji sidang skripsi peneliti
6. Dra. Rainingsih Hardjo M.A., selaku penasihat akademik peneliti;
7. Agung Eka Prasetyawan, A.Md., selaku Staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Walikota Jakarta Timur;
8. Bapak Ir. Barid Effendi., Kepala Biro Administrasi yang telah berkenan memberikan izin peneliti untuk meninggalkan kantor dalam waktu-waktu tertentu;
9. Arfan Dadi, A.Md., selaku Sekretaris RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
10. Mama dan Papa atas segenap doa dan dukungan yang diberikan kepada peneliti baik secara moril maupun materil; *you are the best person in my life*
11. Teman-teman KPPU (Ajeng, Ba Rini, Mas Panji, Kak Tomo, Ba Roro, Linda yuliana, evin dll)

12. Teman-teman seperjuangan : Dita, Meta, Hilda, Peni, Linda, Ami, Nita, Lina, Raisa, Jody, Manda dll (terima kasih atas saran-saran yang diberikan)
13. Teman-teman Administrasi Negara 2010, terima kasih atas saat-saat yang menyenangkan di FISIP UI
14. Nanda Sani, teman yang bersedia mengajarkan SPSS. (*thanks for the knowledge that has been given*)
15. Berla Wahyu Pratama atas doa dan dukungan yang diberikan, dan sudah jadi orang yang paling mengerti ketika penyusunan skripsi ini. *Te amo!!*
16. Ferdinan Manik, terima kasih atas doanya dan dukungannya.
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terima kasih peneliti

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan inspirasi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memperkaya khasanah literatur ilmu administrasi negara khususnya tentang kebijakan publik.

Depok, Juni 2012

Peneliti

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Dwi Erlia Wijayanti
NPM : 1006816994
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) (Studi RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juni 2012

Yang Menyatakan



(Linda Dwi Erlia Wijayanti)

ABSTRAK

Nama : Linda Dwi Erlia Wijayanti
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin)
(Studi RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur)

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan Program Raskin. Penelitian ini dilakukan di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dilihat dari efektivitas implementasi kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, efektivitas kebijakan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Kebijakan Program Raskin pada tahun 2010 sudah dapat dikatakan efektif, walaupun memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan pendistribusiannya.

Kata Kunci:
Program Raskin, efektivitas, implementasi kebijakan publik

ABSTRACT

Name : Linda Dwi Erlia Wijayanti
Study Program : Public administration science
Title : The Implementation of The Policy of Beras Miskin Program (Raskin) (Study of RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur)

The research explains the effectiveness of the policy of Raskin Program. This research conducted in RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur by virtue of effectiveness of public policy implementation. Theory used in this research is the theory of policy, public policy ,implementation of public policy, effectiveness of public policy. The purpose of the research is to describe the effectiveness of policy implementation of Raskin Program in RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. The research used a type of research approaches to quantitative descriptive method. Primary data in this research is from field research conducted by the respondents distribute questionnaires and interviews to the parties relating to the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media. By this research, found that the effectiveness of policy implementation in 2010 Raskin Program can already be said to be effective, though it has limitations in the implementation of its distribution.

Key words:

Raskin Program, effectiveness, implementation of public policy

DAFTAR ISI

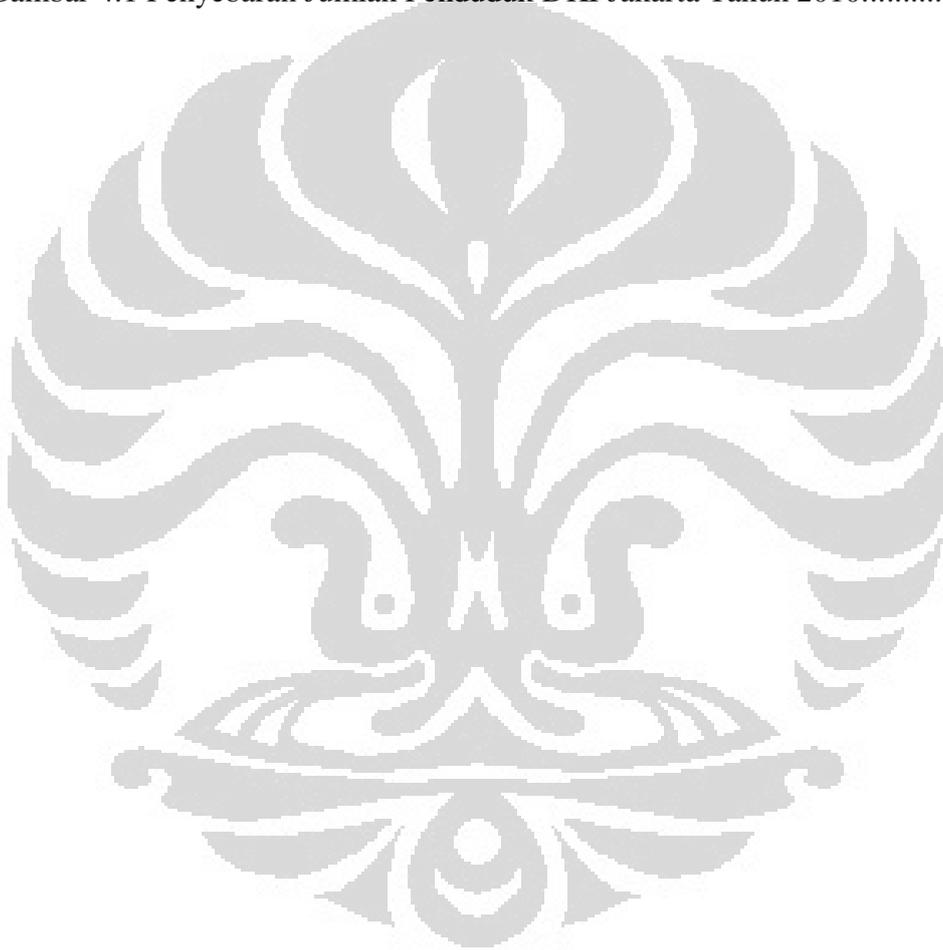
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Signifikansi Penelitian.....	11
1.5 Pembatasan Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penelitian.....	12
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.2. Kerangka Teori	20
2.2.1 Konsep Kebijakan.....	20
2.2.2 Konsep Kebijakan Publik	21
2.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan.....	27
2.2.4 Efektivitas Implementasi Kebijakan	30
2.3 Operasionalisasi Konsep	32
3. METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	38
3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	38
3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	39
3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu.....	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Populasi dan Sampel.....	42
3.5 Teknik Penarikan Sampel	42
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.6.1 Pengkodean Data	44
3.6.2 Data Frekuensi	45
3.6.3 Tabulasi Silang	46
3.7 Keterbatasan Penelitian.....	46
3.8 Uji Realibilitas.....	46
3.9 Uji Validitas.....	47
4. GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA.....	49
4.1 Gambaran Umum.....	49

4.1.1 Kondisi Geografis DKI Jakarta.....	49
4.1.2 Kondisi Demografis.....	49
4.1.3 Profil Kecamatan Cakung.....	51
4.1.4 Profil Kelurahan Penggilingan.....	52
4.1.5 Program Raskin.....	53
4.1.6 Tim Koordinasi Raskin.....	56
4.2 Analisis Data Responden.....	62
4.2.1 Usia Responden.....	62
4.2.2 Jenis Kelamin.....	63
4.2.3 Pekerjaan.....	63
4.3 Pembahasan Dan Analisis Data Efektivitas Kebijakan Program Raskin	64
4.3.1 Dimensi Tepat Kebijakannya.....	68
4.3.2 Dimensi Tepat Pelaksanaanya.....	72
4.3.3 Dimensi Tepat Target.....	76
4.3.4 Dimensi Tepat Lingkungan.....	82
4.3.5 Dimensi Tepat Proses.....	88
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010.....	2
Gambar 1.2 Alur Pendistribusian Raskin.....	5
Gambar 1.3 Penyebaran Jumlah Penduduk DKI Jakarta Timur Tahun 2010	6
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.....	26
Gambar 4.1 Penyebaran Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2010.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta.....	7
Tabel 1.2	Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS-08).....	7
Tabel 1.3	Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2010.....	8
Tabel 1.4	Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kelurahan di Kecamatan Cakung Tahun 2010	9
Tabel 1.5	Jumlah RTS-PM di Kelurahan Penggilingan.....	9
Tabel 2.1	Perbandingan penelitian Analisis Efektivitas & Efisiensi Distribusi Raskin, Efektivitas Pelaksanaan Raskin, Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin), dan Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin)	18
Tabel 2.2	Definisi Kebijakan Publik.....	21
Tabel 2.3	Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan.....	24
Tabel 2.4	Operasionalisasi Konsep.....	34
Tabel 3.1	Realibilitas Instrumen.....	47
Tabel 3.2	Validitas Indikator.....	48
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi,2006-2010.....	50
Tabel 4.2	Luas Dan Alamat Kelurahan di Kecamatan Cakung.....	52
Tabel 4.3	Responden Menurut Umur.....	62
Tabel 4.4	Responden Menurut Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4.5	Responden Menurut Pekerjaan.....	64
Tabel 4.6	Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Jawaban Seluruh Responden.....	65
Tabel 4.7	Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Usia Seluruh Responden	65

Tabel 4.8 Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Jenis Kelamin Seluruh Responden	66
Tabel 4.9 Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Pekerjaan Responden.....	66
Tabel 4.10 Dimensi Tepat Kebijakannya.....	68
Tabel 4.11 Dimensi Tepat Kebijakannya Berdasarkan Usia.....	69
Tabel 4.12 Dimensi Tepat Kebijakannya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
Tabel 4.13 Dimensi Tepat Kebijakannya Berdasarkan Pekerjaan.....	70
Tabel 4.14 Dimensi Tepat Pelaksanaanya.....	72
Tabel 4.15 Dimensi Tepat Pelaksanaanya Berdasarkan Usia.....	73
Tabel 4.16 Dimensi Tepat Pelaksanaanya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
Tabel 4.17 Dimensi Tepat Pelaksanaanya Berdasarkan Pekerjaan.....	74
Tabel 4.18 Dimensi Tepat Target.....	76
Tabel 4.19 Dimensi Tepat Target Berdasarkan Usia.....	77
Tabel 4.20 Dimensi Tepat Target Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 4.21 Dimensi Tepat Target Berdasarkan Pekerjaan.....	79
Tabel 4.22 Dimensi Tepat Lingkungan.....	82
Tabel 4.23 Dimensi Tepat Lingkungan Berdasarkan Usia.....	83
Tabel 4.24 Dimensi Tepat Lingkungan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	83
Tabel 4.25 Dimensi Tepat Lingkungan Berdasarkan Pekerjaan.....	84
Tabel 4.26 Dimensi Tepat Proses.....	88
Tabel 4.27 Dimensi Tepat Proses Berdasarkan Usia.....	89
Tabel 4.28 Dimensi Tepat Proses Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
Tabel 4.29 Dimensi Tepat Proses Berdasarkan	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian.....	99
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	102
Lampiran 3 Tabel Hasil Realibilitas dan Validitas.....	103
Lampiran 4 Tabel dan <i>Bar Chart</i> Data Diri Responden.....	108
Lampiran 5 Tabel dan <i>Bar Chart</i> Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Jawaban Responden.....	111
Lampiran 6 Tabel dan <i>Bar Chart</i> Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Data Diri Responden.....	117
Lampiran 7 Alokasi Pendistribusian Beras Raskin Kota Administrasi Jakarta Timur Setiap Bulannya Pada Tahun 2010.....	141
Lampiran 8 Data Umum PKK Kelurahan Penggilingan Tahun 2010.....	142
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian.....	143
Lampiran 10 Dokumentasi.....	144

BAB 1

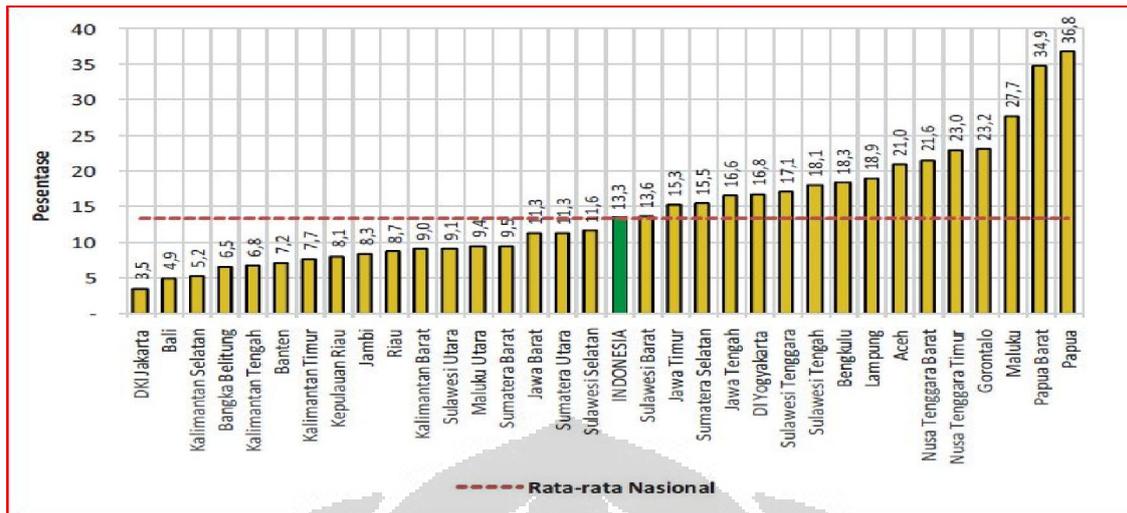
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pada zaman globalisasi saat ini pembangunan nasional sudah semakin ditingkatkan. Dengan keadaan seperti itu, masyarakat menuntut pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu hambatan dari pembangunan nasional yakni kemiskinan, sampai sekarang belum bisa diberantas dengan tuntas.

Kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari negara berkembang, sebuah negara bisa dikatakan sedang berkembang apabila memiliki indikator seperti pendapatan perkapita rendah, kondisi geografis yang kurang menguntungkan, tingkat pendidikan rendah, tingkat buta huruf tinggi, pelayanan kesehatan yang kurang baik, tingginya tingkat pengangguran, urbanisasi di atas 3% setiap tahun, kurangnya konsumsi bahan pakaian (tekstil) per kepala tiap tahun, dan kurangnya konsumsi kalori per kepala (standarnya dibutuhkan manusia dewasa yaitu 2000 kalori perhari (Rudy,1993:9-24). Dalam konsep kesejahteraan sosial, kemiskinan pada umumnya dapat diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak, jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin (Sumodiningrat, Santosa dan Maiwan,1999:2).

Kemiskinan yang ada di Indonesia terjadi diberbagai wilayah provinsi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 menunjukkan persentase jumlah penduduk diberbagai wilayah provinsi di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1:



Gambar 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010

(Sumber: BAPPENAS, 2010:20)

Pada kenyataannya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, hal itu diungkapkan oleh Surjono H. Sutjahjo dalam *MetroTvNews.Com* Rabu, 21 September 2011:

“Indonesia sebagai negara terkaya. Hal ini tidak lagi dipungkiri, pemandangan eksotis dari puncak gunung hingga ke dasar laut, tanah yang subur (banyaknya gunung berapi dan terletak di antara garis khatulistiwa), lautan terluas di dunia dan dikelilingi oleh dua samudera (jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki oleh negara lain), hutan tropis terbesar di dunia (39.549.447 ha dengan keanekaragaman dan plasma nutfah terlengkap), cadangan gas alam terbesar di dunia tepatnya di blok Natuna (Blok Natuna D Alpha memiliki 202 triliun kaki kubik cadangan gas, belum lagi dari blok penghasil tambang dan minyak seperti Blok Cepu dll), dan terakhir yang paling disorot adalah pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik di dunia bernama PT Freeport Indonesia. Profil Indonesia sebagai negara terkaya di dunia menjadi bahan bacaan di mana-mana, karena keunikan yang dimilikinya. Namun selain negara terkaya, Indonesia juga merupakan negara berutang yang lengkap dengan kondisi seperti utang di mana-mana, korupsi yang merajalela, kondisi moral bangsa yang kian menurun serta kemiskinan”(Sutjahjo,2011).

Kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah provinsi di Indonesia ini tidak membuat pemerintah berdiam diri saja, pemerintah memberikan perhatian serius untuk terus memerangi kemiskinan secara berkelanjutan. Setiap tahunnya pemerintah terus berupaya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin dengan menggerakkan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan optimisme yang kuat. Hal ini sesuai dengan visi dari Kementerian Koordinator

Kesejahteraan Rakyat yaitu terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat untuk mencapai Indonesia sejahtera, maju, mandiri dan bermartabat yang diperkuat juga dengan visi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 yang ingin mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur (Visi dan Misi Menkokesra).

Upaya pengentasan kemiskinan ini dibagi oleh pemerintah berdasarkan tiga kluster yang dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah dan masyarakat yaitu:

- Kluster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial, yaitu Program Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Siswa Miskin;
- Kluster II : Pemberdayaan Masyarakat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri;
- Kluster III: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

(Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2010:1)

Program-program tersebut di atas diperkuat dalam kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDGs), MDGs menegaskan bahwa pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2011:1).

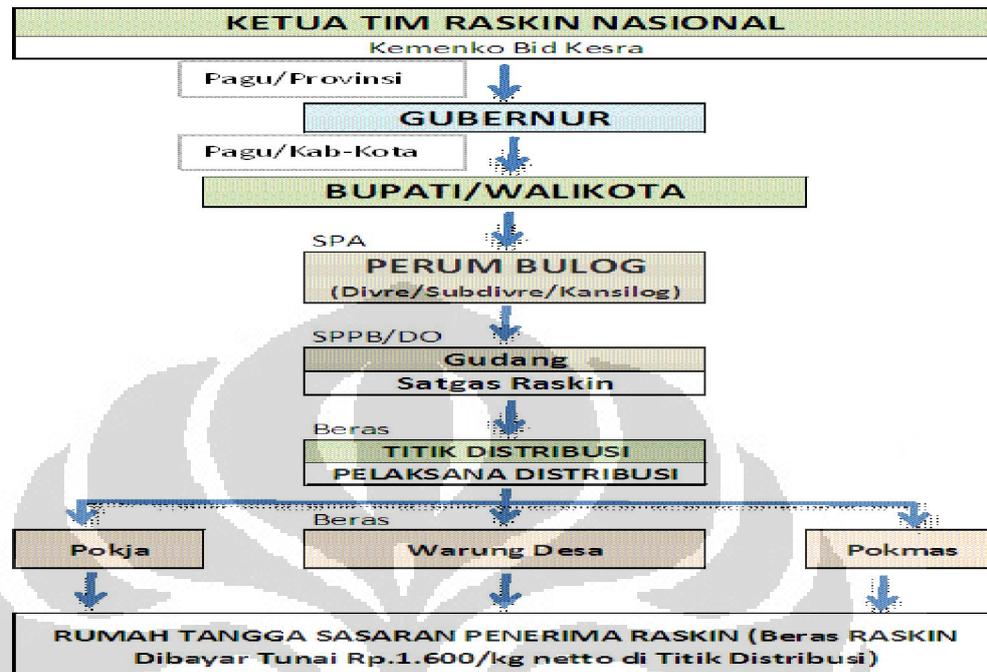
Berdasarkan kesepakatan tersebut, peneliti memilih salah satu program pengentasan kemiskinan yaitu Program Beras Miskin (Raskin), karena Program Beras Miskin (Raskin) merupakan salah satu program pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam buku Pedoman Umum Raskin menyatakan bahwa 95% jumlah penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utamanya. Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia dan rata-rata konsumsi beras yang tinggi mencapai 139,42 kg/jiwa/tahun, maka Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2011:1). Tujuan umum dari Program Raskin itu

sendiri adalah untuk membantu mengurangi beban rumah tangga miskin penerima manfaat (RTS-PM) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS-08) melalui subsidi pemberian pangan dalam bentuk beras. Berdasarkan hasil wawancara kepada staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Walikota Jakarta Timur yang mengatakan bahwa beras merupakan komponen terbesar yang mempengaruhi garis kemiskinan, bobotnya hampir mencapai 30% dalam garis kemiskinan, jadi sedikit saja ada kenaikan di harga beras maka garis kemiskinan akan berubah. Dari hasil uraian tersebut peneliti tertarik memilih Program Beras Miskin (Raskin), karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok (dasar) masyarakat Indonesia yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Dalam Program Raskin telah dibentuk Tim Koordinasi Raskin ditingkat pusat maupun di daerah sebagai organisasi pelaksana program yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:5).

Di titik distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM raskin dilakukan oleh salah satu dari tiga Pelaksana Distribusi Raskin yaitu Kelompok Kerja (Pokja), Warung Desa (Wardes), dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Pelaksana Distribusi Raskin ini ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2011:3-4). Tiga Pelaksana Distribusi Raskin merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang terdiri dari Ketua RW, Ketua RT dan para pengurus RW dan RT. Di titik distribusi inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS-PM raskin ke Pelaksana Distribusi Raskin yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan sebanyak 15kg, sedangkan harga tembus raskin yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp 1.600/kg dengan kualitas beras baik. Informasi ini sesuai wawancara yang dilakukan oleh salah satu Staf Kelurahan Penggilingan Jakarta Timur dan Staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Walikota Jakarta Timur yang mengacu

pada buku Pedoman Umum Raskin. Berikut gambar alur pendistribusian raskin yang dapat dilihat pada gambar 1.2:



Gambar 1.2 Alur Pendistribusian Raskin

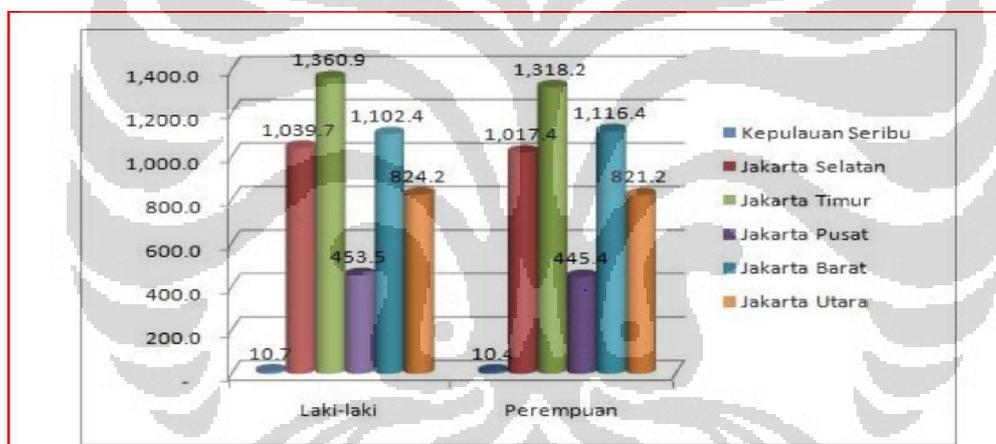
(Sumber: Bulog, 2010)

Program Raskin menghadapi sejumlah permasalahan dalam implementasinya seperti pada tahun 2010 di daerah Jakarta Timur masih adanya masyarakat miskin yang tidak memperoleh jatah raskin karena tidak terdata, jatah raskin dipotong dari 15 kg menjadi 3 kg, informasi tersebut diperoleh dari harian online POSKOTA dalam *Poskota.co.id* jumat 26 Februari 2010 (Jatah Raskin Harus Tepat Sasaran, 2010). Pada kenyataannya pada tahun 2010 sesuai informasi online yang diperoleh dari Menkokesra dalam <http://www.menkokesra.go.id>, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk Program Raskin mencapai 13,1 triliun lebih besar dari pada tahun 2009 yang hanya mencapai 12,9 triliun (Menko Kesra Meluncurkan Program Raskin 2010, 2010), dan dilihat dari jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) menurun menjadi 17.488.007 pada tahun 2010 yang awalnya pada tahun 2009 mencapai 18.497.302 sesuai informasi yang diperoleh dari <http://data.menkokesra.go.id> (Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010, 2010).

Keberhasilan Program Raskin itu sendiri dapat dilihat berdasarkan tingkat pencapaian 6T (indikator kinerja Program Raskin) yaitu tepat sasaran, tepat

jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2010:17), apabila indikator 6T ini tidak terpenuhi dengan baik maka pendistribusian raskin akan terhambat yang akan berdampak pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin. Dalam hal ini peneliti ingin melihat efektifitas kebijakan Program Raskin yang dilihat dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin berdasarkan teori “lima tepat” pada buku *Public Policy* yang tulis oleh Riant Nugroho yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungannya, dan tepat prosesnya.

Jika dilihat lokasi penelitiannya, peneliti akan melakukan penelitian di wilayah Jakarta Timur, karena pada tahun 2010 Jakarta Timur merupakan wilayah DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan wilayah DKI Jakarta yang lain. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 1.3 Penyebaran Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2010

(Sumber LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010,2010:12)

Berdasarkan alur pendistribusiannya, raskin didistribusikan melalui RW dan RT oleh Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM raskin. Pelaksana Distribusi Raskin merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang terdiri dari Ketua RW, Ketua RT dan para pengurus RW dan RT. Jumlah RW dan RT terbanyak di DKI Jakarta yaitu berada di wilayah Jakarta Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Jumlah			
		Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	8	44	394	4.652
2	Jakarta Utara	6	31	431	5.072
3	Jakarta Timur	10	65	699	7.843
4	Jakarta Selatan	10	65	576	6.312
5	Jakarta Barat	8	58	580	6.409
6	Kep. Seribu	2	4	24	125
Jumlah		44	267	2.704	30.368

(Sumber: LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010,2010:9)

Dilihat dari data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS-08) yang menjadi acuan Program Raskin pada tahun 2010 untuk menentukan jumlah penerima raskin, Jakarta Timur menjadi urutan kedua setelah Jakarta Utara dalam jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS). Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.2
Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS-08)

Kota/Kabupaten Administrasi	Jumlah RTS
Jakarta Utara	54.827
Jakarta Timur	50.856
Jakarta Barat	37.194
Jakarta Pusat	26.531
Jakarta Selatan	10.601
Kepulauan Seribu	651
Jumlah	180.660

(Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia,2008)

Berdasarkan tabel 1.2 yang telah diuraikan bahwa memang benar Jakarta Timur memiliki jumlah RTS 50.856 yang jauh lebih kecil dari pada Jakarta Utara yang mencapai 54.827 pada tahun 2008. Dalam hal ini peneliti tidak menjadikan acuan hasil PPLS-08 untuk memilih Jakarta Utara dikarenakan hasil pendataan pada tahun 2008 tidak *update*, sehingga masyarakat yang seharusnya dikategorikan hampir miskin, miskin dan sangat miskin tidak terdata, padahal Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2010. Hal ini dibuktikan dari informasi yang diperoleh dari harian online POSKOTA dalam *Poskota.co.id* jumat 26 Februari 2010 yang menulis pada tahun 2010 di daerah Jakarta Timur masih terdapat masyarakat miskin yang tidak memperoleh jatah raskin karena

tidak terdata, jatah raskin dipotong dari 15 kg menjadi 3 kg (Jatah Raskin Harus Tepat Sasaran, 2010).

Dari hasil uraian di atas, peneliti memilih penelitian di wilayah Jakarta Timur, dan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tidak menimbulkan bias serta lebih terfokus, peneliti mengambil sampel dari RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Alasan peneliti memilih Kecamatan Cakung dikarenakan kecamatan ini memiliki jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin terbanyak dan memiliki jumlah beras terbanyak untuk didistribusikan di wilayah Jakarta Timur. Di bawah ini tabel 1.3 merupakan data tentang Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2010 yang hanya dapat dilihat berdasarkan wilayah kecamatan saja, sedangkan data selengkapnya tentang Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2010 dimuat dalam lampiran 7:

Tabel 1.3
Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur
Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah RTS-PM	Jumlah Beras (Kg)
1	Kramat Jati	2.938	35.970
2	Jatinegara	8.777	131.655
3	Pulogadung	7.888	118.320
4	Ciracas	3.093	46.395
5	Matraman	3.824	57.360
6	Duren Sawit	4.805	72.075
7	Cipayung	4.221	63.315
8	Cakung	9.957	149.355
9	Pasar Rebo	2.076	31.140
10	Makasar	3.817	57.255
Jumlah		50856	762.840

(Sumber: Kantor Walikota Jakarta Timur, 2010)

Di Kecamatan Cakung juga terdapat beberapa kelurahan dan salah satunya memiliki jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin dan jumlah beras terbanyak untuk didistribusikan di Kecamatan Cakung yaitu Kelurahan Penggilingan. Di bawah ini tabel 1.4 merupakan data tentang Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2010 yang

hanya dapat dilihat berdasarkan wilayah kelurahan di Kecamatan Cakung saja, sedangkan data selengkapnya tentang Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2010 terdapat di dalam lampiran 7:

Tabel 1.4

**Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kelurahan di Kecamatan Cakung
Tahun 2010**

No	Nama Kelurahan di Cakung	Jumlah RTS-PM	Jumlah Beras (Kg)
1	Jatinegara	1.987	29.805
2	Rawa Terate	973	14.595
3	Penggilingan	2.069	31.035
4	Cakung Barat	1.088	16.320
5	Cakung Timur	1.389	20.835
6	Ujung Menteng	668	10.020
7	Pulogebang	1.783	26.745
Jumlah		9.957	149.355

(Sumber: Kantor Walikota Jakarta Timur, 2010)

Di wilayah Kelurahan Penggilingan terbagi lagi atas beberapa Rukun Warga (RW) yaitu RW 001 sampai dengan RW 018. Pada penelitian ini peneliti memilih RW 08 untuk dijadikan wilayah penelitian, karena jumlah RTS-PM raskin di RW 08 terbesar dari pada RW yang lainnya yang terdapat di Kelurahan Penggilingan, maka peneliti dapat melihat tingkat kemiskinan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin berdasarkan kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Tabel 1.5 dibawah ini merupakan hasil penghitungan peneliti yang mengacu pada data Daftar Nama RTS-PM di Kelurahan Penggilingan berdasarkan RW. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini dengan judul Jumlah RTS-PM di Kelurahan Penggilingan:

Tabel 1.5

Jumlah RTS-PM di Kelurahan Penggilingan

No	Rukun Warga (RW)	Jumlah RTS-PM
1	RW 001	131
2	RW 002	55
3	RW 003	182
4	RW 004	135
5	RW 005	211
6	RW 006	60

Tabel 1.5 - Lanjutan

No	Rukun Warga (RW)	Jumlah RTS-PM
7	RW 007	88
8	RW 008	307
9	RW 009	2
10	RW 010	12
11	RW 011	121
12	RW 012	199
13	RW 014	228
14	RW 017	143
15	RW 018	49

(Sumber: Kantor Walikota Jakarta Timur, 2010)

Dari data atau informasi yang telah diuraikan, disini peneliti ingin melihat efektivitas implementasi kebijakan Program Raskin pada tahun 2010 yang dilihat dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin sebagai penerima beras miskin dengan pertimbangan alokasi dana yang jauh lebih besar dari tahun 2009 dan jumlah RTS-PM menurun dari tahun 2009 dengan memfokuskan tempat penelitian berdasarkan wilayah yang memiliki jumlah RTS-PM raskin terbanyak dan jumlah beras yang jauh lebih besar untuk di distribusikan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur memiliki jumlah RTS-PM raskin paling banyak, sehingga peneliti memilih sampel di wilayah ini. Permasalahan yang diangkat peneliti yaitu:

Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) pada tahun 2010 di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) pada tahun 2010 di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara akademis dan praktis, manfaatnya antara lain:

1. Signifikansi akademis

Penelitian ini adalah suatu kajian dalam bidang Ilmu Administrasi Negara yang diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan khususnya tentang kebijakan publik dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelitian sejenis berikutnya di masa yang akan datang.

2. Signifikansi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan juga dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta BUMN yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Perum Bulog untuk mengetahui tentang efektivitas implementasi kebijakan Program Raskin di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

1.5 Pembatasan Penelitian

Agar penelitian menjadi lebih terarah dan memberikan kesimpulan yang lebih baik, peneliti membatasi penelitiannya di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan alasan jumlah populasi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin yang ada di RW 08 Kelurahan Penggilingan merupakan RTS-PM terbanyak di Kelurahan Penggilingan pada Kecamatan Cakung, sesuai dengan data Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2010 dan data Daftar Nama RTS-PM di Kelurahan Penggilingan, sehingga apabila peneliti mengambil seluruh RTS-PM yang ada di Jakarta Timur ataupun Kelurahan Penggilingan secara menyeluruh dapat menimbulkan bias yang cukup besar dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah RTS-PM raskin di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah RTS-PM raskin dibeberapa Rukun Tetangga (RT) di RW 08 pada

Kelurahan Penggilingan. Untuk menunjang pengambilan data tersebut peneliti hanya akan menyebarkan kuisisioner pada 3 RT yang ada di RW 08.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini tersusun dalam bab-bab sehingga pembaca dapat memahami isinya, secara garis besar isi dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, pembatasan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung dalam penelitian seperti teori kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, efektivitas implementasi kebijakan serta menggunakan tinjauan dari penelitian terdahulu, dan operasionalisasi konsep.

BAB 3 Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, Jenis penelitian (berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu), teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, instrumen penelitian dan teknik analisis data, keterbatasan penelitian, serta uji validitas dan uji realibilitas.

BAB 4 Gambaran Umum Dan Analisis Data

Pada bab ini dipaparkan tentang objek penelitian atau subjek penelitian, hasil dari penelitian selama melakukan analisis terhadap efektivitas implementasi kebijakan Program Raskin di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang disesuaikan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada Bab II.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian dan data yang telah peneliti analisis dalam laporan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian demi penelitian dibidang Ilmu Administrasi Negara telah banyak dilakukan, meskipun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama, namun penelitian tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan Ilmu dibidang Administrasi Negara.

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki bahasan penelitian yang kurang lebih relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti mendapat sejumlah informasi yang lebih dalam mengenai topik penelitian yang diangkat.

Penelitian pertama yang menjadi rujukan dalam tinjauan pustaka adalah skripsi yang ditulis oleh Yanita Sari dengan judul *Analisis Efektivitas & Efisiensi Distribusi Raskin*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program distribusi beras miskin (Raskin) dari penyaluran beras miskin hingga ke rumah tangga miskin di daerah Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar kuisisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga/instansi seperti BPS Sumatra Utara, Kantor Camat Babalan, dan Kantor Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, sedangkan berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survei karena peneliti mengajukan pertanyaan tertulis, baik yang telah tersusun dalam kuisisioner maupun dalam wawancara lisan. Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan persamaan matematika. Responden dalam penelitian ini adalah

semua rumah tangga miskin di Desa Securai Utara yaitu sebanyak 1040 KK, besar sampel dari penelitian ini adalah 1/10 dari total populasi yaitu 100 rumah tangga.

Pada penelitian tersebut, Yanita Sari menggunakan teori yang berkaitan dengan distribusi, efektivitas distribusi raskin, efisiensi pemasaran serta teori konsumen. Pada teori distribusi, peneliti menggunakan teori peranan saluran distribusi yang dapat dilihat dari biaya distribusi, biaya promosi, biaya administrasi pemasaran, dan biaya pemasaran lain, sedangkan peneliti melihat efektivitas distribusi raskin melalui indikator kinerja Program Raskin yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas. Efisiensi dapat dilihat dengan cara output yang dicapai tetap konstan sedangkan input mengecil, output meningkat sedangkan input tetap konstan, output meningkat dalam kadar yang lebih tinggi dari pada peningkatan input, output menurun dalam kadar yang lebih rendah dari pada penurunan input. Efisiensi pemasaran dapat terjadi jika biaya distribusi dapat ditekan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat lebih tinggi, persentase perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi, tersedianya fasilitas fisik yang mendukung proses pendistribusian, sedangkan untuk menjelaskan teori konsumen Yanita Sari menggunakan konsep konsumen surplus.

Setelah dilakukan analisis atas hasil penelitian, Yanita Sari menyimpulkan bahwa harga raskin yang diterima oleh rumah tangga miskin berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Program pendistribusian raskin memberikan surplus kepada penerima manfaat beras miskin karena harga raskin yang berlaku pada kondisi keseimbangan lebih rendah dari pada harga yang seharusnya mereka bayarkan. Tingkat keefektifan program pendistribusian raskin yaitu sebesar 33,4% yang menyatakan distribusi raskin sudah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, tepat kualitas dan 51,2% menyatakan distribusi raskin tidak tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, administrasi, dan kualitas maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian raskin di Desa Securai Utara tidak efektif. Tingkat efisiensi pendistribusian beras miskin di Desa Securai Utara sudah efisien karena saluran pendistribusian yang pendek yaitu langsung dari produsen ke konsumen sehingga biaya yang ditimbulkan cukup rendah.

Penelitian kedua yang menjadi rujukan dalam tinjauan pustaka adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Assad dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Raskin*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemiskinan dan keberhasilan pelaksanaan Program Raskin serta masalah-masalah yang masih dihadapi dalam penyaluran raskin di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi, wawancara langsung di lokasi penelitian maupun kepada responden dengan menggunakan *questionnaire* (daftar pertanyaan), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor kelurahan setempat, buku-buku ilmiah, media internet, dan jurnal penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian observasi. Kemudian berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Responden dalam penelitian ini Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat raskin yang bertempat tinggal di Desa Penara Kebun. Sampel yang diambil berjumlah 26 orang dari jumlah populasi seluruhnya sebesar 52 orang berdasarkan dari Kantor Desa dan key informannya yaitu satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, satu orang Kaur Umum, satu orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan satu orang perwakilan dari rakyat.

Pada penelitian tersebut, Muhammad Assad menggunakan teori yang berkaitan dengan kemiskinan dan evaluasi program. Kemiskinan di bagi 3 kelompok menurut Inpres nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Program Raskin yaitu golongan sangat miskin, golongan miskin, dan golongan hampir miskin. Teori kemiskinan dalam penelitian ini mengidentifikasi keluarga miskin yang didasarkan pada sejumlah kebutuhan pokok suatu keluarga dengan menggunakan pendekatan *entitlement to food* (hak pangan) yang dilihat dari keterbatasan pendapatan, sedangkan untuk menjelaskan efektivitas Program Raskin Muhammad Assad menggunakan konsep evaluasi program yang dilihat dari 6 indikator kinerja Program Raskin.

Setelah dilakukan analisis atas hasil penelitian, Muhammad Assad menyimpulkan bahwa kebanyakan penerima raskin telah memenuhi kriteria tingkat kemiskinan RTS-PM, namun masih ditemukan RTS-PM raskin yang tidak dikategorikan hampir miskin. Pelaksanaan Program Raskin dapat dikatakan belum berhasil, hal ini disebabkan masing-masing indikator keberhasilan program ini belum memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan raskin diantaranya yaitu mekanisme penentuan data RTS-PM raskin didasarkan kepada data BPS, penetapan RTS-PM raskin tidak mengakomodasikan musyawarah desa dan perkembangan jumlah RTS-PM, kemudian belum semua RTS-PM dapat membeli raskin pada awal bulan, penyebabnya masih ditemukan RTS-PM raskin yang tidak mampu membayar tunai sampai melewati batas waktu pelunasan, yang terakhir adalah jumlah penerima raskin setiap tahunnya berkembang karena pengaruh kenaikan harga kebutuhan pokok.

Penelitian ketiga yang menjadi rujukan dalam tinjauan pustaka adalah tesis yang ditulis oleh Mariyam Musawa dengan judul *Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin.)* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi Program Raskin di Kelurahan Gajahmungkur Kota Semarang, memetakan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Gajahmungkur Kota Semarang, menyarankan upaya pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena Mariyam Musawa mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan (Bagian distribusi Raskin Bulog Divisi Regional Jateng, Bagian Kesejahteraan Sosial Kelurahan Gajahmungkur yang menangani distribusi raskin, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin yang memiliki kartu, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin yang tidak mempunyai kartu, Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat RW, BPS yang bertindak dalam pendataan), sedangkan data sekunder dalam penelitian ini cakupan penerimaan raskin di Kelurahan Gajahmungkur, data penerimaan beras miskin secara riil, pagu raskin dan realisasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif.

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Pada penelitian tersebut, Mariyam Musawa menggunakan teori yang berkaitan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan, isi dan lingkungan kebijakan teori Grindle, faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan teori implementasi kebijakan, serta kajian implementasi kebijakan pembangunan sosial di Indonesia.

Pada teori kebijakan publik menggunakan pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Teori implementasi kebijakan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards, Merilee S Grindle, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teori isi dan lingkungan kebijakan menggunakan teori menurut Grindle yang menjelaskan isi kebijakan meliputi enam hal yaitu kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, ketepatan program, kejelasan implementor, SDM yang memadai, sedangkan untuk melihat lingkungan kebijakan dapat dilihat dari kekuasaan, kepentingan dan strategis implementasi, karakteristik rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Teori faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan teori implementasi kebijakan menggunakan 4 hal untuk mencapai keefektifan implementasi kebijakan menurut Richard Martland yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, sedangkan untuk melihat kajian implementasi kebijakan pembangunan sosial di Indonesia, peneliti melihat kebijakan pembangunan sosial dan kemiskinan sebagai isu global.

Setelah dilakukan analisis atas hasil penelitian, Mariyam Musawa menyimpulkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima raskin

(*leakage*) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima raskin (*undercoverage*).

Tabel 2.1

Perbandingan penelitian Analisis Efektivitas & Efisiensi Distribusi Raskin, Efektivitas Pelaksanaan Raskin, Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin), dan Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin)

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
Nama Penelitian	Yanita Sari	Muhammad Assad	Mariyam Musawa	Linda Dwi E
Judul Penelitian	Analisis Efektivitas & Efisiensi Distribusi Raskin	Efektivitas Pelaksanaan Raskin	Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin)	Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin)
Pendekatan Penelitian	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif, Survei	Deskriptif, Observasi	Deskriptif, Observasi	Deskriptif, Survei
Tujuan Penelitian	mengetahui efektivitas dan efisiensi program distribusi beras miskin dari penyaluran beras miskin hingga ke rumah tangga miskin di daerah Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.	untuk mengetahui tingkat kemiskinan dan keberhasilan pelaksanaan Program Raskin serta masalah-masalah yang masih dihadapi dalam penyaluran raskin di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang	untuk mendeskripsikan distribusi Program Raskin di Kelurahan Gajahmungkur Kota Semarang, memetakan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Gajahmungkur Kota Semarang, menyarankan upaya pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik.	untuk menjelaskan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) pada tahun 2010 di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Tabel 2.1 - Lanjutan

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
Teori yang digunakan	distribusi, efektivitas distribusi raskin (indikator kinerja Program Raskin), efisiensi pemasaran serta teori konsumen	kemiskinan dengan menggunakan pendekatan <i>entitlement to food</i> (hak pangan) yang dilihat dari keterbatasan pendapatan dan evaluasi program (indikator kinerja Program Raskin)	kebijakan publik, implementasi kebijakan, isi dan lingkungan kebijakan teori Grindle, faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan teori implementasi kebijakan, serta kajian implementasi kebijakan pembangunan sosial di Indonesia	kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, efektivitas implementasi kebijakan.
Objeksite	Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara	Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara	Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur

(Sumber: Hasil olahan peneliti Pada Bulan Mei 2012)

Terdapat keterkaitan antara penelitian yang dilakukan Yanita Sari, Muhammad Assad, Mariyam Musawa dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yakni objek penelitiannya sama yaitu Program Raskin yang merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka tetap mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya.

Peneliti juga menjelaskan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yanita Sari, Muhammad Assad, Mariyam Musawa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama adalah skripsi Yanita sari yaitu menggunakan pendekatan matematika untuk mengukur efisiensi, sedangkan untuk mengukur efektivitas menggunakan indikator kinerja Program Raskin dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kedua adalah jurnal

yang ditulis oleh Muhammad Assad yaitu menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan teori yang digunakan adalah pendekatan *entitlement to food* (hak pangan) yang dilihat dari pendapatan masyarakat miskin dan untuk mengukur efektivitas Muhammad Assad menggunakan konsep evaluasi program yang mengacu pada indikator kinerja Program Raskin. Penelitian ketiga yaitu tesis yang ditulis oleh Mariyam Musawa yaitu menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dalam menganalisis implementasi Program Raskin Mariyam Musawa menggunakan teori isi dan lingkungan kebijakan menurut Grindle. Disisi lain skripsi Linda Dwi Erlia menggunakan teori “lima tepat” untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan Program Raskin yang terdapat dalam buku *Public Policy* yang ditulis oleh Riant Nugroho serta menggunakan indikator kinerja Program Raskin, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Kebijakan

Kata kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan penting yang diambil dalam kehidupan organisasi atau privet (Nawawi,2009:5), sedangkan menurut Jones, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut, kata kebijakan sering digunakan dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patokan dan maksud besar tertentu (Nawawi,2009:6). Disisi lain definisi kebijakan menurut Titmuss yaitu prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, yang berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan (Suharto,2005:7).

Untuk memperjelas pengertian kebijakan, Hogwood dan Gunn mengelompokkan istilah-istilah kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari:

1. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu

2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki
 3. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus
 4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah
 5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahaan formal
 6. Kebijakan sebagai program
 7. Kebijakan sebagai keluaran
 8. Kebijakan sebagai hasil akhir
 9. Kebijakan sebagai sebuah teori atau model
 10. Kebijakan sebagai proses
- (Sunggono,1994:15-20)

2.2.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah hulu dari setiap kehidupan suatu komunitas yang disebut negara, yang didalamnya berinteraksi baik organisasi publik, bisnis maupun sosial kemasyarakatan (Nugroho,2011:58), sedangkan arti penting kebijakan publik pada konteks makro negara yaitu setiap negara, terutama pemerintahan, sebagai pemegang kekuasaan, berkehendak untuk dapat mengendalikan rakyat (Nugroho,2011:18)

Berikut ini definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

Tabel 2.2
Definisi Kebijakan Publik

Definition	Author
The term <i>public policy</i> always refers to the actions of government and the intentions that determine those actions	Clarke E. Cochran, et al
Public policy is the outcome of the struggle in government over who gets what	Clarke E. Cochran, et al
Whatever governments choose to do or not to do	Thomas Dye
Public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals	Charles L. Cochran and Eloise F. Malone

Tabel 2.2 - Lanjutan

Definition	Author
Stated most simply, public policy is the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the life of citizens	B. Guy Peters

(Sumber: Birkland, 2001:21)

Disisi lain dalam buku *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* yang dikutip dari buku *Public Policy-Making*, James Anderson menjelaskan pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Indiahono,2009:17).

Kebijakan publik juga memiliki karakteristik utama yang terdiri dari:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak

mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

(Agustino,2008:8-9)

Kebijakan publik merupakan pernyataan dari pejabat publik, pejabat publik itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pejabat negara, yaitu :

Ø Pejabat Legislatif, yaitu Ketua dan Anggota MPR,DPR, DPD, dan DPRD

Ø Pejabat Yudikatif, Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Komisi Yudisial

Ø Pejabat Eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Duta Besar, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota

Ø Pejabat Akuntatif, yaitu Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan

Ø Pejabat Lembaga Publik Semi-Negara, termasuk diantaranya lembaga KPK, Komnas HAM, KPPU.

2. Pejabat administratif, yaitu :

Ø Pejabat Struktural Pusat (Eselon I dan II)

Ø Pejabat Struktural Daerah Propinsi (Eselon I dan II)

Ø Pejabat Struktural Kabupaten/Kota Madya (Eselon I dan II)

Ø Para Pejabat Humas Pemerintahan

Ø Pejabat Pimpinan Pelaksanaan di tingkat bawah (Camat dan Kepala Desa/ Lurah)

(Nugroho,2011:106-107)

Dalam kebijakan publik terdapat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari sifat kebijakan publik itu sendiri karena kebijakan publik bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan keputusan

Bupati/Walikota (Subarsono, 2005:3). Hubungan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilakukan secara desentralisasi, pengertian desentralisasi yaitu suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari pada sentralisasi, dalam sistem sentralisasi segala kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat pemerintah di daerah hanya melaksanakan kehendak dari pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian dari kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pihak lain (pemerintah daerah) untuk dilaksanakan (Soejito,1990:30).

Dalam buku *Public Policy* mengatakan kebijakan publik dikembangkan dari isu kebijakan, dan bukan hanya dari masalah kebijakan. Isu kebijakan terdiri atas masalah kebijakan dan kebutuhan kebijakan. Isu kebijakan adalah isu yang hanya dapat atau harus direspon oleh kebijakan publik (Nugroho,2011:436), sedangkan menurut Lowi, isu kebijakan bisa diklasifikasikan dalam term sebagai berikut:

1. Isu kebijakan distributif: distribusi sumber-sumber daya baru
2. Isu kebijakan redistributif: perubahan distributif sumber daya yang sudah ada
3. Isu kebijakan regulatif: regulasi dan kontrol aktivitas
4. Isu kebijakan konstituen: pembentukan atau reorganisasi institusi.

(Parsons,2011:134)

Sebelum membuat sebuah kebijakan yang berasal dari isu kebijakan diperlukan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan yang terdapat beberapa fase yang dilengkapi dengan karakteristiknya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 yaitu:

Tabel 2.3
Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan

Fase	Karakteristik
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama

Tabel 2.3 - Lanjutan

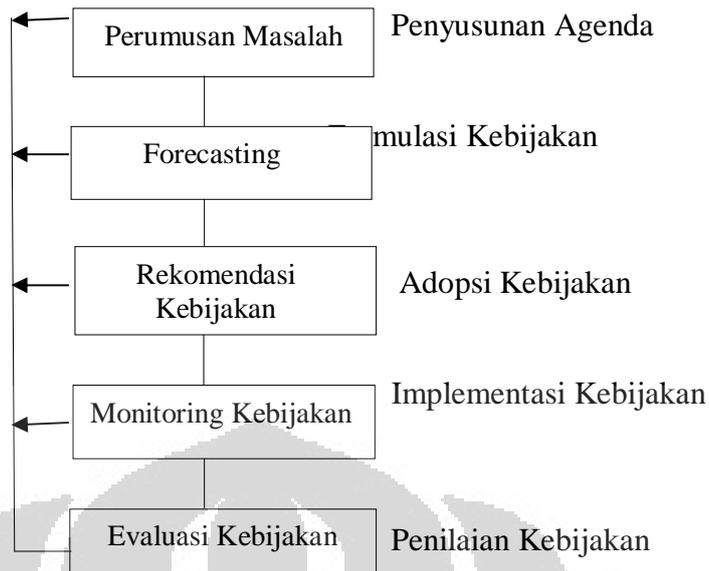
Fase	Karakteristik
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

(Sumber: Dunn,2003:24-25)

Berikut ini penjelasan tahap-tahap dalam proses kebijakan publik menurut Michael Howlet dan M. Ramesh, sebagaimana dikutip oleh Subarsono, dalam buku *Analisis Kebijakan Publik*, yaitu:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintahan memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

(Subarsono:2008,13-14)



Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik

(Sumber: AG Subarsono, 2008:9)

Menurut James Anderson kebijakan publik yang kita kenal dapat digolongkan sesuai dengan jenis-jenis kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kebijakan Beras Miskin (Raskin), sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Misalnya kebijakan yang berisi kriteria orang disebut miskin dan bagaimana prosedur untuk memperoleh beras miskin.

2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu, sebagai contoh kebijakan subsidi BBM dan kebijakan obat generik. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Misalnya kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan, kebijakan pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor, sedangkan kebijakan re-distributif

adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh kebijakan pajak progresif, kebijakan asuransi kesehatan gratis bagi orang miskin.

3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Misalnya kebijakan Program Raskin, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran, misalnya kebijakan libur hari Natal dan hari libur Idul Fitri.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, misalnya kebijakan membangun jalan raya, kebijakan pertahanan dan keamanan, sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas, misalnya pelayanan pos, parkir umum, dan perumahan.

(Subarsono,2005:19-21)

2.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya implementasi kebijakan yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho,2011:618). Konsep implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik (Pasolong,2011:57), sedangkan menurut Ripley dan Franklin apa yang terjadi setelah UU ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis, keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor,

khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno,2011:148).

Dalam buku *Public Policy*, persentase keberhasilan kebijakan, dapat dilihat yaitu rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi (Nugroho,2011:625).

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur.

2. Sumber daya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, maupun sumber daya material, dan sumber daya metoda.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antara instansi yang terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

5. Disposisi implementor

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu:

- Ø Respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
- Ø Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan

Ø Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut

6. Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

(Nawawi,2009:139-141)

Disisi lain dalam buku *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* yang dikutip dari buku *Limits to Administration*, Christopher Hood mengemukakan lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna yaitu:

1. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas
2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan
3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan
4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan di antara organisasi
5. Bahwa tidak ada tekanan waktu

(Parsons,2011:467)

Dalam implementasi kebijakan terdapat aktor-aktor, hal ini dijelaskan dalam buku *Public Policy* yaitu:

1. Pemerintah. Meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan eksistensi negara bangsa.
2. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *government driven policy*. Disni

termasuk pelayanan KTP dan Kartu Keluarga yang melibatkan jaringan kerja nonpemerintah di tingkat masyarakat.

3. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *societal driven policy*. Disini termasuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapat subsidi dari pemerintah. Termasuk diantaranya panti-panti sosial, yayasan kesenian hingga sekolah-sekolah non pemerintah.
4. Masyarakat sendiri, yang dapat disebut *people driven policy*. Termasuk di dalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.
(Nugroho, 2011:649)

2.2.4 Efektivitas Implementasi Kebijakan

Dalam buku *Efektivitas Kebijakan Lembaga Pengawasan*, Makmur mengatakan bahwa kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai (Makmur,2011:6), sedangkan menurut Hadayaningrat dalam buku *Azas-Azas Organisasi Manajemen*, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Handayaningrat,1995:16).

Ada empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif menurut George Edward III yaitu:

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

3. *Disposition*, berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.
(Nugroho,2011:636)

Pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yang terdapat dalam buku *PublicPolicy* yaitu:

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
2. Tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat.
3. Tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau

harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista variable eksogen, yang terdiri atas *public opini*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive instutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan .

5. Tepat proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu :

Ø *Policy acceptance*. Disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan

Ø *Policy adoption*. Disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan

Ø *Strategic readiness*. Disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

(Nugroho,2011:650-652)

2.3 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan “lima tepat” yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Program Raskin. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan seluruh sub indikator pada indikator “tepat lingkungan” yang terdapat pada teori, dikarenakan data yang diperoleh dari berbagai pihak telah mencukupi, sehingga sub indikator *interpretive institutions* dan *individuals* tidak dipergunakan. Pemilihan “lima tepat” ini didasarkan pada proses implementasi kebijakan Program Raskin yang terjadi di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada tahun 2010. Adapun aspek efektivitas yang menjadi kajian yang dilakukan di dalam implementasi kebijakan Program Raskin ini adalah sebagai berikut :

1. Tepat kebijakannya
 - Ø Kebijakan berisi hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan
 - Ø Kesesuaian antara perumusan kebijakan dengan karakter masalah yang ingin dipecahkan
 - Ø Kesesuaian antara kebijakan dengan lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan
2. Tepat Pelaksanaannya
 - Ø Aktor implementasi dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat
 - Ø Adanya kerjasama antar aktor (pemerintah dan masyarakat) terkait dengan implementasi kebijakan
3. Tepat Target
 - Ø Kesesuaian antara target yang diintervensi dengan yang direncanakan
 - Ø Tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain
 - Ø Adanya kesiapan target yang direncanakan untuk diintervensi (konflik/harmoni)
 - Ø Adanya kesiapan target yang diintervensi untuk mendukung atau menolak kebijakan
 - Ø Kondisi implementasi kebijakan bersifat memperbaharui kebijakan sebelumnya

4. Tepat lingkungan
- Ø Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga-lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait
 - Ø Lingkungan eksternal kebijakan
Public opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan
5. Tepat Proses
- Ø *Policy acceptance*, yaitu publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan
 - Ø *Policy Adoption*, yaitu publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan, pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan
 - Ø *Strategic readiness*, yaitu publik siap menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat (pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Tabel 2.4
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variable	Dimensi	Kategori	Indikator
Implementasi kebijakan publik	Efektivitas Implementasi kebijakan publik	Tepat Kebijakannya	Ø Efektif Ø Tidak Efektif	Ø Kebijakan bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan Ø Kebijakan telah dirumuskan sesuai dengan dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan Ø Kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya

Tabel 2.4 - Lanjutan

Konsep	Variable	Dimensi	Kategori	Indikator
		Tepat pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> Ø Efektif Ø Tidak Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Aktor implementasi kebijakan (pemerintah dan masyarakat) Ø Kerjasama antar aktor (pemerintah dan masyarakat)
		Tepat target	<ul style="list-style-type: none"> Ø Efektif Ø Tidak Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan Ø Tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain Ø Target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak (target dalam konflik/harmoni) Ø Kondisi target ada dalam kondisi mendukung/ menolak Ø Intervensi implementasi kebijakan bersifat memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya
		Tepat lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Ø Efektif Ø Tidak Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Lingkungan kebijakan (interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait) Ø Lingkungan eksternal <i>Public opinion</i> persepsi masyarakat akan kebijakan dan implementasi kebijakan

Tabel 2.4 - Lanjutan

Konsep	Variable	Dimensi	Kategori	Indikator
		Tepat Proses	Ø Efektif Ø Tidak Efektif	Ø <i>Policy acceptance</i> <ul style="list-style-type: none"> • Publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan • Pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan Ø <i>Policy adoption</i> <ul style="list-style-type: none"> • Publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan • Pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan Ø <i>Strategic readiness</i> <ul style="list-style-type: none"> • Publik siap melaksanakan/ menjadi bagian dari kebijakan • Birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan

(Sumber: Nugroho,2011:650-652)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam mempelajari suatu realitas sosial terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang mengacu pada titik darimana narasi dilihat. Hal ini sebagaimana dikutip dalam buku *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach* yang menyatakan:

”two paradigms differ in terms of the use of language and words, one difference is in the point of view used by authors in introductions to qualitative and quantitative studies, point of view refer to the point from which the action of the narration is viewed”(Creswell,1994:42).

Definisi penelitian dalam buku *Proses Penelitian Kuantitatif* adalah proses untuk mendapatkan solusi dari permasalahan setelah melakukan studi dan analisis dari berbagai faktor (Nasution & Usman,2007:2), sedangkan dalam buku *Cara Meneliti* penelitian meliputi kisaran pengkajian yang luas, mulai dari pemberian dan penyelidikan sederhana sampai penyusunan percobaan yang canggih (Moore,1995:1).

Penelitian ini berusaha memahami kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Program Beras Miskin (Raskin) yang dimulai pada tahun 2002 yang menggantikan kebijakan Operasi Pasar Khusus (OPK). Peneliti ingin melihat sejauhmana efektivitas implementasi dari kebijakan dalam Program Raskin yang dilakukan pada tahun 2010. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan menganalisis hasil penelitian mengenai *Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) (Studi RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur)* adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman bagi peneliti dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti, hingga cara menafsirkan data yang telah terkumpul dari lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell

dalam buku *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach* yang mengatakan :

“...in quantitative paradigm of research, in which researchers use accepted and precise meanings, a theory commonly is understood to have certain characteristics...”(Creswell,1994:82).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena pada penelitian *Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur* akan lebih efektif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menginginkan penelitian ini akan menjadi lebih lengkap dan kaya akan data dan sumber-sumber lain jika menggunakan metode kuantitatif, sehingga tujuan awal penelitian akan dapat dengan mudah dilakukan dan dapat menjawab pertanyaan penelitian bagi peneliti. Alasan lain penggunaan pendekatan kuantitatif karena pendekatan kuantitatif memiliki pemahaman mendalam yang akan mempertanyakan suatu objek secara tuntas. Penelitian kuantitatif akan secara lengkap membahas tentang masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kuantitatif menggunakan data-data statistik yang akan mendukung penelitian. Data-data diperoleh dengan menghitung nilai yang ada di kuisioner, kemudian dipergunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti akan masalah yang ada.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dimensi waktu.

3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penjelasan karakteristik mengenai objek penelitian, sehingga akan didapat pengertian mengenai karakteristik, mengetahui profil, dan atau menjelaskan aspek yang relevan dari fenomena terhadap objek penelitian (Nasution & Usman,2007:81).

Dalam buku *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial* menjelaskan penelitian deskriptif mungkin berbentuk survei, penelitian observasional, evaluasi, atau kepustakaan (seperti Meta Analisis) (Irawan,2006:149).

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena sosial yang benar-benar ada dan menjelaskan tentang objek penelitiannya secara lengkap. Fenomena sosial yang digambarkan peneliti dalam penelitian ini yaitu kemiskinan yang terjadi di wilayah RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sedangkan objek dalam penelitian ini atau bidang teori yang dijadikan fokus yaitu efektivitas implementasi kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan dalam Program Raskin. Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangan peneliti menginginkan menggambarkan lebih dalam tentang efektivitas implementasi kebijakan Program Raskin di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, serta peneliti ingin melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Program Raskin, hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Ditinjau dari segi manfaat yang digunakan, penelitian ini tergolong dalam penelitian murni. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Neuman dalam buku *Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approaches* yaitu :

"pure research (basic research) advances fundamental knowledge about the social world. It focus on supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relation are certain way and why society change" (Neuman,2003:23).

Penelitian murni pada dasarnya mengembangkan pokok-pokok pengetahuan mengenai kondisi sosial. Hal tersebut memiliki fokus pada pembuktian dengan dukungan teori guna menjelaskan tentang bagaimana gejala sosial terjadi, apa yang menyebabkannya terjadi, mengapa hubungan sosial merupakan suatu hal yang pasti, dan mengapa lingkungan senantiasa berubah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian murni karena penelitian ini menggunakan teori. Teori yang digunakan peneliti adalah teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, hal ini bertujuan menjelaskan kondisi dan gejala sosial, dan dalam penelitian murni juga memfokuskan hasil penelitiannya untuk pemenuhan kebutuhan intelektual yang berorientasi akademis.

3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Sementara itu, dilihat dari dimensi waktu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian *cross-sectional* karena penelitian dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja sampai peneliti menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dengan melihat kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) pada tahun 2010. Informasi yang terkait dengan kebijakan dalam Program Beras Miskin (Raskin) peneliti kumpulkan dan kaji dalam satu waktu tertentu. Peneliti tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Neuman dalam buku *Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approaches in cross-sectional research, researcher observe at one in time* (Neuman,2000:31).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian survei. Metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuisisioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Penelitian survei dengan kuisisioner ini memerlukan responden dalam jumlah yang cukup agar validitas temuan bisa dicapai dengan baik, karena validitas data sangat tergantung pada kejujuran responden maka penelitian sebaiknya juga menggunakan cara lain (selain kuisisioner) untuk meningkatkan keabsahan data itu. Misalnya, peneliti mungkin bertanya kepada responden (Irawan,2006:109). Proses survei dimulai dengan mengajukan pertanyaan tertulis baik yang telah tersusun dalam kuisisioner dan disebarkan kepada responden serta juga menggunakan teknik wawancara, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui efektivitas Program Raskin di RW 08 Kelurahan

Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Peneliti memilih metode survei karena metode ini dianggap tepat untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden pada RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer berupa studi lapangan dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Data primer adalah data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari responden atau melakukan eksperimen sendiri (Nasution dan Usman,2007:96). Data primer berupa studi lapangan merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber informasi, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui kuisisioner kepada responden penelitian, selain kuisisioner peneliti juga menggunakan cara lain untuk meningkatkan keabsahan data yaitu dengan cara melakukan wawancara/bertanya langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Kuisisioner merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku (Prasetyo dan Jannah,2005:49) kuisisioner dalam penelitian ini, peneliti lampirkan pada lampiran 1. Dalam buku *Proses Penelitian Kuantitatif* wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya-jawab terhadap responden agar mendapat informasi yang dibutuhkan oleh penelitian (Nasution dan Usman,2007:96). Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mewawancarai para pihak yang terkait dalam implementasi Program Raskin seperti beberapa RTS-PM raskin, Ketua RT, Sekretaris RW 08, Staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Walikota Jakarta Timur, dan Staf Kantor Kelurahan Penggilingan dan pedoman wawancara tersebut, peneliti lampirkan dalam lampiran 2.

Pengertian data sekunder adalah data yang diambil dari pihak lain, peneliti tidak mengumpulkan data secara langsung (Nasution dan Usman,2007:96). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu studi pustaka berupa data yang diperoleh dari lembaga/instansi seperti BPS DKI Jakarta, Kantor Walikota Jakarta Timur, Kantor Kelurahan Penggilingan dan dari buku-buku, karya akademis, media internet serta sumber-sumber lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua unit yang menjadi objek penelitian (Nasution dan Usman,2007:103), sedangkan pengertian sampel menurut Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,2006:134). Populasi dalam penelitian ini merupakan populasi yang bersifat heterogen yaitu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin di RW 08 Kelurahan Penggilingan yang dikategorikan hampir miskin, miskin, dan sangat miskin yang berjumlah 307 RTS-PM raskin. Sampel yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 75 RTS-PM raskin dari populasi yang berjumlah 307 RTS-PM berdasarkan penghitungan penarikan sampel menggunakan rumus Slovin yang akan dijelaskan pada Sub Bab Teknik Penarikan Sampel.

Jenis penarikan sampel yang digunakan peneliti adalah *probabilitas sampling*, karena populasi yang berjumlah 307 RTS-PM raskin memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sample dalam penelitian ini. Hal tersebut didasari pada pengertian *probabilitas sampling* itu sendiri yaitu teknik pengambilan sampel terhadap elemen di dalam populasi yang diketahui mempunyai kesempatan atau probabilitas untuk terpilih (Nasution dan Usman,2007:105). Dalam buku *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, juga menjelaskan sampel probabilitas harus dihitung dengan rumus-rumus statistika dengan memperhitungkan tingkat kesalahan sampling (*sampling error*), derajat kepercayaan, proporsi, dan sebagainya tergantung sifat populasi dan rumus yang digunakan (Irawan,2006:114).

3.5 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *sample random sampling* (penarikan sampel acak sederhana). Penarikan sampel acak sederhana adalah teknik penarikan sampel yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap elemen untuk terpilih (Nasution dan Usman,2007:105). Alasan peneliti menggunakan penarikan sampel acak sederhana karena populasi dari penelitian ini bersifat heterogen (RTS-PM hampir miskin, miskin, dan sangat miskin), sehingga setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Berikut rumus dan penjelasan perhitungan untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

d : Nilai presisi (persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel)

(Bungin, 2005:105)

Berikut perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{307}{307 \times (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{307}{307 \times (0,01) + 1} = \frac{307}{4,07} = 75,4299754 = 75$$

Dari jumlah populasi sebesar 307 RTS-PM raskin, peneliti akan mengundi dan mengambil 75 RTS-PM raskin untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Karakteristik responden yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah RTS-PM raskin yang dikategorikan sebagai masyarakat hampir miskin, miskin, dan sangat miskin.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis data yang telah diperoleh. Analisis data dalam penelitian kuantitatif berbentuk statistik. Pengolahan dalam bentuk statistik pada dasarnya adalah proses pemberian makna (arti) terhadap penelitian kuantitatif melalui angka-angka (Bungin, 2001: 187). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dengan menggunakan satu variable (univariat). Perhitungan statistik yang dilakukan menggunakan program SPSS 17, untuk melihat hasil data diri responden peneliti menggunakan skala nominal, sedangkan untuk mengukur efektivitas implementasi Program Raskin peneliti menggunakan skala pengukuran

ordinal. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah diperoleh (Prasetyo dan Jannah, 2005: 170). Tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Pengkodean Data (*Data Coding*)

Data coding merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah (yang ada dalam kuisioner) ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data seperti komputer (Prasetyo dan Jannah, 2005:171). Dalam penelitian ini data yang telah peneliti peroleh diberikan kode pada masing-masing jawaban yang ada di kuisioner dari data diri responden sampai dengan data jawaban responden pada setiap indikator (pertanyaan). Data diri responden yang dapat dianalisis oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh adalah usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Dibawah ini penjelasan pengkodean data diri responden tersebut:

Ø Usia responden

17-26 tahun diberi kode: 1

27-36 tahun diberi kode: 2

37-46 tahun diberi kode: 3

47-56 tahun diberi kode: 4

57-66 tahun diberi kode: 5

Ø Jenis kelamin responden

Laki-laki diberi kode : 1

Perempuan diberi kode : 2

Ø Jenis pekerjaan responden

Buruh diberi kode : 1

Pengangguran diberi kode : 2

Pedagang diberi kode : 3

Pegawai swasta diberi kode : 4

Pembantu diberi kode : 5

Petani diberi kode : 6

Tukang bangunan diberi kode : 7

Tukang sampah diberi kode : 8

Disisi lain data jawaban responden pada setiap indikator (pertanyaan) dilakukan pengkodean untuk memperoleh skor berdasarkan Skala Likert. Dalam buku *Metode Penelitian Bisnis*, skala likert merupakan metode pengukuran sikap yang menyatakan setuju dan ketidaksetujuan terhadap obyek atau kejadian tertentu. Skala ini pada umumnya menggunakan lima angka penelitian, yaitu (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak pasti atau netral, (4) tidak setuju dan (5) sangat tidak setuju (Sugiyono,2006:80). Untuk keperluan analisis kuantitatif peneliti, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:

1. Sangat setuju/selalu/sangat positif, diberi skor : 4
2. Setuju/sering/positif, diberi skor : 3
3. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif, diberi skor : 2
4. Sangat tidak setuju/tidak pernah/ sangat negatif, diberi skor : 1

Peneliti juga mengkode ulang untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil jawaban responden. Peneliti menganalisis hasil jawaban responden dengan mengkategorikan efektif dan tidak efektif berdasarkan pada setiap dimensi yang terdapat pada teori yang digunakan dan tujuan lain dari pengkodean ulang adalah untuk mempermudah peneliti dalam memberikan kesimpulan berdasarkan total responden yang sudah dikategorikan. Berikut penjelasan pengkodean ulang tersebut:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Sangat setuju/sangat positif, diberi skor: 4 | } | diberi kode 2 |
| 2. Setuju/positif, diberi skor: 3 | | |
| 3. Tidak setuju/negatif, diberi skor: 2 | } | diberi kode 1 |
| 4. Sangat tidak setuju/sangat negatif, diberi skor: 1 | | |

3.6.2 Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi adalah sebuah distribusi matematis yang bertujuan mendapatkan hitungan jumlah tanggapan yang diasosiasikan dengan nilai yang berbeda mengenai variabel dan untuk mengekspresikan hitungan-hitungan tersebut dengan bentuk persentase (Malhotra,2005:122).

Distribusi frekuensi yang dilakukan peneliti adalah menghitung jumlah atau persentase dari jumlah responden berdasarkan data diri

responden, menghitung jumlah atau persentase dari jawaban responden pada setiap dimensi yang telah dikategorikan (kode ulang) dan menghitung jumlah atau persentase total jawaban responden untuk seluruh dimensi yang telah dikategorikan juga (kode ulang).

3.6.3 Tabulasi Silang (*Cross Tabulation*)

Sebuah teknik statistik yang menjelaskan dua atau lebih variabel secara bersamaan dan hasil dalam tabel tersebut mencerminkan distribusi gabungan dua atau lebih variabel yang mempunyai kategori terbatas atau nilai yang berbeda. Suatu tabulasi silang adalah penggabungan distribusi frekuensi dalam satu table (Malhotra, 2005 : 136).

Dalam penelitian ini, dilakukan tabulasi silang antara hasil analisis isi (hasil total responden dan hasil pada setiap dimensi) dengan analisis data diri responden. Tabulasi silang ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana jumlah atau persentase dari penggabungan data/tabel jika disilangkan dengan karakteristik responden.

3.7 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemui sejumlah hambatan, yaitu peneliti tidak dapat menjangkau lebih banyak wilayah, karena keterbatasan jarak dari wilayah lokasi penelitian, sehingga untuk mempermudah peneliti memfokuskan pada suatu wilayah saja. RTS-PM raskin yang dijadikan responden hanya pada RT 04, RT 013, RT 03 di RW 08 Kelurahan Penggilingan.

3.8 Uji Realibilitas

Reliabilitas secara umum dikatakan adanya konsistensi hasil pengukuran hal yang sama jika dilakukan dalam konteks waktu yang berbeda. Menurut Menrens dan Lehman, reliabilitas merupakan tingkat konsistensi antara dua pengukuran terhadap hal yang sama (Sarwono,2012:85).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Alpha (Cronbach's)*. Metode ini dipilih karena metode *Alpha (Cronbach's)* sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-20, 0-50) (Priyanto, 2008:25-26). Menurut Kerlinger dan Lee (2000), sebuah tes yang

memiliki koefisien reliabilitas yang berada pada nilai reliabilitas 0,5 atau 0,6 masih dapat diterima.

Setelah melalui penghitungan reliabilitas yang dilakukan dengan SPSS 17, ternyata alat ukur menunjukkan hasil koefisien reliabilitas di atas 0,5, hal ini dapat dilihat dari *cronbach's alpha* yang dihasilkan pada setiap instrumen berada di atas 0.5 yang berarti reliabilitas alat ukur dapat digunakan. Hasil perhitungan statistik mengenai realibilitas instrumen dimuat dalam lampiran 3, Tabel 3.1 merupakan tabel ringkasan dari hasil perhitungan statistik mengenai realibilitas yaitu:

Tabel 3.1
Realibilitas Instrumen

Dimensi	Jumlah Item	Cronbach's Alpha
Tepat Kebijakan (T1)	4	.881
Tepat Pelaksananya (T2)	3	.681
Tepat Target (T3)	5	.598
Tepat Lingkungan (T4)	7	.632
Tepat Proses (T5)	3	.557

(Sumber : Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

3.9 Uji Validitas

Setelah melakukan pengujian reliabilitas, peneliti juga melakukan pengujian validitas item. Validitas itu sendiri merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006:168).

Peneliti melakukan *pre-test* untuk menentukan validitas dari kuisisioner yang dibagikan kepada sampel penelitian sebanyak 30 responden dari total jumlah sampel penelitian sebanyak 75 responden. Uji validitas yang dilakukan peneliti dengan menggunakan analisis faktor (*factor analysis*) yaitu *factor loading* untuk memastikan masing-masing pertanyaan terklasifikasi pada setiap variabel yang ditentukan. Jika *loading factor* dari indikator > 0,50 indikator tersebut valid (Ghozali, 2004:21). Peneliti melihat valid atau tidaknya dengan cara melihat hasil perhitungan statistik pada kolom *KMO and Bartlett's Test* pada SPSS 17. Semua hasil perhitungan statistik mengenai validitas dapat dilihat pada lampiran 3 dan tabel 3.2 merupakan ringkasan dari hasil perhitungan statistik mengenai validitas:

Tabel 3.2
Validitas Indikator

Nomor	Anti-image Correlation	KMO and Bartlett's Test		Loading Factor	Keterangan
P1	.840 ^a	.744	>	0,50	Valid
P2	.807 ^a		>	0,50	Valid
P3	.677 ^a		>	0,50	Valid
P4	.700 ^a		>	0,50	Valid
P5	.514 ^a	.522	>	0,50	Valid
P6	.659 ^a		>	0,50	Valid
P7	.513 ^a		>	0,50	Valid
P8	.628 ^a	.624	>	0,50	Valid
P9	.654 ^a		>	0,50	Valid
P10	.612 ^a		>	0,50	Valid
P11	.674 ^a		>	0,50	Valid
P12	.559 ^a		>	0,50	Valid
P13	.517 ^a	.605	≥	0,50	Valid
P14	.884 ^a		>	0,50	Valid
P15	.587 ^a		>	0,50	Valid
P16	.574 ^a		>	0,50	Valid
P17	.587 ^a		>	0,50	Valid
P18	.522 ^a		>	0,50	Valid
P19	.669 ^a	.617	>	0,50	Valid
P20	.596 ^a		>	0,50	Valid
P21	.609 ^a		>	0,50	Valid
P22	.663 ^a		>	0,50	Valid

(Sumber : Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

BAB 4

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum

Pada bagian ini peneliti memberikan gambaran sekilas mengenai, kondisi geografis DKI Jakarta, Kondisi Demografis DKI Jakarta, Program Raskin, Tim Koordinasi Raskin:

4.1.1 Kondisi Geografis DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 6° 12' Lintang Selatan dan 106° 48" Bujur Timur. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan berupa lautan seluas 6.977,5 km². Secara geografis di sebelah utara Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebelah barat dengan Provinsi Banten.

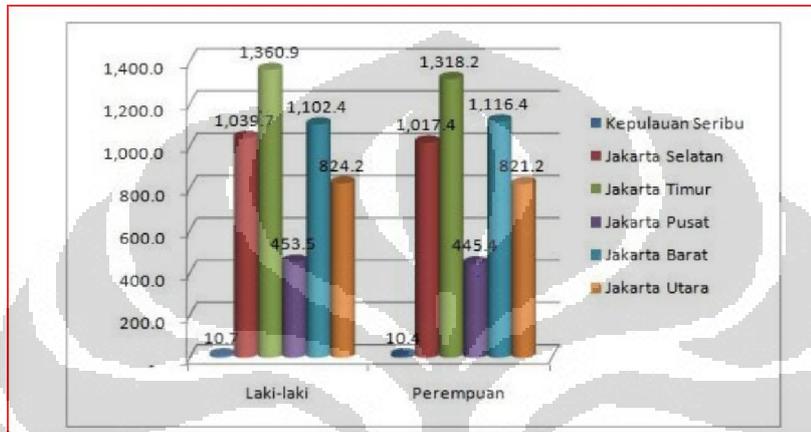
Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km², Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km², Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km² dan Jakarta Utara dengan luas daratan 142,40 km², serta Kabupaten Administrasi dengan luas daratan 11,81 km² (LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010,2010:7-9).

4.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2010 sebanyak 9.588,2 ribu jiwa, terdiri dari laki-laki 4.859,27 ribu orang dan perempuan 4.728,93 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2000/2010 sekitar 1,40%. Angka ini meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk 1990/2000 yang hanya 0,14%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh banyaknya migran masuk dari daerah lain, sedangkan penduduk yang keluar DKI Jakarta relatif lebih sedikit. Jumlah kelahiran pada tahun 2010 diperkirakan sekitar 144 ribu

jiwa sedangkan kematian sekitar 32,5 ribu jiwa (LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010,2010:11).

Dilihat dari hasil Sensus Penduduk menurut Kabupaten/Kota menunjukkan sebaran penduduk terbesar di DKI Jakarta ada di Jakarta Timur, yaitu sebesar 2.687,027 jiwa (LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010,2010:11). Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 yang dapat dilihat dari gambar 4.1:



Gambar 4.1 Penyebaran Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2010

(Sumber LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010,2010:12)

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskinnya Jakarta Timur memiliki urutan ke 2 dari Jakarta Utara berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik, ini dapat dilihat dari tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2006-2010

Kabupaten/Kota Adm. Regency/Municipality	Penduduk Miskin / <i>The Poor</i> (ribu/thousand)			
	2007	2008	2009	2010
Kepulauan Seribu	2,9	2,6	2,4	2,7
Jakarta Selatan	76,3	71,1	73,3	78,4
Jakarta Timur	94,6	79,8	81,2	91,6
Jakarta Pusat	34,5	31,0	32,1	35,7
Jakarta Barat	85,2	72,9	74,0	87,2
Jakarta Utara	112,2	85,2	76,2	92,6
DKI Jakarta	405,7	342,5	339,6	388,2

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011:109)

4.1.3 Profil Kecamatan Cakung

Secara geografis, Kecamatan Cakung terletak antara 106° 49' 35" Bujur Timur dan 06° 10' 37" Lintang Selatan. Adapun luas wilayah ini mempunyai luas 42,47 Km². Adapun batas wilayahnya sebelah utara Kecamatan Cilincing, sebelah timur Kecamatan Bekasi Utara, sebelah barat Kecamatan Pulo Gadung, sebelah selatan Kecamatan Duren Sawit. Ada beberapa sungai yang melewati wilayah Kecamatan Cakung yaitu kali Cakung, kali Buara, dan di batasi oleh Cakung Nadeco di sebelah timur. Kecamatan Cakung ini cukup strategis karena terletak di pintu gerbang masuk Jakarta dari arah timur yaitu Provinsi Jawa Barat (Bekasi). Kecamatan Cakung ini juga di lintasi oleh jalan tol Cakung – Cilincing (Cacing). Kantor Kecamatannya terletak di Jl. Raya Bekasi KM 23.

Dari sisi perekonomian, Kecamatan Cakung merupakan kawasan khusus industri, karena kegiatan di sektor industri sangat dominan. Di kecamatan ini terdapat pabrik-pabrik besar (berat) maupun kecil (ringan dan industri rumah tangga) yang menghasilkan berbagai macam produk. Kegiatan industri terbesar terdapat di kawasan industri Pulogadung (PT. JIEP) dan kegiatan industri lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Cakung adalah sekitar 224.001 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 81.663. Tingkat pertumbuhan penduduk 2,63% per tahun, sementara jumlah RW adalah 84 RW dan jumlah RT 951, dengan jumlah kepala keluarga 96.468. Persentase penggunaan lahan di Kecamatan Cakung yang terbesar adalah berupa perumahan sebanyak 45,27% serta daerah terkecil penggunaan industri seluas 24,33%. Secara administrasi Kecamatan Cakung terdiri atas tujuh kelurahan. Masing-masing kelurahan mempunyai luas yang sangat bervariasi. (Jakarta Timur Situs Resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur,2011). Luas dan alamat Kelurahan di Kecamatan Cakung dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Luas Dan Alamat Kelurahan di Kecamatan Cakung

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Alamat
1	Kelurahan Rawa Terate	4,10	Jl. DR. KRT Radjiman Widyadiningrat
2	Kelurahan Jatinegara	6,60	Jl. Bekasi KM. 18
3	Kelurahan Penggilingan	4,48	Jl. Komp. PIK Penggilingan
4	Kelurahan Cakung Barat	6,19	Jl. Tipar Cakung
5	Kelurahan Cakung Timur	9,81	Jl. Irigasi Gempol
6	Kelurahan Ujung Menteng	4,47	Jl. Raya Bekasi KM 26
7	Kelurahan Pulogebang	6,86	Jl. Raya Pulogebang

(Sumber: <http://timur.jakarta.go.id>)

Dari hasil sensus penduduk 2010 menggambarkan bahwa penyebaran penduduk di Jakarta Timur terbesar berada di Kecamatan Cakung yakni sebesar 18,73 persen, diikuti Kecamatan Duren Sawit sebesar 14,18 persen, dan Kecamatan Kramatjati sebesar 10,14 persen. Kecamatan Cakung, Kecamatan Duren Sawit, dan Kecamatan Kramatjati adalah kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 503.174 orang, 381.964 orang, dan 272.164 orang, sedangkan Kecamatan dengan penduduk yang paling kecil di Kecamatan Matraman berjumlah 148.648 orang (Jakarta Timur Situs Resmi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur, 2011).

4.1.4 Profil Kelurahan Penggilingan

Jumlah penduduk di Kelurahan Penggilingan pada tahun 2010 sebesar 57.268 orang yang terdiri dari laki-laki sebesar 27.212 dan perempuan sebesar 30.056 serta memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 18.919 KK (Data Umum PKK Kelurahan Penggilingan Tahun 2010, 2010). Dari Daftar Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2010, Kelurahan Penggilingan memiliki jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) terbesar pada Kecamatan Cakung yaitu mencapai 2.069 RTM (Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur 2010, 2010). Dilihat dari jumlah rumah

kurang sehat, Kelurahan Penggilingan memiliki 2.439 rumah (Data Umum PKK Kelurahan Penggilingan Tahun 2010,2010).

Pada tahun 2010, Kelurahan Penggilingan dipimpin oleh seorang Lurah bernama Teguh Arifiyanto AP MSi, dan Wakil Lurahnya bernama Dra Usdiati (Jakarta Timur Situs Resmi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2011). Kelurahan Penggilingan ini terdiri dari RW 01 sampai dengan RW 18 yang dipimpin oleh Para Ketua RW disetiap masing-masing RW dan dibawah oleh Ketua RT untuk perwakilan dari wilayah yang lingkupnya lebih kecil lagi (Data Umum PKK Kelurahan Penggilingan Tahun 2010,2010). RW 08 merupakan wilayah yang memiliki jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ Rumah Tangga Miskin (RTM) terbanyak pada Kelurahan Penggilingan (Daftar Nama RTS-PM di Kelurahan Penggilingan, 2010). Dilihat dari rumah yang kurang sehat, RW 08 memiliki jumlah rumah kurang sehat terbanyak di Kelurahan Penggilingan yaitu sebesar 975 rumah (Data Umum PKK Kelurahan Penggilingan Tahun 2010,2010). Data umum PKK Kelurahan Penggilingan dimuat oleh peneliti dalam lampiran 8.

4.1.5 Program Raskin

Sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). OPK memberikan subsidi beras secara *targetted* kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2011:1).

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah:

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
6. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985.
7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
12. Inpres Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
14. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

(Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:2)

Program Raskin merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah dengan maksud meningkatkan ketahanan pangan nasional. Tujuan Program Raskin itu sendiri adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Disamping itu, Program Raskin dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangannya

sebagai salah satu hak dasar masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:2).

Sasaran Program Raskin tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS-PM berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 2,73 juta ton selama setahun setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tembus Rp 1.600/kg netto di titik distribusi (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:3). RTS-PM raskin ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-08) BPS umumnya masih mengundang perdebatan di daerah. Hal ini disadari karena kemiskinan bersifat dinamis dan relatif (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2011:2).

Efektivitas Program Raskin 2010 dapat dicapai melalui koordinasi antara instansi/lembaga terkait ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:2-3). Program Raskin memiliki Indikator Kinerja Program yang ditunjukkan dengan tercapainya target 6T yaitu :

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1 (model daftar penerima manfaat raskin di Desa/Kelurahan).
2. Tepat Jumlah: Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
3. Tepat Harga: Harga tembus raskin adalah sebesar Rp 1.600/kg netto di titik distribusi.
4. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM raskin sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

6. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

(Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:17)

4.1.6 Tim Koordinasi Raskin

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2010 dipandang perlu mengatur organisasi pelaksana Program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:5)

Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

Dalam pelaksanaan Program Raskin banyak instansi-instansi yang terkait baik ditingkat Pusat maupun daerah yang termasuk dalam Tim Koordinasi Raskin. Ditingkat pusat terdiri dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, BPKP, dan Perum Bulog. Ditingkat daerah terdiri dari Sekretariat Provinsi, Sekretaris daerah, Sekretariat Kecamatan, Bappeda, Dinas Sosial, BPS ditingkat provinsi dan Kabupaten, Kantor Perwakilan BPKP, Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan, Koordinator Statistik kecamatan, Bulog Divisi Regional, serta Satker Raskin (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:5-10).

1. Tim Koordinasi Raskin Pusat

- Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Pusat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- Tugas melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin.
- Fungsi mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan raskin sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi

- Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- Tugas Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin.
- Fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi yaitu koordinasi perencanaan Program Raskin di Provinsi, penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin, fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program Raskin, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.

3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab Program Raskin di tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengalokasian Pagu Raskin bagi seluruh RTS-PM raskin, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran harga penjualan beras (HPB) dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan Program Raskin di wilayahnya,

Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

- Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- Tugas Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin.
- Fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota yaitu perencanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota, penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota, fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kabupaten/Kota, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan, penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan raskin.

4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan Program Raskin di wilayahnya, Camat membentuk Tim koordinasi Raskin sebagai berikut :

- Kedudukan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- Tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- Fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan yaitu perencanaan distribusi Program Raskin di Kecamatan, fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kecamatan, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Desa/Kelurahan.

5. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi raskin, penyelesaian pembayaran hasil pembayaran beras (HPB) dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya. Untuk pelaksanaan distribusi raskin di wilayahnya, Kepala Desa/Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin, Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di tingkat Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Wardes kepada RTS-PM raskin, Kelompok Masyarakat (Pokmas) lembaga masyarakat dan/atau kelompok

masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin

- Kedudukan Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- Tugas menerima dan mendistribusikan beras raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM raskin di titik distribusi, menerima hasil penjualan beras (HPB) dari RTS-PM raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divisi Regional (Divre)/ Sub Divisi Regional (Subdivre)/ Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin, menyelesaikan administrasi distribusi raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2 (model daftar penjualan raskin di Desa/Kelurahan).
- Fungsi Pelaksana Distribusi Raskin yaitu melakukan pendistribusian raskin kepada RTS-PM raskin, penerimaan uang hasil penjualan beras raskin secara tunai dari RTS-PM raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog, pengadministrasian distribusi raskin kepada RTS-PM raskin.

6. Satker Raskin

- Kedudukan
Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Regional (Kadivre)/ Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivre)/ Kepala Kantor Seksi Logistik (Kakansilog) Perum Bulog sesuai tingkatannya.
- Organisasi Satker Raskin terdiri dari :
 - a) Ketua
 - b) Anggota (Pegawai Perum Bulog yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum

Bulog, Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh Ketua Satker atas sepengetahuan Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog.

- Tugas dan Kewenangan

Satker Raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab:

- a) Ketua Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog, mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi raskin.
- b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua melakukan pendistribusian beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di titik distribusi, menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog, menyelesaikan administrasi distribusi raskin yaitu Delivery Order (perintah tertulis untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang pada pihak lain), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap BAST di Kecamatan dengan model MBA-0 (model rekap BAST ditingkat Kecamatan) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 (model daftar penjualan raskin di Desa/Kelurahan) dari titik distribusi, melaporkan pelaksanaan tugas antara lain: realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kepala Divisi Regional (Kadivreg)/ Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivreg)/ Kepala Kantor Seksi Logistik (Kakansilog) Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

(Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:5-11)

4.2 Analisis Data Responden

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun melalui 75 orang responden, diperoleh data yang berkaitan dengan aspek demografi responden yang meliputi data diri responden di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur yakni: usia responden, jenis kelamin, dan pekerjaan responden. Data perhitungan statistik tentang data diri responden telah peneliti lampirkan pada lampiran 4.

4.2.1 Usia Responden

Data yang berhasil dihimpun, usia responden dalam penelitian berkisar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun. Data tentang usia responden dimaksudkan untuk mengetahui persentase usia penerima (beras miskin) raskin dari warga miskin (responden) di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
Responden Menurut Umur

Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
17-26 Tahun	7	9.3
27-36 Tahun	23	30.7
37-46 Tahun	24	32.0
47-56 Tahun	13	17.3
57-66 Tahun	8	10.7
Total	75	100.0

(Sumber : Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.3, responden terbanyak menerima beras miskin (raskin) di daerah tersebut berada pada usia produktif, menurut informasi yang diperoleh dari *depnakertrans.go.id* kisaran usia produktif berada pada usia 15-60 tahun (Kependudukan,2007). Di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, penerima beras miskin (raskin) terbanyak berada pada kelompok umur 37-46 tahun yaitu sebanyak 24 orang (32.0%). Pada urutan kedua penerima

beras miskin terbanyak berada pada kisaran kelompok umur 27-36 tahun yaitu sebanyak 23 orang (30.7%).

4.2.2 Jenis Kelamin

Dari jumlah sampel yang disebar kepada 75 orang, hasil penelitian dapat dilihat dari komposisi jenis kelamin responden yang menerima beras miskin (raskin) terdapat 29 orang (38.7%) jenis kelamin laki-laki dan selebihnya jenis kelamin perempuan sebanyak 46 orang (61.3%), responden perempuan mendominasi sebagai penerima beras miskin pada RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel responden menurut jenis kelamin di bawah ini:

Tabel 4.4
Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	29	38.7
Perempuan	46	61.3
Total	75	100.0

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

4.2.3 Pekerjaan

Penyebaran kuisisioner dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bidang pekerjaan yang dimiliki oleh responden dari mulai responden yang bermata pencaharian sebagai buruh sampai dengan responden yang bermata pencaharian sebagai tukang sampah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) memiliki jumlah persentase terbesar sebagai penerima beras miskin (raskin) di wilayah RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur sebanyak 32 orang (42.7%), sedangkan persentase terbesar kedua adalah responden yang bekerja sebagai buruh yaitu sebanyak 10 orang (13.3%), selengkapnya dapat dilihat pada table 4.5:

Tabel 4.5
Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Buruh	10	13.3
Pengangguran	32	42.7
Pedagang	8	10.7
Pegawai Swasta	1	1.3
Pembantu	5	6.7
Petani	7	9.3
Tukang Bangunan	6	8.0
Tukang Sampah	6	8.0
Total	75	100.0

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

4.3 Pembahasan Dan Analisis Data Efektivitas Kebijakan Program Raskin

Pelaksanaan Program Raskin ditetapkan dengan Peraturan Perundangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin yaitu UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan, Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, Inpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan nasional, Kepmenko Kesra No.35 Tahun 2008 tentang koordinasi raskin pusat (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2010:2). Program Raskin merupakan kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, Program Raskin juga merupakan kebijakan material yaitu kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran (Subarsono,2005:19-21).

Dalam buku *Public Policy*, Riant Nugroho menulis ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat prosesnya. Untuk melihat efektivitas implementasi Program Raskin, peneliti mengkategorikan hasil penelitian menjadi tidak efektif dan efektif serta menganalisis seluruh responden dari seluruh dimensi penelitian dengan menggunakan SPSS 17. Berikut hasil data yang diperoleh dari SPSS 17 untuk melihat efektivitas implementasi Program Raskin (tabel 4.6) yang mengacu pada lampiran 5:

Tabel 4.6
Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Jawaban Seluruh Responden

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Efektif	36	48.0
Efektif	39	52.0
Total	75	100.0

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa seluruh dimensi penelitian yang telah dikategorikan tidak efektif dan efektif berdasarkan jawaban seluruh responden seperti pada tabel 4.6 menunjukkan 36 responden (48.0%) yang menganggap implementasi Program Raskin tidak berjalan dengan efektif dan 39 responden (52%) menganggap implementasi Program Raskin sudah berjalan dengan efektif. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas implementasi Program Raskin di wilayah ini dapat dikatakan sudah efektif.

Dilihat dari usia reponden, responden yang termasuk dalam kategori tidak efektif berada pada kisaran usia 37-46 tahun dan 47-56 tahun, sedangkan responden yang termasuk dalam kategori efektif berada pada kisaran usia 27-36 tahun. Berikut hasil data yang diperoleh peneliti untuk melihat efektivitas seluruh responden berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel 4.7 yang tercantum secara lengkap data statistiknya pada lampiran 6:

Tabel 4.7
Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Usia Seluruh Responden

Usia	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
17-26	4	11.1%	3	7.7%	7	9.3%
27-36	9	25.0%	14	35.9%	23	30.7%
37-46	11	30.6%	13	33.3%	24	32.0%
47-56	11	30.6%	2	5.1%	13	17.3%
57-66	1	2.8%	7	17.9%	8	10.7%
Total	36	100%	39	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni)

Berdasarkan jenis kelamin seluruh responden seperti pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menilai efektivitas implementasi

Program Raskin tidak efektif berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 19 orang (52.8%), sedangkan sisanya yang menilai efektivitas implementasi Program Raskin tidak efektif berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 17 orang (47.2%). Disisi lain responden terbanyak yang menilai efektivitas implementasi Program Raskin sudah efektif berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 27 orang (69.2%) dan sisanya yang menilai efektivitas implementasi Program Raskin sudah efektif berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 12 orang (30.8%). Data secara lengkapnya terdapat pada lampiran 6 yang diringkas oleh penenliti menjadi tabel 4.8. Berikut tabel 4.8 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.8
Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Jenis Kelamin
Seluruh Responden

Jenis Kelamin	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Laki-Laki	17	47.2%	12	30.8%	29	38.7%
Perempuan	19	52.8%	27	69.2%	46	61.3%
Total	36	100%	39	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni)

Jika dilihat dari bidang pekerjaan, responden yang menjawab tidak efektif implementasi Program raskin adalah responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) memiliki jumlah persentase terbesar yaitu 30.6% yaitu sebanyak 11 orang. Disamping itu, responden yang menjawab efektif implementasi Program Raskin adalah responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) juga dengan memiliki jumlah persentase terbesar yaitu 53.8% yaitu sebanyak 21 orang. Hasil data lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 6. Untuk ringkasannya dapat dilihat pada tabel 4.9:

Tabel 4.9
Efektivitas Implementasi Program Raskin Berdasarkan Pekerjaan
Responden

Pekerjaan	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Buruh	7	19.4%	3	7.7%	10	13.3%
Pengangguran	11	30.6%	21	53.8%	32	42.7%

Tabel 4.9 – Lanjutan

Pekerjaan	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pedagang	6	16.7%	2	5.1%	8	10.7%
Pegawai Swasta	0	0%	1	2.6%	1	1.3%
Pembantu	2	5.6%	3	7.7%	5	6.7%
Petani	2	5.6%	5	12.8%	7	9.3%
Tukang Bangunan	6	16.7%	0	0%	6	8.0%
Tukang Sampah	2	5.6%	4	10.3%	6	8.0%
Total	36	100%	39	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni)

Dalam buku *Efektivitas Kebijakan Lembaga Pengawasan*, Makmur mengatakan bahwa kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai (Makmur,2011:6). Mengukur efektivitas implementasi Program Raskin merupakan hal penting yang bertujuan untuk melihat keberhasilan atau sebagai tolak ukur suatu proses pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan atau belum. Efektif atau tidak efektifnya implementasi Program Raskin dirasakan oleh masyarakat miskin sebagai penerima raskin.

Hal-hal yang menunjukkan efektif mencerminkan pemerintah dan pihak-pihak terkait raskin sudah bekerja dengan baik, sedangkan menunjukkan hal-hal yang tidak efektif mencerminkan pemerintah dan pihak-pihak terkait belum bekerja secara maksimal. Efektivitas implementasi Program Raskin di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur berdasarkan data yang diperoleh termasuk kedalam dua kategori, yaitu tidak efektif dan efektif.

Responden (RTS-PM raskin) yang termasuk kedalam kategori tidak efektif, artinya responden belum merasakan Program Raskin dapat membantunya dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangganya dalam bentuk kebutuhan pokok (beras), banyak hal yang melatarbelakangi Program Raskin tidak berjalan dengan efektif menurut beberapa responden.

Menurut Sekeretaris RW 08, salah satu alasan dianggap tidak efektif yaitu beras miskin yang diterima masyarakat miskin tidak setiap bulan mereka

dapatkan, karena masyarakat penerima raskin di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dibagi atas 2 kelompok yaitu masyarakat miskin dan masyarakat sangat miskin (memiliki kartu merah) berdasarkan kesepakatan Pengurus RW. Masyarakat yang termasuk miskin hanya dibagikan berasnya tiga/empat bulan sekali, sedangkan masyarakat sangat miskin dibagikan raskin setiap bulan (hasil berdasarkan wawancara dengan Bapak Arpan Dadi, tanggal 18 Mei 2012). Sifat terbuka pemerintah atas beberapa persepsi masyarakat yang menunjukkan tidak efektifnya implementasi Program Raskin dapat dijadikan masukan untuk pemerintah sebagai bahan evaluasi Program Raskin tersebut.

Disamping itu, Sekretaris RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Bapak Arpan Dadi juga menjelaskan bahwa responden yang termasuk dalam kategori efektif sudah merasa Program Raskin sudah membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangganya dalam bentuk kebutuhan pokok (beras). Responden (RTS-PM raskin) yang termasuk dalam kategori ini menganggap upaya yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kelaparan. Responden yang termasuk dalam kategori ini biasanya merupakan masyarakat yang menerima beras miskin setiap bulannya (yang memiliki kartu merah) yang dikategorikan sebagai masyarakat sangat miskin di wilayah RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur (hasil berdasarkan wawancara dengan Bapak Arpan Dadi, tanggal 18 Mei 2012).

4.3.1 Dimensi Tepat Kebijakannya

Tabel 4.10
Dimensi Tepat Kebijakannya

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Efektif	31	41.3
Efektif	44	58.7
Total	75	100.0

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni)

Pada tabel 4.10 mengenai dimensi “tepat kebijakannya”, peneliti membagi dua kategori tidak efektif dan efektif untuk mengukur efektivitas implementasi Program Raskin. Dalam tabel 4.10 menunjukkan bahwa 31

responden (41.3%) menjawab kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Program Raskin tidak efektif/tidak tepat dalam kebijakannya dan 44 responden (58.7%) menjawab kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Program Raskin sudah efektif/sudah tepat kebijakannya. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi ini dapat dikatakan sudah efektif di wilayah ini dan untuk data statistik lengkapnya terdapat pada lampiran 5.

Dilihat dari aspek demografi responden dalam dimensi “tepat kebijakannya” yang terlampir secara lengkap di lampiran 6, yang pertama diawali berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden yang menjawab tidak efektif dalam kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat kebijakannya”) berada pada kisaran usia 37-46 tahun. Disamping itu, responden yang menjawab efektif dalam kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat kebijakan”) berada pada kisaran usia 27-36 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11

Dimensi Tepat Kebijakannya Berdasarkan Usia

Usia	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
17-26	3	9.7%	4	9.1%	7	9.3%
27-36	7	22.6%	16	36.4%	23	30.7%
37-46	12	38.7%	12	27.3%	24	32.0%
47-56	6	19.4%	7	15.9%	13	17.3%
57-66	3	9.7%	5	11.4%	8	10.7%
Total	31	100%	44	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Yang kedua berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden yang menjawab tidak efektif dalam kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat kebijakan”) lebih banyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 16 orang (51.6%) dan sisanya berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 15 orang (48.4%), kemudian responden yang menjawab efektif dalam kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat kebijakan”) lebih banyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 30 orang (68.2%) dan sisanya berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 14 orang (31.8%). Berikut tabel 4.12 yang menggambarkan hasil data yang diperoleh peneliti untuk melihat dimensi “tepat kebijakan” berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.12**Dimensi Tepat Kebijakannya Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Laki-Laki	15	48.4%	14	31.8%	29	38.7%
Perempuan	16	51.6%	30	68.2%	46	61.3%
Total	31	100%	44	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Disisi lain yang ketiga dilihat dari jenis pekerjaan, responden yang menjawab tidak efektif dalam kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat kebijakan”) lebih banyak responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) yaitu 13 orang (41.9%) sedangkan responden yang menjawab efektif dalam kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat kebijakan”) juga lebih banyak responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) yaitu 19 orang (43.2%). Dari analisis peneliti, data dapat dilihat pada tabel 4.13:

Tabel 4.13**Dimensi Tepat Kebijakannya Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Buruh	2	6.5%	8	18.2%	10	13.3%
Pengangguran	13	41.9%	19	43.2%	32	42.7%
Pedagang	3	9.7%	5	11.4%	8	10.7%
Pegawai Swasta	0	0%	1	2.3%	1	1.3%
Pembantu	2	6.5%	3	6.8%	5	6.7%
Petani	5	16.1%	2	4.5 %	7	9.3%
Tukang Bangunan	4	12.9%	2	4.5%	6	8.0%
Tukang Sampah	2	6.5%	4	9.1%	6	8.0%
Total	31	100%	44	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Berikut penjelasan hasil wawancara kepada responden di RT 04 RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, responden

(RTS-PM raskin) yang termasuk kedalam kategori tidak efektif dalam dimensi “tepat kebijakannya”, merupakan masyarakat yang merasa beras miskin yang diterimanya tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga responden. Beras yang diterima setiap bulan atau 3/4 bulan kemudian hanya 5 liter, hal ini jelas tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka selama sebulan. Menurut responden, raskin tidak mengurangi tingkat kelaparan dan tingkat kemiskinan penduduk miskin, jika beras yang diterima masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (hasil berdasarkan wawancara kepada responden di RT 04 RW 08 Kelurahan Penggilingan, pada tanggal 18 Mei 2012). Hal ini diperkuat dalam www.menkokesra.go.id yang menyatakan hasil kajian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat bersama perguruan tinggi pada tahun 2009 yang menunjukkan rata-rata kebutuhan beras untuk RTS-PM sebesar 33-34kg setiap bulan (Menkokesra, 2010).

Menurut salah satu responden di RT 013 RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, responden (RTS-PM raskin) yang termasuk ke dalam kategori efektif mengatakan bahwa:

“beras 5 liter yang saya beli dari RT cukup memenuhi kebutuhan pokok keluarga saya, yang penting pemerintah masih peduli subsidiin beras setiap bulan kepada saya, kalau dipikir beli beras biasa diwarung dengan beras miskin lebih murah raskin, harga beras warung standarnya Rp 6.000/liter sedangkan beras miskin cuma Rp 2.000/liter, jadi menurut saya menghemat pengeluaran belanja rumah tangga saya, kalau beras miskin makin banyak jumlahnya pasti dapat mengurangi tingkat kelaparan dan tingkat kemiskinan” (hasil wawancara dengan Ibu Heri, pada 18 Mei 2012).

Melihat hasil data yang diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden yang menerima raskin dapat diketahui bahwa raskin bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah kemiskinan, kelaparan serta dirumuskan sesuai dengan karakter masalahnya dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin dalam bentuk beras. Hal ini merupakan kewenangan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kelaparan masyarakat miskin, meskipun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang merasa kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya, seperti jumlah raskin tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin penerima raskin.

Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu staf bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Walikota Jakarta Timur yang menyatakan:

“Program Raskin merupakan salah satu program kebijakan pemerintah tentang pengentasan kemiskinan dan kelaparan di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Kementerian ini yang ditugaskan oleh Presiden untuk menjalankan program-program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan. Raskin merupakan bantuan dari pemerintah tidak berupa uang melainkan subsidi. Tujuan Program Raskin untuk mempermudah masyarakat miskin untuk bisa membeli beras dengan harga yang murah dengan kualitas beras baik melalui ketentuan-ketentuan/regulator pemerintah. Pemerintah berharap dengan Program Raskin tersebut masyarakat miskin dapat memenuhi pangan sesuai dengan harga masyarakat miskin. Kita membebaskan pengurus RW dan RT (Pelaksana Distribusi Raskin) untuk mengurus beras miskin yang diperolehnya agar dibagikan secara adil karena kita mengetahui keterbatasan yang ada” (hasil wawancara dengan Bapak Agung Eka Prasetyawan, pada 22 Mei 2012).

4.3.2 Dimensi Tepat Pelaksanaanya

Tabel 4.14
Dimensi Tepat Pelaksanaanya

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Efektif	18	24.0
Efektif	57	76.0
Total	75	100.0

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Tabel 4.14 diatas mengenai dimensi “tepat pelaksanaanya” peneliti mengkategorikan hasil penelitian menjadi tidak efektif dan efektif. Pada tabel 4.14 menjelaskan bahwa dalam implementasi Program Raskin terdapat 18 responden (24.0%) yang menjawab tidak efektif/tidak tepat pelaksanaannya, dan 57 responden (76.0%) yang menjawab efektif/sudah tepat pelaksanaannya. Data tersebut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. Sesuai tabel 4.14 dapat disimpulkan bahwa dimensi ini dapat dikatakan sudah efektif di wilayah ini.

Informasi yang berhasil dihimpun melalui 75 orang responden, diperoleh data yang berkaitan dengan aspek demografi responden yang dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 6. Pertama yang dikaitkan dengan aspek demografi responden dalam dimensi ini adalah aspek

demografi responden berdasarkan usia responden. Responden terbanyak yang menilai tidak efektif dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat pelaksanaannya) berada pada kisaran usia 47-56 tahun dan responden terbanyak yang menilai efektif dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Program Raskin berada pada kisaran usia 37-46 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.15:

Tabel 4.15
Dimensi Tepat Pelaksanaannya Berdasarkan Usia

Usia	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
17-26	2	11.1%	5	8.8%	7	9.3%
27-36	6	33.3%	17	29.8%	23	30.7%
37-46	1	5.6%	23	40.4%	24	32.0%
47-56	9	50.0%	4	7.0%	13	17.3%
57-66	0	0%	8	14.0%	8	10.7%
Total	18	100%	57	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Dilihat dari aspek demografi responden yang kedua berdasarkan jenis kelamin, yaitu responden yang menilai tidak efektif dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat pelaksanaannya) berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang (55.6%) dan sisanya berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 8 orang (44.4%). Disisi lain, responden yang menilai efektif dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Program Raskin adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (63.2%) dan sisanya berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang (36.8%). Dari hasil uraian peneliti tersebut, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16
Dimensi Tepat Pelaksanaannya Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Laki-Laki	8	44.4%	21	36.8%	29	38.7%
Perempuan	10	55.6%	36	63.2%	46	61.3%
Total	18	100%	57	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Berikut aspek demografi responden yang ketiga berdasarkan bidang pekerjaan, yaitu responden terbanyak yang menilai tidak efektif dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat pelaksanaannya” adalah responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) yaitu sebanyak 6 orang (33.3%). Disamping itu, responden terbanyak yang menilai efektif dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Program Raskin juga responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) yaitu sebanyak 26 orang (45.6%). Hasil data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17:

Tabel 4.17
Dimensi Tepat Pelaksanaannya Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Buruh	2	11.1%	8	14.0%	10	13.3%
Pengangguran	6	33.3%	26	45.6%	32	42.7%
Pedagang	4	22.2%	4	7.0%	8	10.7%
Pegawai Swasta	0	0%	1	1.8%	1	1.3%
Pembantu	0	0%	5	8.8%	5	6.7%
Petani	3	16.7%	4	7.0%	7	9.3%
Tukang Bangunan	1	5.6%	5	8.8%	6	8.0%
Tukang Sampah	2	11.1%	4	7.0%	6	8.0%
Total	18	100%	57	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Pelaksana Distribusi Raskin yang menjabat sebagai Ketua RT 013 di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur menyatakan:

“responden (masyarakat miskin) yang termasuk kedalam kategori tidak efektif merupakan masyarakat yang belum merasa pendistribusian raskin belum berjalan dengan baik. Menurut beberapa warga, beras yang diterima setiap bulannya atau yang mendapatkan giliran raskin 3/4 bulan kemudian terkadang mendapatkan raskinnya telat, dikarenakan beberapa warga membayar raskin setiap bulannya masih ada yang menungak (menghutang). Hal ini yang menyebabkan pembayaran raskin ke kelurahan yang nantinya sampai ke Bulog menjadi terhambat,

sehingga beras yang bulan depan yang akan didistribusikan menjadi telat (bisa seminggu atau 2 minggu telatnya). Masyarakat yang membayar tepat waktu (tidak menghutang) mempersepsikan pemerintah tidak melakukan pendistribusian dengan baik. Pemerintah dan masyarakat di RW 08 Kelurahan Penggilingan tidak bekerja sama secara langsung dalam pendistribusian raskin. Dalam implementasinya pihak dari Kelurahan, Kecamatan maupun Walikota tidak datang saat pembagian raskin berlangsung kepada masyarakat miskin/RTS-PM raskin, sehingga masyarakat mempersepsikan pemerintah dan masyarakat (yang bertindak sebagai Pelaksana Distribusi Raskin) tidak bekerja sama dengan baik” (hasil wawancara dengan Ketua RT 013 di RW 08 Kelurahan Penggilingan, pada tanggal 18 Mei 2012).

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden di RT 03 RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dapat disimpulkan bahwa, responden (RTS-PM raskin) yang termasuk ke dalam kategori efektif merasa pemerintah telah melaksanakan pendistribusian raskin dengan baik. Beras miskin yang diterima setiap bulannya atau yang mendapat giliran 3/4 bulan kemudian diterima oleh warga walaupun tidak sesuai jadwal pendistribusian raskin. Masyarakat yang menjadi Pelaksana Distribusi Raskin telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan dibantu oleh ibu PKK di wilayah ini (kesimpulan dari hasil wawancara dengan responden di RT 03 RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur).

Pelaksana Distribusi Raskin yang menjabat sebagai Ketua RT 03 di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur menambahkan bahwa, pihak-pihak dari Kelurahan, Kecamatan maupun Walikota memang tidak mendampingi saat pendistribusian berlangsung, tetapi koordinasi dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada pihak Kelurahan tetap dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan pembagian raskin tetap berjalan dengan lancar setiap bulannya (pernyataan mengacu pada hasil wawancara kepada Ketua RT 03 RW 08 Kelurahan Penggilingan, pada tanggal 18 Mei 2012).

Melihat hasil kuisioner dan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden dan Ketua RT menyimpulkan 57 dari 70 responden merasa pelaksanaan/implementasi pendistribusian raskin telah berjalan secara efektif. Dalam buku *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi*

Kasus istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Winarno, 2011:148).

Di wilayah ini, masyarakat bekerja sama dengan baik dalam Program Raskin, hal itu ditandai dengan kerja sama antar Pelaksana Distribusi Raskin dengan Ibu PKK di wilayah ini. Di wilayah ini Pelaksana Distribusi Raskin telah diberikan kepercayaan penuh oleh pihak Kelurahan untuk melaksanakan pendistribusian raskin dengan keterbatasan yang ada, agar raskin menjadi tepat sasaran.

Pernyataan diatas ditegaskan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh salah staf bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Walikota Jakarta Timur yang menegaskan bahwa:

“sesuai hasil laporan yang diterima dari Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, bahwa di wilayah ini memang terjadi penugakan pembayaran raskin yang menyebabkan keterlambatan raskin untuk bulan berikutnya. Faktanya tidak hanya di wilayah Kelurahan Penggilingan saja, hampir setiap wilayah memiliki permasalahan yang sama yaitu pembayaran raskin, sehingga untuk permintaan raskin bulan berikutnya akan terhambat. Menurut saya pemerintah daerah khususnya telah melaksanakan pendistribusian raskin dengan baik, kalau ada yang menungak itu permasalahan dari masyarakatnya. Petugas/staf di Kelurahan pada umumnya hanya mendelegasikan pendistribusian raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di titik distribusi (Pengurus RW dan RT) yang telah ditunjuk oleh pihak-pihak Kelurahan untuk menjadi Pelaksana Distribusi Raskin dan bertanggungjawab atas pendistribusian raskin. Fungsi dari kelurahan hanya mengkoordinasikan raskin saat beras datang kepada Pelaksana Distribusi Raskin, saat pembayaran ke rekening Bulog, dan permintaan beras ke Kantor Walikota. Kesimpulannya pemerintah dan masyarakat telah bekerja sama sesuai fungsi tugasnya masing-masing” (hasil wawancara dengan Bapak Agung Eka Prasetyawan, pada 22 Mei 2012).

4.3.3 Dimensi Tepat Target

Tabel 4.18

Dimensi Tepat Target

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Efektif	33	44.0
Efektif	42	56.0
Total	75	100.0

(Sumber olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Data yang diperoleh pada tabel 4.18 mengenai dimensi “tepat target” telah dikategorikan oleh peneliti menjadi tidak efektif dan efektif. Pada tabel 4.18 menunjukkan 33 responden (44.0%) yang menjawab tidak efektif atau tidak tepat target dalam implementasi Program Raskin, sedangkan 42 responden (56.0%) menjawab efektif/sudah tepat target dalam implementasi Program Raskin. Data lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. Dari hasil yang diperoleh penenliti dapat disimpulkan bahwa dimensi ini dapat dikatakan sudah efektif di wilayah ini.

Peneliti memperoleh data diri responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin dan pekerjaan responden. Data tersebut dianalisis oleh peneliti dan dikaitkan dengan dimensi “tepat target” dalam implementasi kebijakan Program Raskin yang data lengkapnya mengacu pada lampiran 6. Data responden yang dianalisis pertama pada dimensi ini adalah responden terbanyak yang menjawab tidak efektif dalam ketepatan target pada implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat target”) berdasarkan usia yaitu berada pada kisaran usia 37-46 tahun dan 47-56 tahun. Disisi lain responden terbanyak yang menjawab efektif dalam ketepatan target pada implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat target”) berdasarkan usia yaitu berada pada kisaran usia 27-36 tahun dan 37-46 tahun. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.19
Dimensi Tepat Target Berdasarkan Usia

Usia	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
17-26	2	6.1%	5	11.9%	7	9.3%
27-36	9	27.3%	14	33.3%	23	30.7%
37-46	10	30.3%	14	33.3%	24	32.0%
47-56	10	30.3%	3	7.1%	13	17.3%
57-66	2	6.1%	6	14.3%	8	10.7%
Total	33	100%	42	100%	75	100%

(Sumber olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Data responden kedua yang dianalisis oleh peneliti adalah responden yang menjawab tidak efektif berdasarkan jenis kelamin dalam

ketepatan target pada implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat target”) yaitu responden yang berjenis kelamin perempuan menjawab tidak efektif sebesar 20 orang (60.6%) dan sisanya responden yang menjawab tidak efektif adalah responden laki-laki sebesar 13 orang (39.4%). Disamping itu responden yang menjawab efektif dalam ketepatan target pada implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat target”) berdasarkan jenis kelamin yaitu responden perempuan sebesar 26 orang (61.9%) dan sisanya responden yang menjawab efektif adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 16 orang (38.1%). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.20:

Tabel 4.20
Dimensi Tepat Target Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Laki-Laki	13	39.4%	16	38.1%	29	38.7%
Perempuan	20	60.6%	26	61.9%	46	61.3%
Total	33	100%	42	100%	75	100%

(Sumber olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Data responden ketiga yang dianalisis oleh peneliti adalah responden terbanyak yang menjawab tidak efektif dalam ketepatan target pada implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat target”) berdasarkan pekerjaan yaitu responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) sebesar 16 orang (48.5%), selain itu responden terbanyak yang menjawab efektif dalam ketepatan target pada implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat target”) berdasarkan pekerjaan yaitu responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) juga sebesar 16 orang (38.1%). Dari hasil uraian peneliti tersebut, maka dapat dilihat pada tabel 4.21:

Tabel 4.21
Dimensi Tepat Target Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Buruh	7	21.2%	3	7.1%	10	13.3%
Pengangguran	16	48.5%	16	38.1%	32	42.7%
Pedagang	4	12.1%	4	9.5%	8	10.7%
Pegawai Swasta	0	0%	1	2.4%	1	1.3%
Pembantu	1	3.0%	4	9.5%	5	6.7%
Petani	2	6.1%	5	11.9%	7	9.3%
Tukang Bangunan	0	0%	6	14.3%	6	8.0%
Tukang Sampah	3	9.1%	3	7.1%	6	8.0%
Total	33	100%	42	100%	75	100%

(Sumber olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Salah satu responden yang ada di RT 04 RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, bernama Ibu Suriyah menjelaskan tentang alasannya menilai tidak efektif dalam ketepatan target pada implementasi kebijakan Program Raskin (dimensi “tepat target”), ibu Suriyah mengatakan:

“raskin tidak diterima oleh orang-orang yang berhak, rumah-rumah yang dikategorikan berkeramik, bertembok, dan kalau dilihat bentuk rumahnya bagus dan sangat layak itu masih mendapatkan raskin. Menurut saya Program Raskin terkait dengan tujuan politik, mungkin kalau disini tidak ada tapi kalau didaerah rumah saudara saya yang di Bekasi ada, jadi beras miskin yang ia terima sebesar 15kg dengan harga Rp 1.600/kg tidak dikenakan biaya operasional oleh Pelaksana Distribusi Raskin seperti biaya angkut, biaya kuli dan biaya plastik dll ditanggung pemerintah daerah, karena wakil walikota didaerah tersebut ingin mencalonkan diri sebagai walikota. Menurut saya Program OPK (Operasi Pasar Khusus) lebih baik di bandingkan Program Raskin karena Program OPK berasnya mudah didapatkannya dan lebih pasti siapa saja dapat membelinya karena hanya datang kepasar-pasar tradisional dan tidak perlu dicatat oleh Badan pusat Statistik (BPS) untuk mendata siapa-siapa saja yang miskin seperti Program Raskin” (hasil wawancara dengan Ibu Suriyah pada tanggal 18 Mei 2012).

Hasil wawancara kepada Bapak Arpan Dadi selaku Sekretaris RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Bapak Arpan Dadi mengatakan bahwa:

“Raskin diterima oleh orang-orang yang berhak, rumah yang berkeramik, bertembok, dan layak tidak bisa dijadikan acuan untuk tidak mendapatkan raskin. Di wilayah saya ada 1 keluarga yang orangtuanya pensiunan BI (Bank Indonesia) memiliki rumah yang bagus, tapi itu tidak menjamin anak-anaknya hidup dalam kecukupan, pada kenyataannya keluarga tersebut merasa kesulitan untuk makan sehari-hari. Pengurus RW telah melakukan musyawarah untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan menerima raskin yang mengacu pada data PPLS-08. Menurut saya Program Raskin tidak terkait dengan tujuan politik, tidak tahu ya kalau di daerah lain, tapi di wilayah saya tidak terkait dengan tujuan politik meskipun saya sendiri sebagai pengurus RW yang ikut dalam organisasi politik (partai Golkar), saya memisahkan urusan-urusan partai saya dengan urusan warga disini. Program Raskin yang ada di wilayah RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur sangat cocok dengan kondisi lingkungan dan masyarakatnya, karena masyarakat disini termasuk kedalam masyarakat miskin bahkan sangat miskin, lingkungannya pun kumuh-kumuh disini. Jadi saya mendukung Program Raskin tetap dilangsungkan di wilayah saya, untuk membantu keluarga-keluarga miskin yang ada disini. Dan menurut saya Program Raskin lebih baik dari pada Program OPK, karena Program Raskin lebih tepat sasaran hanya warga-warga tertentu yang bisa mendapatkan raskin, karena kita memiliki catatan warga-warga yang miskin yang disesuaikan dengan data dari BPS”.

Berdasarkan Hasil kuisisioner dan hasil wawancara yang diperoleh dari responden yang ada di RT 04 RW 08 dan Sekretaris RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur menunjukkan bahwa 42 responden menjawab raskin sudah sesuai target. Beras miskin diterima oleh orang-orang yang berhak, rumah yang berkeramik, bertembok atau yang dapat dikategorikan baik tidak dapat dijadikan acuan bahwa orang tersebut bukan orang miskin. Hal ini jauh berbeda dengan program sebelumnya yang kita kenal sebagai Program Operasi Pasar Khusus (OPK). Dalam program tersebut siapa saja dapat membeli beras, tidak ada acuan masyarakat seperti apa yang dapat membeli beras bersubsidi tersebut. Beberapa responden lebih menyukai Program Operasi Pasar Khusus dari pada Program Raskin, karena masyarakat diberi kemudahan untuk mendapatkan beras. Menurut responden dan pengurus RW 08, Program Raskin di wilayah ini tidak terkait dengan tujuan politik walaupun pengurus RW 08 merupakan salah satu anggota partai politik.

Dengan melihat kondisi masyarakat dan lingkungan yang ada di wilayah RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dapat disimpulkan bahwa Program Raskin memang cocok dengan keadaan

masyarakat di wilayah tersebut yang memiliki karakter masyarakat miskin dan didukung dengan lingkungan/pemukiman yang kumuh. Secara keseluruhan responden dan para Pengurus RW (Pelaksana Distribusi Raskin) mendukung Program Raskin untuk tetap terus dijalankan, karena di wilayah ini masyarakat miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan adanya bantuan beras miskin, masyarakat miskin merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Berikut pernyataan dari salah satu staf bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Walikota Jakarta Timur yang menegaskan hasil yang diperoleh peneliti. Bapak Agung Eka Prasetyawan selaku staf bagian Kesejahteraan Masyarakat Kantor Walikota Jakarta Timur mengatakan:

“pemerintah pada tahun 2010 memiliki keterbatasan data untuk menentukan jumlah RTS-PM, maka pihak kelurahan memberi kepercayaan kepada pengurus RW untuk mendiskusikan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan raskin. Menurut saya Program Raskin tidak terkait dengan tujuan politik, Program Raskin merupakan program murni dari pemerintah yang tidak memiliki intervensi dari bidang politik. Tujuan pemerintah dalam kebijakan pengentasan kemiskinan adalah mensejahterakan masyarakat, ini sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera dan juga sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI yaitu Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, Maju, Mandiri dan Bermartabat. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 10 besar Negara berkembang di dunia dengan jumlah orang yang hidup di bawah tingkat kemiskinan mencapai 13.33% dari total populasi (Central Intelligence Agency, 2010), maka pemerintah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung kepada penduduk miskin, dengan harapan program-program yang diluncurkan dapat membantu masyarakat miskin. Di wilayah Kelurahan Penggilingan merupakan salah satu wilayah termiskin yang ada di Jakarta Timur, maka dengan kondisi masyarakat yang demikian, Program Raskin sangat cocok di wilayah ini. Program Operasi Pasar Khusus yang berubah nama pada tahun 2002 menjadi Program Raskin merupakan program yang memiliki tujuan kearah yang lebih baik dengan mempertajam sasaran penerima manfaat beras miskin” (hasil wawancara dengan Bapak Agung Eka Prasetyawan, pada tanggal 22 Mei 2012).

4.3.4 Dimensi Tepat Lingkungan

Tabel 4.22
Dimensi Tepat Lingkungan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Efektif	36	48.0
Efektif	39	52.0
Total	75	100.0

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi “tepat lingkungan” yang sebagaimana terlampir dalam lampiran 5 dan diringkas oleh peneliti menjadi tabel 4.22. Sebelumnya peneliti telah mengkategorikan tidak efektif dan efektif untuk mempermudah menginterpretasikan hasil data penelitian dalam mengukur efektivitas implementasi Program Raskin. Dari hasil ringkasan yang terdapat pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa 36 responden (48.0%) menjawab implementasi Program Raskin tidak efektif/tidak tepat lingkungan dan 39 responden (52.0%) menjawab implementasi Program Raskin sudah efektif/sudah tepat lingkungan. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi “tepat lingkungan” dapat dikatakan sudah efektif di wilayah ini.

Jika dilihat dari hasil jawaban responden berdasarkan data diri responden (demografi responden) yang hasil data statistik lengkapnya terlampir dalam lampiran 6, menunjukkan responden yang menilai implementasi Program Raskin tidak tepat lingkungan (tidak efektif dalam dimensi “tepat lingkungan”) berada pada kisaran usia 27-36 tahun dan 37-46 tahun. Responden yang menilai implementasi Program Raskin sudah tepat lingkungan (efektif dalam dimensi “tepat lingkungan”) berada pada kisaran usia 37-46 tahun. Berikut hasil data responden berdasarkan usia yang telah diringkas oleh peneliti yang dikategorikan efektif dan tidak efektif pada dimensi “tepat lingkungan” dapat dilihat pada tabel 4.23:

Tabel 4.23
Dimensi Tepat Lingkungan Berdasarkan Usia

Usia	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
17-26	3	8.3%	4	10.3%	7	9.3%
27-36	11	30.6%	12	30.8%	23	30.7%
37-46	11	30.6%	13	33.3%	24	32.0%
47-56	8	22.2%	5	12.8%	13	17.3%
57-66	3	8.3%	5	12.8%	8	10.7%
Total	36	100%	39	100%	75	100%

(Sumber: Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Hasil data responden yang diperoleh peneliti pada dimensi “tepat lingkungan” berdasarkan jenis kelamin yaitu responden terbanyak yang menilai implementasi Program Raskin tidak tepat lingkungan (tidak efektif dalam dimensi “tepat lingkungan”) adalah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang (55.6%) dan responden terbanyak yang menilai implementasi Program Raskin sudah tepat lingkungan (efektif dalam dimensi “tepat lingkungan”) adalah responden berjenis kelamin perempuan juga sebanyak 26 orang (66.7%). Dapat dilihat pada tabel 4.24:

Tabel 4.24
Dimensi Tepat Lingkungan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Laki-Laki	16	44.4%	13	33.3%	29	38.7%
Perempuan	20	55.6%	26	66.7%	46	61.3%
Total	36	100%	39	100%	75	100%

(Sumber: Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Disisi lain, hasil data diri responden yang diperoleh peneliti pada dimensi “tepat lingkungan” berdasarkan bidang pekerjaan responden yaitu responden terbanyak yang menilai implementasi Program Raskin tidak tepat lingkungan (tidak efektif dalam dimensi “tepat lingkungan”) adalah responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) sedangkan responden terbanyak yang menilai implementasi Program Raskin sudah tepat lingkungan (efektif dalam dimensi “tepat lingkungan”) adalah

responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) juga. Hasil uraian peneliti tersebut, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.25
Dimensi Tepat Lingkungan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Buruh	5	13.9%	5	12.8%	10	13.3%
Pengangguran	12	33.3%	20	51.3%	32	42.7%
Pedagang	6	16.7%	2	5.1%	8	10.7%
Pegawai Swasta	1	2.8%	0	0%	1	1.3%
Pembantu	2	5.6%	3	7.7%	5	6.7%
Petani	3	8.3%	4	10.3%	7	9.3%
Tukang Bangunan	4	11.1%	2	5.1%	6	8.0%
Tukang Sampah	3	8.3%	3	7.7%	6	8.0%
Total	36	100%	39	100%	75	100%

(Sumber: Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua RT 03 RW 08 Kelurahan Penggilingan menyimpulkan bahwa pendapat responden yang mengatakan implementasi Program Raskin tidak efektif adalah karena mereka merasa kurang adanya koordinasi yang baik antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dari data yang dipakai pada tahun 2010 adalah hasil pendataan BPS pada tahun 2008. Pada tahun 2010 masyarakat yang terdaftar/terdata sebagai penerima raskin(RTS-PM) tidak mewakili seluruh masyarakat miskin diwilayah RW 08, sehingga Pengurus RW mengambil kebijakan untuk membagi rata beras miskin kepada masyarakat kurang mampu yang ada diwilayah tersebut. Perlu pemerintah sadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis, sehingga diperlukan data yang terus diperbaharui. Dengan data yang baru, masyarakat miskin akan terjaring menjadi RTS-PM raskin.

Bapak Ketua RT 03 juga menyimpulkan alasan responden berpendapat tidak efektif dalam dimensi ini, yaitu karena pada tahun 2010

beras miskin yang diterima oleh masyarakat tidak sebesar 15kg dan harga jual yang ditetapkan tidak sebesar Rp 1.600/kg. Beras yang dibeli dari Pelaksana Distribusi Raskin di wilayah ini sebesar Rp10.000 dengan mendapatkan 5 liter beras. Dengan harga sebesar Rp10.000 untuk 5 liter masih ada masyarakat yang menghutang dan dibayarkan pada bulan berikutnya, sehingga raskin bulan berikutnya menjadi terlambat. Pada tahun 2010 beras yang diterima beberapa warga berwarna kuning dan berbatu, tetapi kejadian tersebut tidak setiap bulan terjadi (kesimpulan hasil wawancara kepada Ketua RT 03 RW 08 Kelurahan Penggilingan, pada tanggal 18 Mei 2012).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris RW 08, Bapak Arpan Dadi memberi penjelasan bagi masyarakat yang menganggap dimensi ini efektif. Masyarakat menganggap dengan adanya kebijakan yang telah disepakati oleh pengurus RW, maka masyarakat yang tidak terdaftar oleh BPS sebagai RTS-PM merasa terbantu. Menurut masyarakat penerima raskin yang terpenting keluarganya bisa mendapatkan beras. Hal itu juga tidak terlepas dari upaya Ketua RT untuk menutupi penunggakan pembayaran raskin, sehingga beras dapat diterima oleh masyarakat setiap bulannya atau masyarakat yang mendapatkan giliran 3/4 bulan kemudian.

Beberapa masyarakat memahami alasan pengurus RW membagikan jumlah beras dan menetapkan harga beras yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah beras dan jumlah penduduk tidak sesuai, maka Pelaksana Distribusi Raskin membagi rata (5 liter) bagi setiap masyarakat miskin agar semua masyarakat miskin dapat menikmati raskin dan harga beras ditetapkan di wilayah ini memang lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan pemerintah dikarenakan untuk membiayai biaya angkut beras, biaya kuli beras dan biaya plastik. Beras yang diterima oleh warga setiap bulan ataupun masyarakat yang mendapat giliran 3/4 bulan kemudian berada pada kondisi beras yang baik, tidak berketu maupun berbau masih layak untuk di konsumsi oleh warga (kesimpulan hasil wawancara dengan Bapak Arpan Dadi, pada tanggal 18 Mei 2012).

Dilihat dari hasil yang diperoleh peneliti berdasarkan kuisioner dan wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua RT 03 RW 08, dan Sekretaris RW 08 menyimpulkan bahwa lebih banyak responden yang mempersepsikan pendistribusian raskin sudah tepat lingkungan, perbedaannya hanya sedikit yaitu 3 responden. Pada kenyataannya Program Raskin pada tahun 2010 memang memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya, sehingga para pengurus RW membuat kebijakan dilingkungannya agar masyarakat yang merasa sebagai masyarakat miskin dan tidak terdata oleh BPS pada tahun 2008 tetap dapat menikmati Program Raskin yang dibuat oleh pemerintah (RTS-PM raskin). Pengurus RW 08 menginginkan pemerataan bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar tidak ada kecemburuan sosial dilingkungan tersebut, tetapi pada kenyataan tidak semua masyarakat miskin mengetahui dan memahami tujuan dari kebijakan yang telah dibuat oleh para Pengurus RW.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu staf bagian Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Kelurahan Penggilingan untuk menambah hasil dari penelitian ini. Staf Kesmas menjelaskan tentang interaksi antara perumus kebijakan, pelaksana kebijakan serta lembaga-lembaga lain yang terkait yang berpedoman pada Buku Pedoman Raskin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Tim Koordinasi Raskin dibagi atas 3 tim yaitu Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan. Setiap Tim Koordinasi Raskin baik pusat maupun daerah memiliki tupoksi tim masing-masing.

Tim Koordinasi Raskin Pusat bertugas mengendalikan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi ke Tim Koordinasi Raskin di Provinsi, melakukan monitoring dan evaluasi melalui laporan tahunan yang disusun oleh Tim Koordinasi Raskin di Provinsi. Tim Koordinasi Raskin Provinsi bertugas melakukan koordinasi perencanaan dan anggaran Program Raskin di Provinsi, menetapkan pagu raskin Kabupaten/Kota, sosialisasi ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, pelaksanaan

distribusi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten memiliki tugas menetapkan pagu Kecamatan, sosialisasi Program Raskin di Kecamatan, pelaksana distribusi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di Kecamatan. Tim Koordinasi Raskin kecamatan melakukan koordinasi Program Raskin ditingkat Kelurahan, merencanakan distribusi raskin di Kecamatan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian raskin di Kelurahan. Pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima pembayaran beras dari pelaksana Distribusi Raskin serta menyelesaikan administrasi.

Dalam pelaksanaan Program Raskin banyak instansi-instansi yang terkait baik ditingkat Pusat maupun daerah. Ditingkat pusat terdiri dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, BPKP, dan Perum Bulog. Ditingkat daerah terdiri dari Sekretariat Provinsi, Sekretaris daerah, Sekretariat Kecamatan, Bappeda, Dinas Sosial, BPS ditingkat provinsi dan Kabupaten, Kantor Perwakilan BPKP, Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan, Koordinator Statistik kecamatan, Bulog Divisi Regional, serta Satker Raskin.

Lembaga-lembaga yang terkait yang telah disebutkan merupakan lembaga yang termasuk dalam Tim Koordinasi Raskin baik pusat maupun daerah. Koordinasi dan interaksi yang baik telah dilakukan antar Tim Koordinasi Raskin dengan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan Program Raskin menjadi efektif (Hasil kesimpulan wawancara dengan staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Penggilingan, pada tanggal 23 Mei 2012) .

Staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Penggilingan juga menjelaskan tentang pelaksanaan indikator kinerja Program Raskin, yang dijadikan sub indikator (*public opinion*) oleh peneliti. Staf Bagian Kesmas mengatakan:

“pada tahun 2010, kita masih menggunakan data PPLS-08 dari BPS. Pada tahun tersebut Menkokesra belum memberikan surat edaran untuk

menggunakan data terbaru tentang RTS-PM yang dimiliki oleh BPS. Ketentuan penggunaan data RTS-PM diatur oleh Menkokesra (pemerintah pusat), sedangkan pemerintah daerah tidak dapat mengambil keputusan sendiri untuk menggunakan data RTS-PM. Pada tahun 2010 data RTS-PM yang dipakai adalah jumlah RTS-PM tahun 2008, sehingga beras miskin yang masyarakat miskin terima setiap bulannya dari Bulog sama dengan tahun sebelumnya tidak ada perubahan, makanya ada kebijakan dari pengurus RW yang bertujuan menyamaratakan penduduk miskin yang terdata maupun masyarakat miskin yang tidak terdata untuk tetap mendapatkan raskin (RTS-PM raskin). Dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pengurus RW masing-masing warga menerima beras dan harga yang telah disesuaikan dengan kebijakan tersebut. Pada kenyataannya tidak banyak yang mengetahui ketentuan pendistribusian raskin ini seperti jumlah dan harga beras, maka untuk masyarakat yang tidak memahami maka akan mempersepsikan pendistribusian raskin berjalan dengan tidak efektif” (Hasil wawancara dengan Staf Kesmas Kelurahan Penggilingan, pada tanggal 23 Mei 2012).

4.3.5 Dimensi Tepat Proses

Tabel 4.26

Dimensi Tepat Proses

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Efektif	10	13.3
Efektif	65	86.7
Total	75	100.0

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Pada tabel 4.26 diatas mengenai dimensi “tepat proses” yang telah peneliti kategorikan menjadi tidak efektif dan efektif untuk melihat efektivitas implementasi Program Raskin yang terlampir secara lengkap dalam lampiran 5 dan diringkas oleh peneliti menjadi tabel 4.26. Tabel 4.26 menyimpulkan bahwa terdapat 10 responden (13.3%) yang menjawab dimensi ini tidak efektif, dan 65 responden (86.7%) yang menjawab dimensi ini efektif. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi “tepat proses” dapat dikatakan sudah efektif di wilayah ini.

Data diri responden yang berhasil diperoleh dan dapat dianalisis oleh peneliti meliputi umur responden, jenis kelamin, dan pekerjaan responden yang terlampir secara lengkap hasil perhitungan statistiknya dalam lampiran 6. Berdasarkan umur responden diperoleh bahwa responden terbanyak yang berpendapat tidak efektif dalam proses implementasi Program Raskin

berada kisaran usia 47-56 tahun dan responden terbanyak yang berpendapat sudah efektif dalam proses implementasi Program Raskin berada kisaran usia 37-46 tahun. Berikut data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.27
Dimensi Tepat Proses Berdasarkan Usia

Usia	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
17-26	0	0%	7	10.8%	7	9.3%
27-36	3	30.0%	20	30.8%	23	30.7%
37-46	1	10.0%	23	35.4%	24	32.0%
47-56	6	60.0%	7	10.8%	13	17.3%
57-66	0	0%	8	12.3%	8	10.7%
Total	10	100%	65	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Berdasarkan jenis kelamin responden diperoleh bahwa responden yang berpendapat tidak efektif dalam proses implementasi Program Raskin yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang (100%) dan responden yang berjenis kelamin laki-laki tidak berpendapat tidak efektif dalam proses implementasi Program Raskin (0%). Disamping itu, responden yang berpendapat sudah efektif dalam proses implementasi Program Raskin yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (55.4%) dan sisanya responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 orang (44.6%). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.28:

Tabel 4.28
Dimensi Tepat Proses Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Laki-Laki	0	0%	29	44.6%	29	38.7%
Perempuan	10	100%	36	55.4%	46	61.3%
Total	10	100%	65	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Hasil data diri responden yang terakhir, yaitu berdasarkan bidang pekerjaan responden. Responden terbanyak yang berpendapat tidak efektif dalam proses implementasi Program Raskin adalah responden yang tidak

memiliki pekerjaan (pengangguran) sebanyak 5 orang (50.0%) sedangkan responden terbanyak yang berpendapat efektif dalam proses implementasi Program Raskin adalah responden yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) juga sebesar 27 orang (41.5%). Dari analisis peneliti, data dapat dilihat pada tabel 4.29:

Tabel 4.29

Dimensi Tepat Proses Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Tidak Efektif		Efektif		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Buruh	0	0%	10	15.4%	10	13.3%
Pengangguran	5	50.0%	27	41.5%	32	42.7%
Pedagang	3	30.0%	5	7.7%	8	10.7%
Pegawai Swasta	0	0%	1	1.5%	1	1.3%
Pembantu	0	0%	5	7.7%	5	6.7%
Petani	0	0%	7	10.8%	7	9.3%
Tukang Bangunan	0	0%	6	9.2%	6	8.0%
Tukang Sampah	2	20.0%	4	6.2%	6	8.0%
Total	10	100%	65	100%	75	100%

(Sumber Hasil olahan data penelitian pada bulan Juni 2012)

Menurut responden di RT 03 RW 08 yang merasa tidak efektif pada dimensi ini menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat tidak mengerti tujuan dari Program Raskin. RTS-PM raskin hanya mengerti bagaimana cara mendapatkan beras miskin (raskin). Menurut beberapa responden yang mendapatkan raskin tidak setiap bulan dan tidak memahami kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus RW akan menganggap pemerintah tidak bekerja dengan baik dalam Program Raskin (hasil kesimpulan dari wawancara kepada responden di RT 03, pada tanggal 18 Mei 2012).

Disamping itu, menurut responden di RT 04 RW 08 yang merasa efektif pada dimensi ini menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat mengerti tujuan dari Program Raskin yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi tingkat kelaparan. Menurut beberapa warga

yang menerima beras miskin setiap bulan, pemerintah telah berusaha bekerja dengan baik dalam Program Raskin ini, hal itu dibuktikan pemerintah telah mengupayakan masyarakat yang benar-benar miskin untuk mendapatkan raskin setiap bulan. Masyarakat yang ada di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur secara keseluruhan bersedia berpartisipasi dalam Program Raskin (hasil kesimpulan dari wawancara kepada responden di RT 04, pada tanggal 18 Mei 2012).

Kesimpulan dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden yang ada di RT 03 dan RT 04 pada RW 08 Kelurahan Penggilingan yaitu masyarakat miskin yang mengetahui tujuan Program Raskin lebih banyak dari pada masyarakat miskin yang tidak mengetahui tujuan Program Raskin. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat miskin tidak mengetahui tujuan Program Raskin berawal dari pendidikan masyarakat di wilayah tersebut, berdasarkan diskusi yang dilakukan peneliti terhadap responden terdapat beberapa masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis.

Beberapa RTS-PM raskin yang menjadi responden menilai kinerja pemerintah sudah baik dan ada juga beberapa responden yang menilai kinerja pemerintah belum baik, alasan responden yang dapat disimpulkan yaitu masyarakat miskin yang tidak memahami tentang kebijakan yang dibuat oleh Pengurus RW akan cenderung mempersepsikan bahwa Program Raskin tidak efektif sehingga menilai kinerja pemerintah belum baik, sedangkan untuk masyarakat yang memahami kebijakan tersebut cenderung mempersepsikan keterbatasan yang ada tidak menjadikan Program Raskin menjadi tidak efektif sehingga masyarakat menilai kinerja pemerintah sudah baik. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Pemerintah Daerah khususnya sudah bekerja dengan baik. Pada wilayah ini masyarakat miskin bersedia untuk berpartisipasi dalam Program Raskin ini, karena menurut warga raskin yang diterima merupakan bentuk bantuan dalam bentuk subsidi beras yang harus direspon dengan baik.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu staf bagian Kesejahteraan Masyarakat di Kantor Walikota Jakarta Timur untuk

menambahkan informasi dan menguatkan data yang diperoleh oleh peneliti.

Staf bagian Kesmas tersebut mengatakan:

“kebijakan raskin merupakan bantuan dari pemerintah dalam bentuk subsidi, karena pemerintah melihat kemampuan daya beli masyarakat kalangan bawah sangat lemah, maka pemerintah berharap dengan raskin masyarakat kalangan bawah ini dapat membeli beras murah untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya agar dapat mempertahankan hidup. Pemerintah sadar bahwa tugas pengentasan kemiskinan ini ada dipundak mereka, maka pemerintah selalu memberikan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Para birokrat yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait raskin telah siap untuk bekerja dengan baik dalam program ini. Pada kenyataannya memang masih banyak masalah yang timbul pada tahun 2010 kemarin, masalah-masalah yang biasa sering dihadapi pada tahun 2010 adalah dititik distribusi. Pada tahun 2012 ini baru diresmikan bahwa Program Raskin akan menggunakan data basis data terpadu hasil PPLS tahun 2011 dari TNP2K. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan tim yang dicanangkan oleh wakil presiden, berbekal Perpres No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemerintah berpikir beras merupakan komponen terbesar yang mempengaruhi garis kemiskinan, bobotnya hampir mencapai 30% dalam garis kemiskinan, jadi sedikit saja ada kenaikan diharga beras maka garis kemiskinan akan berubah. Pada tahun 2010 TNP2K belum menunjukkan keeksistensiannya karena dasar hukumnya baru dibentuk pada tahun 2010” (hasil wawancara dengan Bapak Agung Eka Prasetyawan, pada tanggal 22 Mei 2012).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi Program Raskin yang efektif merupakan gambaran sejauh mana pemerintah telah melaksanakan kebijakan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Efektivitas kebijakan Program Raskin pada penelitian ini dilihat dari teori “lima tepat” keefektifan implementasi kebijakan yang terdapat pada buku Riant Nugroho dengan judul *Public Policy*.

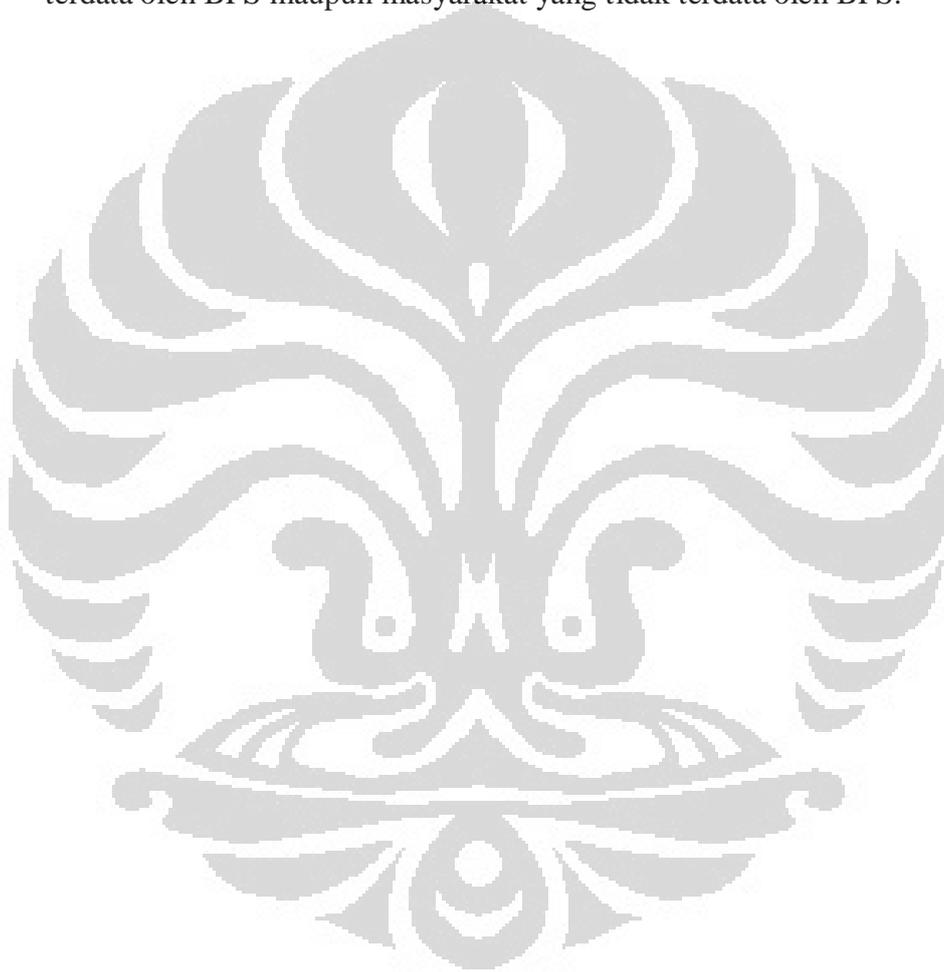
Dari data yang diperoleh, peneliti memberi kesimpulan bahwa 39 responden (52.0%) setuju Program Raskin pada tahun 2010 telah diimplementasikan dengan efektif, sedangkan sisanya 36 responden (48.0%) tidak setuju bahwa Program Raskin pada tahun 2010 telah diimplementasikan dengan efektif. Responden yang setuju dengan Program Raskin telah diimplementasi secara efektif menganggap keterbatasan dalam pendistribusian raskin bukanlah suatu masalah, namun sebagian masyarakat yang melihat keterbatasan pendistribusian raskin sebagai suatu masalah menganggap bahwa Program Raskin belum diimplementasikan secara tepat.

5.2 Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang peneliti tawarkan berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah :

- a) Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan RTS-PM seluruh Indonesia, sebaiknya kewenangan tersebut dilimpahkan ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan jumlah RTS-PM diwilayahnya karena yang mengetahui permasalahan-permasalahan secara rinci adalah pemerintah daerah tersebut. Apabila pemerintah daerah memiliki kewenangan/kekuasaan yang besar untuk menentukan jumlah RTS-PM pastinya pemerintah daerah dapat menentukan jumlah beras yang sesuai dengan kebutuhan diwilayahnya.

- b) Setiap warga yang ada di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang terdaftar sebagai penerima raskin, sebaiknya disosialisasikan aturan dari indikator kinerja raskin yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima alasan Pengurus RW membuat kebijakan untuk menyamaratakan penerimaan raskin bagi masyarakat miskin yang terdata oleh BPS maupun masyarakat yang tidak terdata oleh BPS.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Birkland, Thomas A. 2001. *Policy Process*. London : M.E Sharpe.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: format-format kuantitatif & kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- _____. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Prenada Media.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design, Quantitative & Qualitative Approaches*. London. Sage Publication.
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ghozali, I., 2004. *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 5.0*. Semarang : BP Universitas Diponegoro.
- Handyaningrat, Soewarno. 1995. *Azas-Azas Organisasi Manajemen*. Jakarta : Mas Agung
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Gava Media.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Dia Fisip UI.
- Kerlinger, F.N. & Lee, H.B. 2000. *Foundations of Behavioral Research (4th Ed.)*. Fort Worth: Harcourt College Publishers.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Lembaga Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama.
- Malhotra. 2005. *Riset Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moore, Nick. 1995. *Cara Meneliti*. Bandung : ITB.

- Nasution, Mustafa Edwin dan Hardius Usman. 2007. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Neuman, W Lawrence. 2003. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. 4th Edition. London : Allyn and Bacon.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Edisi Pertama. Cetakan Keempat. Jakarta : Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Priyanto, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Jakarta: Mediakom.
- Rudy, Teuku May. 1993. *Masalah Negara Berkembang*. Bandung : Bina Budhaya.
- Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Rineka Cipta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kesembilan. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan, Budi Santosa dan Mohammad Maiwan. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta : Impac.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus Implementasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : CAPS

Skripsi/Tesis/Jurnal/ Penelitian Lain :

Assad, Muhammad. 2007. *Efektivitas Pelaksanaan Raskin di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang*, jurnal.

Musawa, Mariyam. 2009. *Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Gajahmungkur kota Semarang*. Tesis, Universitas Diponegoro.

Sari, Yanita. 2007. *Analisis Efektivitas & Efisiensi Distribusi Raskin di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatra Utara*. Skripsi, Universitas Sumatra Utara.

SUMBER LAIN

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010*. Jakarta.

BPS Provinsi DKI Jakarta. (2011). *Jakarta Dalam Angka 2011*. Jakarta.

Bulog. (2010). *Alur Distribusi RASKIN*. 18 Mei 2012. <http://www.bulog.co.id>

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.(21 September 2007). *Kependudukan*. 6 Juni 2012. <http://menteri.depakertrans.go.id>.

Gubernur DKI Jakarta. (2010). *LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010*. Jakarta.

Kantor Walikota Jakarta Timur. *Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2010*.

Republik Indonesia Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (6 Januari 2010). *Menko Kesra Meluncurkan Program Raskin 2010*. 1 Mei 2012. <http://www.menkokesra.go.id>

Republik Indonesia Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (18 Maret 2010). *Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010*. 1 Mei 2012. <http://data.menkokesra.go.id>

Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. *Pedoman Umum Raskin 2010*.

Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. *Pedoman Umum Raskin 2011*.

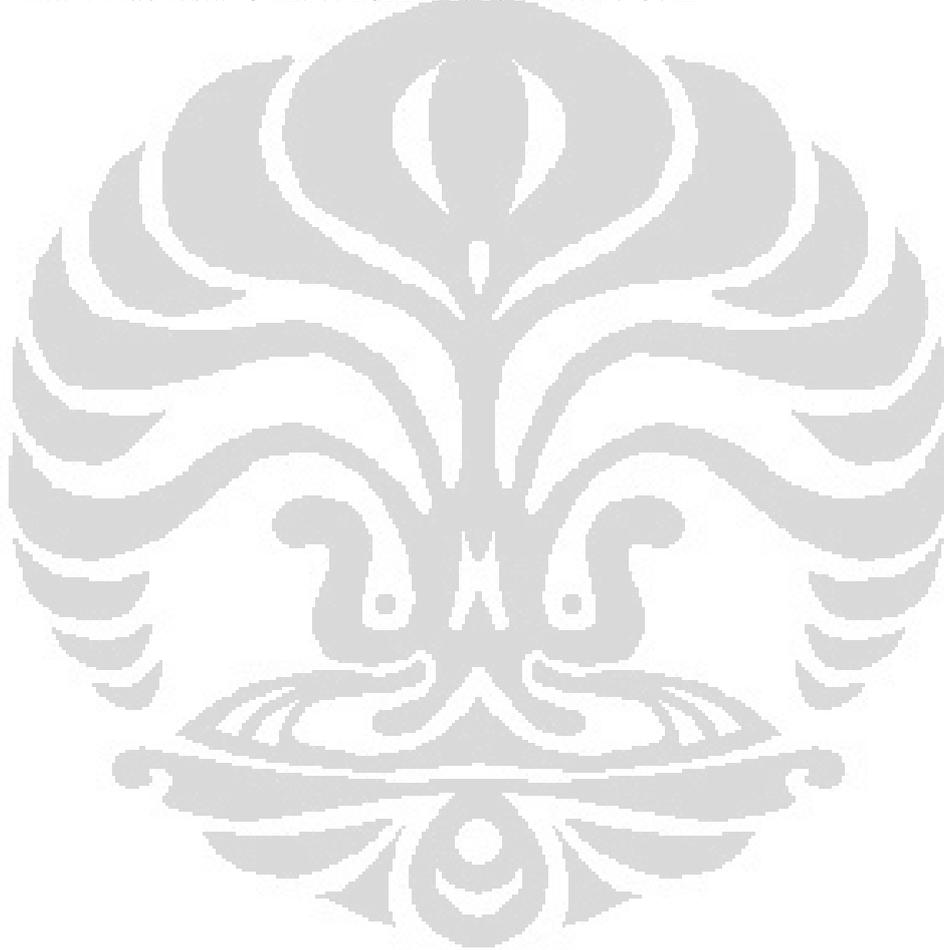
Republik Indonesia Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. *Visi dan Misi Kemenko Kesra*. 1 Mei 2012. <http://www.menkokesra.go.id>

Republik Indonesia Kementerian Sosial. (2008). *PPLS-08*. 28 Juni 2012.
<http://database.depsos.go.id/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. (2011). *Jakarta Timur Situs Resmi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur*. 28 Juni 2012.
<http://timur.jakarta.go.id>.

Poskota. (26 Februari 2010). *Jatah Raskin Harus Tepat Sasaran*. 1 Mei 2012.
<http://poskota.co.id>

Sutjahjo, Surjono H. (21 September 2011). *Utang dan Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia*. 8 maret 2012. MetroTVNews.Com.



Lampiran 1

Kuisisioner Penelitian Skripsi
Efektivitas Kebijakan Program Raskin
(Studi RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur)

DATADIRI (* lingkari salah satu)

Usia : tahun

Jenis Kelamin* : a. Laki laki b. Perempuan

Pekerjaan :

Alamat :
.....
.....

Nomor telepon yang dapat dihubungi (jika tersedia):

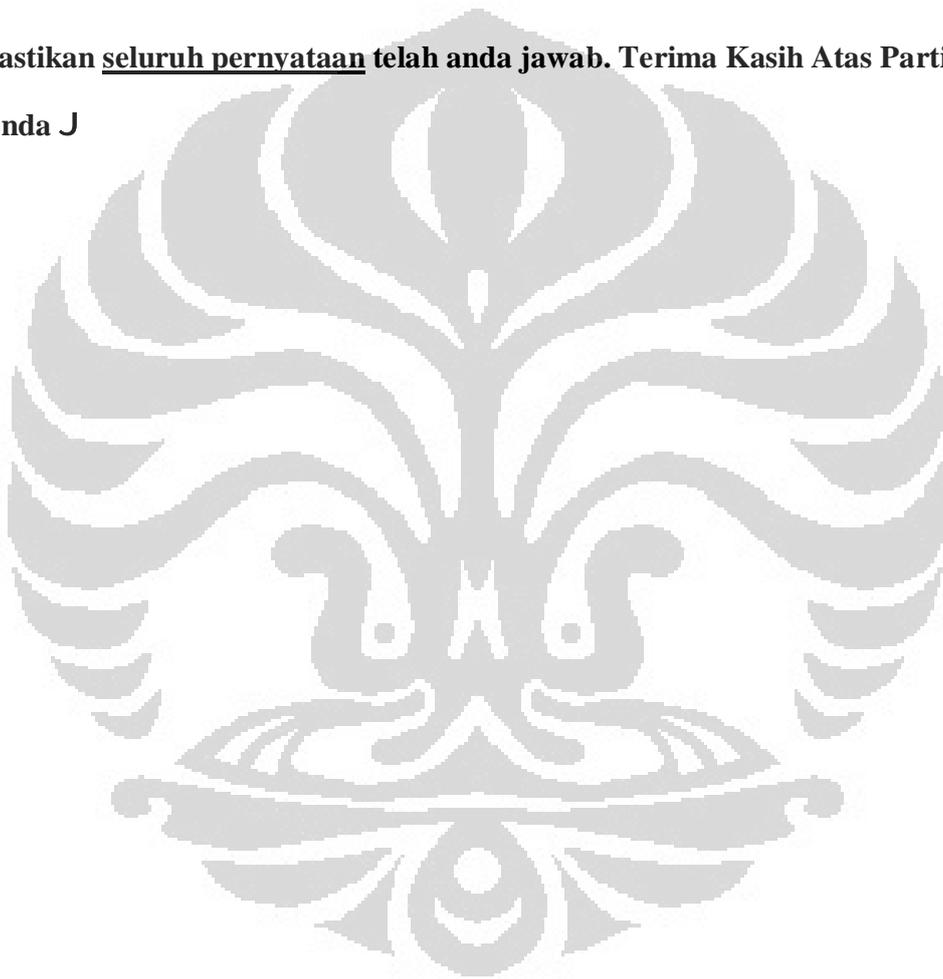
Sebelum melanjutkan ke bagian satu, pastikan seluruh data diri sudah anda lengkapi.

No.	Item	STS	TS	S	SS
1.	Raskin telah memenuhi kebutuhan pokok keluarga saya				
2.	Membeli raskin menghemat pengeluaran belanja rumah tangga saya				
3.	Mengonsumsi raskin mengurangi tingkat kelaparan penduduk miskin				
4.	Program Raskin mengurangi tingkat kemiskinan				
5.	Pemerintah melakukan pendistribusian raskin dengan baik				
6.	Masyarakat itu serta dalam pendistribusian raskin				
7.	Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dalam pendistribusian raskin				
8.	Raskin diterima oleh orang-orang yang berhak				
9.	Program Raskin terkait dengan tujuan politik				
10.	Program Raskin cocok dengan kondisi lingkungan saya saat ini				
11.	Saya mendukung Program Raskin				
12.	Program Raskin lebih baik dibanding Program Operasi Pasar Khusus				
13.	Pendistribusian raskin diwilayah saya berjalan dengan lancar				
14.	Masyarakat yang menerima raskin merupakan orang-orang yang terdata sebagai penerima raskin				
15.	Saya menerima raskin sebesar 15kg/bulan				
16.	Saya membayar raskin sebesar Rp 1.600/kg				
17.	Saya menerima raskin tepat waktu				
18.	Saya membayar raskin tepat waktu				

19.	Beras yang saya terima dalam kondisi baik				
20.	Saya mengetahui tujuan Program Raskin				
21.	Pemerintah sudah bekerja dengan baik dalam Program Raskin				
22.	Saya bersedia ikut dalam Program Raskin				

Pastikan seluruh pernyataan telah anda jawab. Terima Kasih Atas Partisipasi

Anda J



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Menurut anda apakah Program Raskin ini memuat hal-hal yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ?
2. Program Raskin dirumuskan sesuai dengan karakter masalah kemiskinan yang hendak dipecahkan ?
3. Program Raskin ini dibuat oleh lembaga-lembaga yang memiliki misi kelembagaan yang bertujuan memecahkan permasalahan kemiskinan ?
4. Pemerintah dan masyarakat ikut bekerja sama dalam pendistribusian raskin
5. Apakah raskin diterima oleh orang-orang yang berhak ?
6. Program Raskin terkait dengan tujuan politik ?
7. Menurut anda Program Raskin lebih baik dari pada Program OPK ?
8. Bagaimana Koordinasi yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan agar pendistribusian raskin berjalan lancar?
9. Pemerintah memahami dan menerima program raskin sebagai tugas yang harus dilaksanakan?
10. Para Birokrat pelaksana siap untuk menjadi pelaksana program raskin ini ?

Lampiran 3

TABEL HASIL REALIBITAS & VALIDITAS**Dimensi Tepat Kebijakannya****✓ Realibilitas****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.881	.882	4

✓ Validitas**KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.744
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	68.501
	Df
	6
	Sig.
	.000

Anti-image Matrices

		P1	P2	P3	P4
Anti-image Covariance	P1	.444	-.132	-.110	.026
	P2	-.132	.425	-.126	.050
	P3	-.110	-.126	.204	-.187
	P4	.026	.050	-.187	.364
Anti-image Correlation	P1	.840 ^a	-.304	-.367	.065
	P2	-.304	.807 ^a	-.428	.127
	P3	-.367	-.428	.677 ^a	-.686
	P4	.065	.127	-.686	.700 ^a

Dimensi Tepat Pelaksanaanya

✓ Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.681	.702	3

✓ Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.522
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	34.711
	Df
	3
	Sig.
	.000

Anti-image Matrices

		P5	P6	P7
Anti-image Covariance	P5	.305	.047	-.246
	P6	.047	.907	-.122
	P7	-.246	-.122	.290
Anti-image Correlation	P5	.514 ^a	.089	-.827
	P6	.089	.659 ^a	-.237
	P7	-.827	-.237	.513 ^a

Dimensi Tepat Target

✓ Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.598	.628	5

✓ Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.624
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	17.796
	Df
	10
	Sig.
	.059

Anti-image Matrices

		P8	P9	P10	P11	P12
Anti-image Covariance	P8	.825	-.149	-.095	-.217	.105
	P9	-.149	.850	.041	-.134	-.194
	P10	-.095	.041	.721	-.214	-.284
	P11	-.217	-.134	-.214	.741	-.018
	P12	.105	-.194	-.284	-.018	.776
Anti-image Correlation	P8	.628 ^a	-.178	-.123	-.277	.132
	P9	-.178	.654 ^a	.052	-.169	-.239
	P10	-.123	.052	.612 ^a	-.292	-.379
	P11	-.277	-.169	-.292	.674 ^a	-.024
	P12	.132	-.239	-.379	-.024	.559 ^a

Dimensi Tepat Lingkungan

√ Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.632	.645	7

√ Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.605
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	56.976
	Df
	21
	Sig.
	.000

Anti-image Matrices

		P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19
Anti-image Covariance	P13	.906	.119	-.094	.094	-.023	-.062	.006
	P14	.119	.733	-.083	-.041	-.057	-.018	-.105
	P15	-.094	-.083	.375	-.218	.111	-.097	.024
	P16	.094	-.041	-.218	.251	-.190	.101	-.023
	P17	-.023	-.057	.111	-.190	.421	-.261	.028
	P18	-.062	-.018	-.097	.101	-.261	.679	-.156
	P19	.006	-.105	.024	-.023	.028	-.156	.926
Anti-image Correlation	P13	.517 ^a	.146	-.161	.198	-.038	-.079	.007
	P14	.146	.884 ^a	-.158	-.095	-.102	-.025	-.127
	P15	-.161	-.158	.587 ^a	-.711	.280	-.192	.041
	P16	.198	-.095	-.711	.574 ^a	-.586	.245	-.047
	P17	-.038	-.102	.280	-.586	.587 ^a	-.488	.045

P18	-0.079	-0.025	-0.192	.245	-0.488	.522 ^a	-0.197
P19	.007	-0.127	.041	-0.047	.045	-0.197	.669 ^a

Dimensi Tepat Proses

✓ Realibilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.557	.565	3

✓ Validitas

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.617
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	7.006
	Df
	3
	Sig.
	.072

Anti-image Matrices

		P20	P21	P22
Anti-image Covariance	P20	.825	-.263	-.187
	P21	-.263	.843	-.144
	P22	-.187	-.144	.892
Anti-image Correlation	P20	.596 ^a	-.315	-.218
	P21	-.315	.609 ^a	-.166
	P22	-.218	-.166	.663 ^a

Lampiran 4

TABEL DAN BAR CHART DATA DIRI RESPONDEN

▼ **Usia Responden**

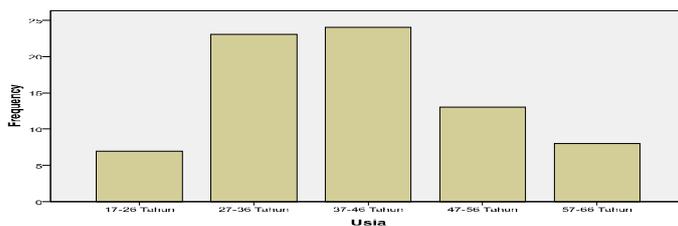
Statistics

Usia		
N	Valid	75
	Missing	0
Mean		2.89
Median		3.00
Mode		3
Minimum		1
Maximum		5

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-26 Tahun	7	9.3	9.3	9.3
	27-36 Tahun	23	30.7	30.7	40.0
	37-46 Tahun	24	32.0	32.0	72.0
	47-56 Tahun	13	17.3	17.3	89.3
	57-66 Tahun	8	10.7	10.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Usia



✓ Jenis Kelamin

Statistics

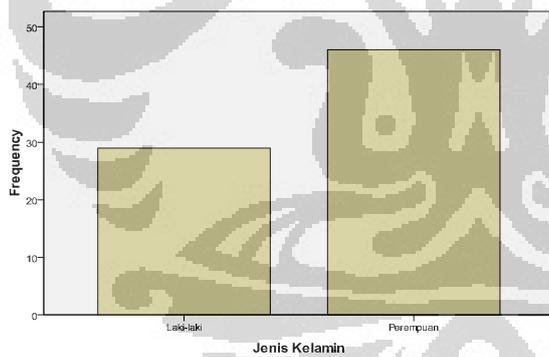
Jenis Kelamin

N	Valid	75
	Missing	0
Mode		2

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	29	38.7	38.7	38.7
	Perempuan	46	61.3	61.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Jenis Kelamin



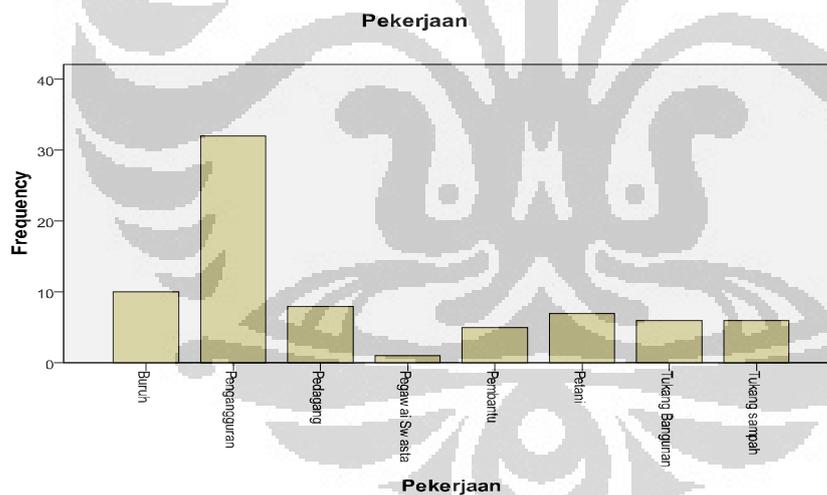
✓ Pekerjaan

Statistics

Pekerjaan

N	Valid	75
	Missing	0
Mode		2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruh	10	13.3	13.3	13.3
	Pengangguran	32	42.7	42.7	56.0
	Pedagang	8	10.7	10.7	66.7
	Pegawai Swasta	1	1.3	1.3	68.0
	Pembantu	5	6.7	6.7	74.7
	Petani	7	9.3	9.3	84.0
	Tukang Bangunan	6	8.0	8.0	92.0
	Tukang sampah	6	8.0	8.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	



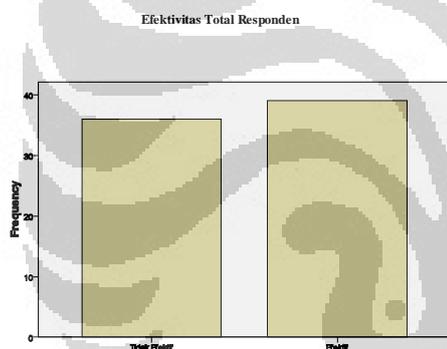
Lampiran 5

**Tabel dan Bar Chart Efektivitas Implementasi Program Raskin
Berdasarkan Jawaban Responden**

✓ **Efektivitas Total Responden**

Totalresponden_Efektivitas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Efektif	36	48.0	48.0	48.0
Efektif	39	52.0	52.0	100.0
Total	75	100.0	100.0	



✓ **Dimensi Tepat Kebijakannya**

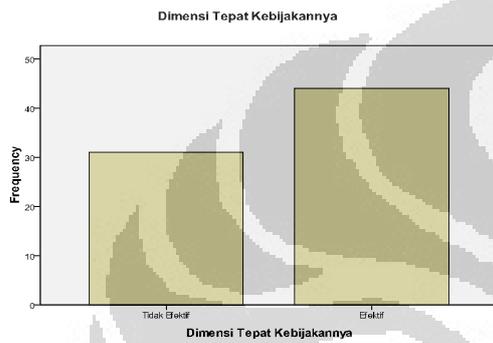
Statistics

Dimensi Tepat Kebijakannya

N	Valid	75
	Missing	0
Mean		1.59
Median		2.00
Mode		2
Minimum		1
Maximum		2

Dimensi Tepat Kebijakannya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Efektif	31	41.3	41.3	41.3
	Efektif	44	58.7	58.7	100.0
Total		75	100.0	100.0	



✓ **Dimensi Tepat Pelaksanaanya**

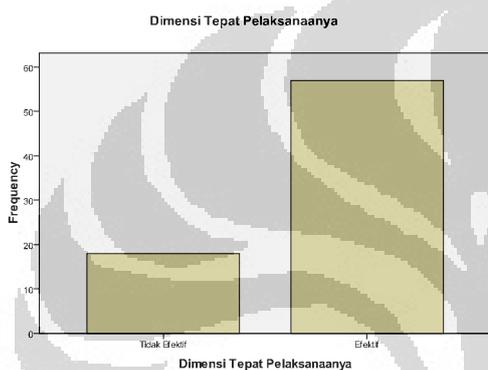
Statistics

Dimensi Tepat Pelaksanaanya

N	Valid	75
	Missing	0
Mean		1.76
Median		2.00
Mode		2
Minimum		1
Maximum		2

Dimensi Tepat Pelaksanaanya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Efektif	18	24.0	24.0	24.0
	Efektif	57	76.0	76.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	



✓ Dimensi Tepat Target

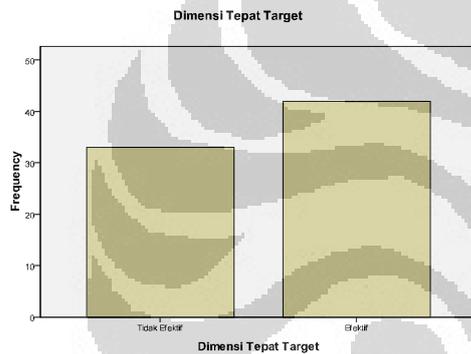
Statistics

Dimensi Tepat Target

N	Valid	75
	Missing	0
Mean		1.56
Median		2.00
Mode		2
Minimum		1
Maximum		2

Dimensi Tepat Target

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Efektif	33	44.0	44.0	44.0
Efektif	42	56.0	56.0	100.0
Total	75	100.0	100.0	



✓ Dimensi Tepat Lingkungan

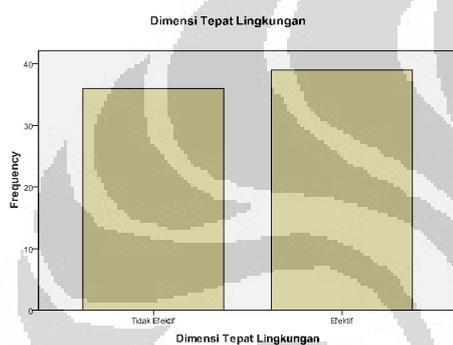
Statistics

Dimensi Tepat Lingkungan

N	Valid	75
	Missing	0
Mean		1.52
Median		2.00
Mode		2
Minimum		1
Maximum		2

Dimensi Tepat Lingkungan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Efektif	36	48.0	48.0	48.0
	Efektif	39	52.0	52.0	100.0
Total		75	100.0	100.0	



✓ Dimensi Tepat Proses

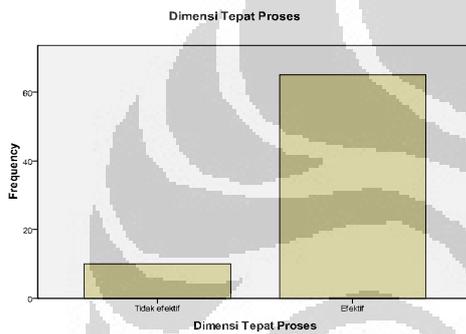
Statistics

Dimensi Tepat Proses

N	Valid	75
	Missing	0
Mean		1.87
Median		2.00
Mode		2
Minimum		1
Maximum		2

Dimensi Tepat Proses

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak efektif	10	13.3	13.3	13.3
Efektif	65	86.7	86.7	100.0
Total	75	100.0	100.0	



Lampiran 6

Tabel dan Bar Chart Efektivitas Implementasi Program Raskin
Berdasarkan Data Diri Responden

✓ **Efektivitas Total Responden Berdasarkan Data Diri Responden**

1. Usia

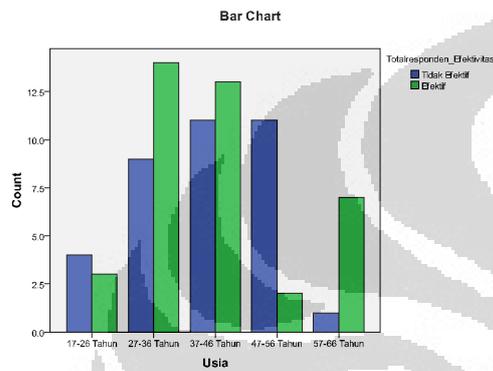
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia *	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%
Totalresponden_Efektivitas						

Usia * Totalresponden_Efektivitas Crosstabulation

			Totalresponden_Efektivitas		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Usia	17-26 Tahun	Count	4	3	7
		% within Totalresponden_Efektivitas	11.1%	7.7%	9.3%
	27-36 Tahun	Count	9	14	23
		% within Totalresponden_Efektivitas	25.0%	35.9%	30.7%
	37-46 Tahun	Count	11	13	24
		% within Totalresponden_Efektivitas	30.6%	33.3%	32.0%
	47-56 Tahun	Count	11	2	13
		% within Totalresponden_Efektivitas	30.6%	5.1%	17.3%
	57-66 Tahun	Count	1	7	8

	% within Totalresponden_Efektivitas	2.8%	17.9%	10.7%
Total	Count	36	39	75
	% within Totalresponden_Efektivitas	100.0%	100.0%	100.0%



2. Jenis Kelamin

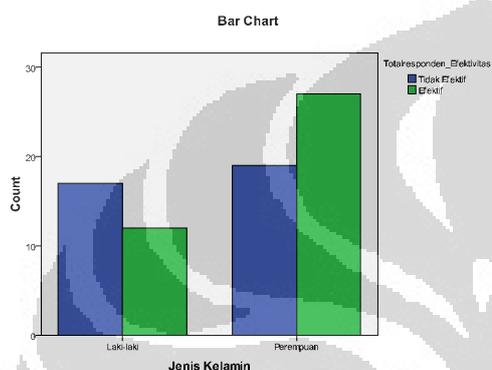
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin *	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%
Totalresponden_Efektivitas						

Jenis Kelamin * Totalresponden_Efektivitas Crosstabulation

			Totalresponden_Efektivitas		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	17	12	29
		% within Totalresponden_Efektivitas	47.2%	30.8%	38.7%
	Perempuan	Count	19	27	46

	% within Totalresponden_Efektivitas	52.8%	69.2%	61.3%
Total	Count	36	39	75
	% within Totalresponden_Efektivitas	100.0%	100.0%	100.0%



3. Pekerjaan

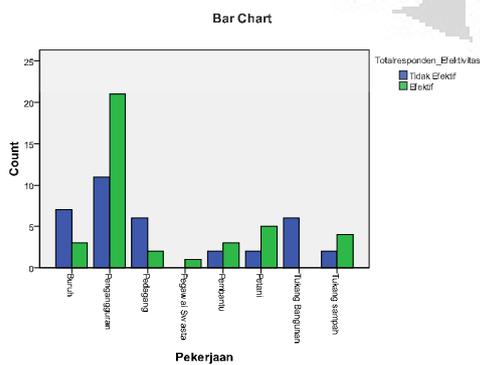
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan *	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%
Totalresponden_Efektivitas						

Pekerjaan * Totalresponden_Efektivitas Crosstabulation

			Totalresponden_Efektivitas		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Pekerjaan	Buruh	Count	7	3	10
		% within Totalresponden_Efektivitas	19.4%	7.7%	13.3%
	Pengangguran	Count	11	21	32

	% within Totalresponden_Efektivitas	30.6%	53.8%	42.7%
Pedagang	Count	6	2	8
	% within Totalresponden_Efektivitas	16.7%	5.1%	10.7%
Pegawai Swasta	Count	0	1	1
	% within Totalresponden_Efektivitas	.0%	2.6%	1.3%
Pembantu	Count	2	3	5
	% within Totalresponden_Efektivitas	5.6%	7.7%	6.7%
Petani	Count	2	5	7
	% within Totalresponden_Efektivitas	5.6%	12.8%	9.3%
Tukang Bangunan	Count	6	0	6
	% within Totalresponden_Efektivitas	16.7%	.0%	8.0%
Tukang sampah	Count	2	4	6
	% within Totalresponden_Efektivitas	5.6%	10.3%	8.0%
Total	Count	36	39	75
	% within Totalresponden_Efektivitas	100.0%	100.0%	100.0%



✓ **Efektivitas Total Responden Berdasarkan Data Diri Responden Pada Dimensi Tepat Kebijakannya**

1. Usia

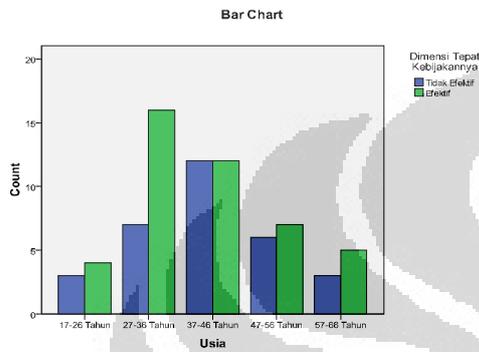
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Dimensi Tepat Kebijakannya	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Usia * Dimensi Tepat Kebijakannya Crosstabulation

			Dimensi Tepat Kebijakannya		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Usia	17-26 Tahun	Count	3	4	7
		% within Dimensi Tepat Kebijakannya	9.7%	9.1%	9.3%
	27-36 Tahun	Count	7	16	23
		% within Dimensi Tepat Kebijakannya	22.6%	36.4%	30.7%
	37-46 Tahun	Count	12	12	24
		% within Dimensi Tepat Kebijakannya	38.7%	27.3%	32.0%
	47-56 Tahun	Count	6	7	13
		% within Dimensi Tepat Kebijakannya	19.4%	15.9%	17.3%
	57-66 Tahun	Count	3	5	8
		% within Dimensi Tepat Kebijakannya	9.7%	11.4%	10.7%

Total	Count	31	44	75
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	100.0%	100.0%	100.0%



2. Jenis kelamin

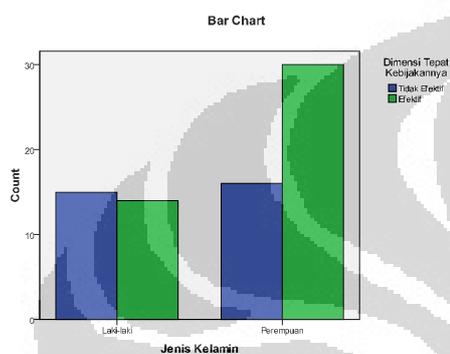
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Kebijakannya	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Kebijakannya Crosstabulation

			Dimensi Tepat Kebijakannya		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	15	14	29
		% within Dimensi Tepat Kebijakannya	48.4%	31.8%	38.7%
	Perempuan	Count	16	30	46

	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	51.6%	68.2%	61.3%
Total	Count	31	44	75
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	100.0%	100.0%	100.0%



3. Pekerjaan

Case Processing Summary

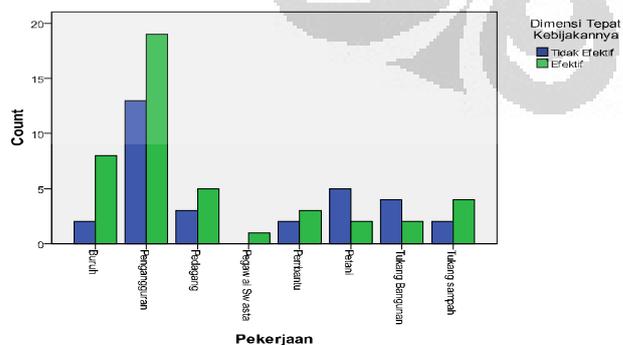
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan * Dimensi Tepat Kebijakannya	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Pekerjaan * Dimensi Tepat Kebijakannya Crosstabulation

			Dimensi Tepat Kebijakannya		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Pekerjaan	Buruh	Count	2	8	10
		% within Dimensi Tepat Kebijakannya	6.5%	18.2%	13.3%
	Pengangguran	Count	13	19	32
		% within Dimensi Tepat Kebijakannya	41.9%	43.2%	42.7%

Pedagang	Count	3	5	8
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	9.7%	11.4%	10.7%
Pegawai Swasta	Count	0	1	1
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	.0%	2.3%	1.3%
Pembantu	Count	2	3	5
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	6.5%	6.8%	6.7%
Petani	Count	5	2	7
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	16.1%	4.5%	9.3%
Tukang Bangunan	Count	4	2	6
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	12.9%	4.5%	8.0%
Tukang sampah	Count	2	4	6
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	6.5%	9.1%	8.0%
Total	Count	31	44	75
	% within Dimensi Tepat Kebijakannya	100.0%	100.0%	100.0%

Bar Chart



✓ **Efektivitas Total Responden Berdasarkan Data Diri Responden Pada Dimensi Tepat Pelaksanaanya**

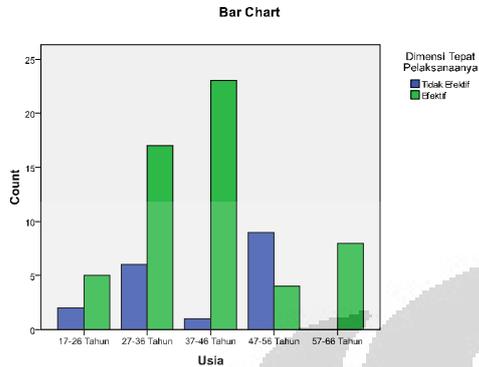
1. Usia

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Dimensi Tepat Pelaksanaanya	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Usia * Dimensi Tepat Pelaksanaanya Crosstabulation

			Dimensi Tepat Pelaksanaanya		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Usia	17-26 Tahun	Count	2	5	7
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	11.1%	8.8%	9.3%
	27-36 Tahun	Count	6	17	23
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	33.3%	29.8%	30.7%
	37-46 Tahun	Count	1	23	24
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	5.6%	40.4%	32.0%
	47-56 Tahun	Count	9	4	13
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	50.0%	7.0%	17.3%
	57-66 Tahun	Count	0	8	8
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	.0%	14.0%	10.7%
Total		Count	18	57	75
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	100.0%	100.0%	100.0%



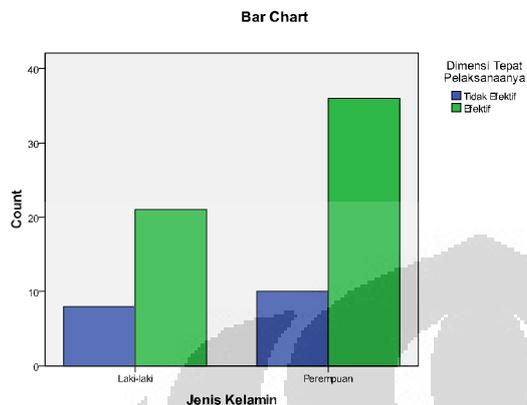
2. Jenis kelamin

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Pelaksanaanya	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Pelaksanaanya Crosstabulation

			Dimensi Tepat Pelaksanaanya		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	8	21	29
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	44.4%	36.8%	38.7%
	Perempuan	Count	10	36	46
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	55.6%	63.2%	61.3%
Total		Count	18	57	75
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	100.0%	100.0%	100.0%



3. Pekerjaan

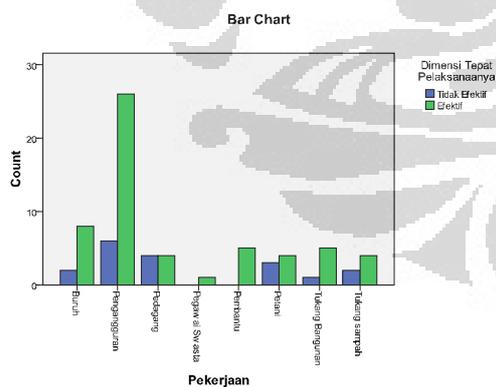
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan * Dimensi Tepat Pelaksanaanya	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Pekerjaan * Dimensi Tepat Pelaksanaanya Crosstabulation

		Dimensi Tepat Pelaksanaanya		Total	
		Tidak Efektif	Efektif		
Pekerjaan	Buruh	Count	2	8	10
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	11.1%	14.0%	13.3%
	Pengangguran	Count	6	26	32
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	33.3%	45.6%	42.7%
	Pedagang	Count	4	4	8
		% within Dimensi Tepat Pelaksanaanya	22.2%	7.0%	10.7%

Pegawai Swasta	Count	0	1	1
	% within Dimensi Tepat Pelaksanaan	.0%	1.8%	1.3%
Pembantu	Count	0	5	5
	% within Dimensi Tepat Pelaksanaan	.0%	8.8%	6.7%
Petani	Count	3	4	7
	% within Dimensi Tepat Pelaksanaan	16.7%	7.0%	9.3%
Tukang Bangunan	Count	1	5	6
	% within Dimensi Tepat Pelaksanaan	5.6%	8.8%	8.0%
Tukang sampah	Count	2	4	6
	% within Dimensi Tepat Pelaksanaan	11.1%	7.0%	8.0%
Total	Count	18	57	75
	% within Dimensi Tepat Pelaksanaan	100.0%	100.0%	100.0%



✓ **Efektivitas Total Responden Berdasarkan Data Diri Responden Pada Dimensi Tepat Target**

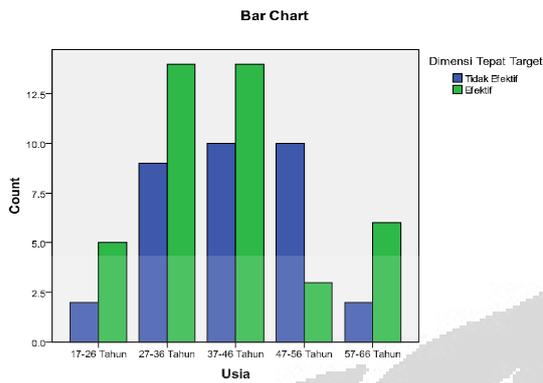
1. Usia

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Dimensi Tepat Target	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Usia * Dimensi Tepat Target Crosstabulation

			Dimensi Tepat Target		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Usia	17-26 Tahun	Count	2	5	7
		% within Dimensi Tepat Target	6.1%	11.9%	9.3%
	27-36 Tahun	Count	9	14	23
		% within Dimensi Tepat Target	27.3%	33.3%	30.7%
	37-46 Tahun	Count	10	14	24
		% within Dimensi Tepat Target	30.3%	33.3%	32.0%
	47-56 Tahun	Count	10	3	13
		% within Dimensi Tepat Target	30.3%	7.1%	17.3%
	57-66 Tahun	Count	2	6	8
		% within Dimensi Tepat Target	6.1%	14.3%	10.7%
Total		Count	33	42	75
		% within Dimensi Tepat Target	100.0%	100.0%	100.0%



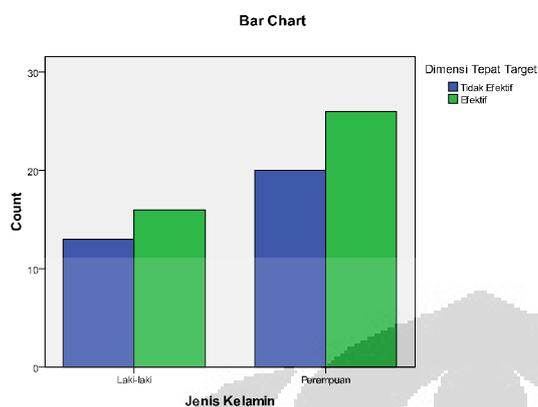
2. Jenis Kelamin

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Target	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Target Crosstabulation

			Dimensi Tepat Target		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	13	16	29
		% within Dimensi Tepat Target	39.4%	38.1%	38.7%
	Perempuan	Count	20	26	46
		% within Dimensi Tepat Target	60.6%	61.9%	61.3%
Total		Count	33	42	75
		% within Dimensi Tepat Target	100.0%	100.0%	100.0%



3. Pekerjaan

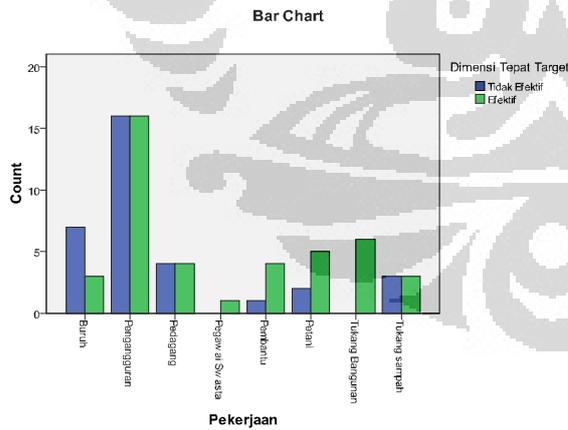
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan * Dimensi Tepat Target	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Pekerjaan * Dimensi Tepat Target Crosstabulation

			Dimensi Tepat Target		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Pekerjaan	Buruh	Count	7	3	10
		% within Dimensi Tepat Target	21.2%	7.1%	13.3%
Pengguguran	Pegawai Swasta	Count	16	16	32
		% within Dimensi Tepat Target	48.5%	38.1%	42.7%
Pedagang	Pegawai Swasta	Count	4	4	8
		% within Dimensi Tepat Target	12.1%	9.5%	10.7%
Pegawai Swasta		Count	0	1	1

	% within Dimensi Tepat Target	.0%	2.4%	1.3%
Pembantu	Count	1	4	5
	% within Dimensi Tepat Target	3.0%	9.5%	6.7%
Petani	Count	2	5	7
	% within Dimensi Tepat Target	6.1%	11.9%	9.3%
Tukang Bangunan	Count	0	6	6
	% within Dimensi Tepat Target	.0%	14.3%	8.0%
Tukang sampah	Count	3	3	6
	% within Dimensi Tepat Target	9.1%	7.1%	8.0%
Total	Count	33	42	75
	% within Dimensi Tepat Target	100.0%	100.0%	100.0%



✓ **Efektivitas Total Responden Berdasarkan Data Diri Responden Pada Dimensi Tepat lingkungan**

1. Usia

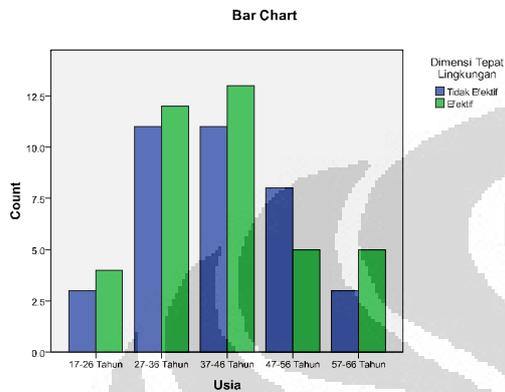
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Dimensi Tepat Lingkungan	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Usia * Dimensi Tepat Lingkungan Crosstabulation

			Dimensi Tepat Lingkungan		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Usia	17-26 Tahun	Count	3	4	7
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	8.3%	10.3%	9.3%
	27-36 Tahun	Count	11	12	23
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	30.6%	30.8%	30.7%
	37-46 Tahun	Count	11	13	24
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	30.6%	33.3%	32.0%
	47-56 Tahun	Count	8	5	13
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	22.2%	12.8%	17.3%
	57-66 Tahun	Count	3	5	8
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	8.3%	12.8%	10.7%

Total	Count	36	39	75
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	100.0%	100.0%	100.0%



2. Jenis Kelamin

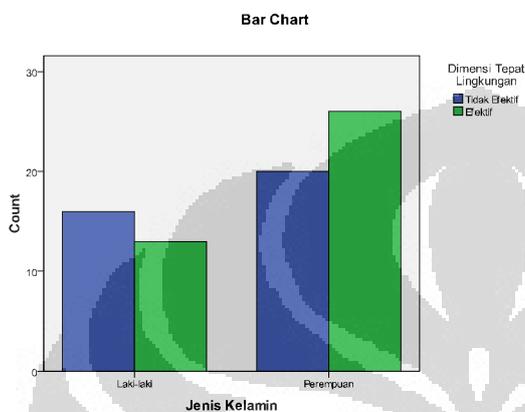
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Lingkungan	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Lingkungan Crosstabulation

			Dimensi Tepat Lingkungan		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	16	13	29
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	44.4%	33.3%	38.7%
	Perempuan	Count	20	26	46
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	55.6%	66.7%	61.3%

Total	Count	36	39	75
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	100.0%	100.0%	100.0%



3. Pekerjaan

Case Processing Summary

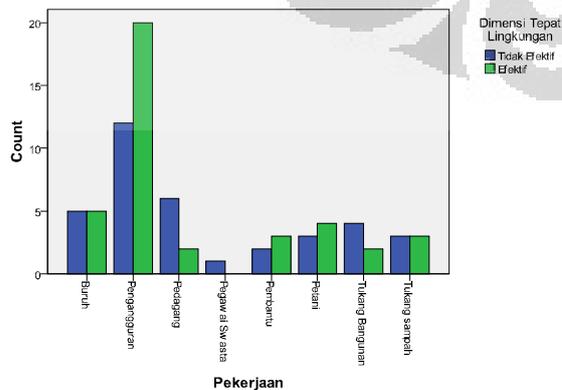
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan * Dimensi Tepat Lingkungan	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Pekerjaan * Dimensi Tepat Lingkungan Crosstabulation

			Dimensi Tepat Lingkungan		Total
			Tidak Efektif	Efektif	
Pekerjaan	Buruh	Count	5	5	10
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	13.9%	12.8%	13.3%
	Pengangguran	Count	12	20	32
		% within Dimensi Tepat Lingkungan	33.3%	51.3%	42.7%

Pedagang	Count	6	2	8
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	16.7%	5.1%	10.7%
Pegawai Swasta	Count	1	0	1
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	2.8%	.0%	1.3%
Pembantu	Count	2	3	5
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	5.6%	7.7%	6.7%
Petani	Count	3	4	7
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	8.3%	10.3%	9.3%
Tukang Bangunan	Count	4	2	6
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	11.1%	5.1%	8.0%
Tukang sampah	Count	3	3	6
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	8.3%	7.7%	8.0%
Total	Count	36	39	75
	% within Dimensi Tepat Lingkungan	100.0%	100.0%	100.0%

Bar Chart



✓ **Efektivitas Total Responden Berdasarkan Data Diri Responden Pada Dimensi Tepat Proses**

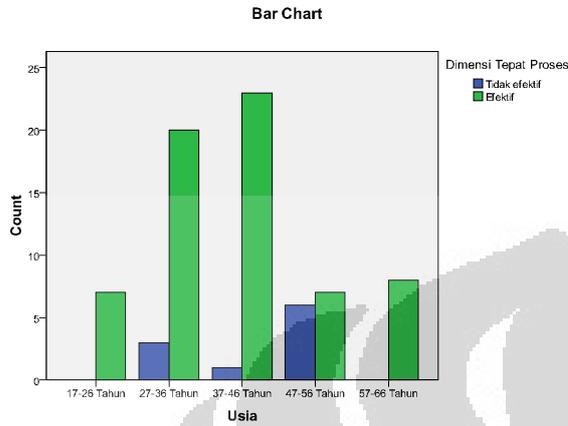
1. Usia

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Dimensi Tepat Proses	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Usia * Dimensi Tepat Proses Crosstabulation

			Dimensi Tepat Proses		Total
			Tidak efektif	Efektif	
Usia	17-26 Tahun	Count	0	7	7
		% within Dimensi Tepat Proses	.0%	10.8%	9.3%
	27-36 Tahun	Count	3	20	23
		% within Dimensi Tepat Proses	30.0%	30.8%	30.7%
	37-46 Tahun	Count	1	23	24
		% within Dimensi Tepat Proses	10.0%	35.4%	32.0%
	47-56 Tahun	Count	6	7	13
		% within Dimensi Tepat Proses	60.0%	10.8%	17.3%
	57-66 Tahun	Count	0	8	8
		% within Dimensi Tepat Proses	.0%	12.3%	10.7%
Total		Count	10	65	75
		% within Dimensi Tepat Proses	100.0%	100.0%	100.0%



2. Jenis Kelamin

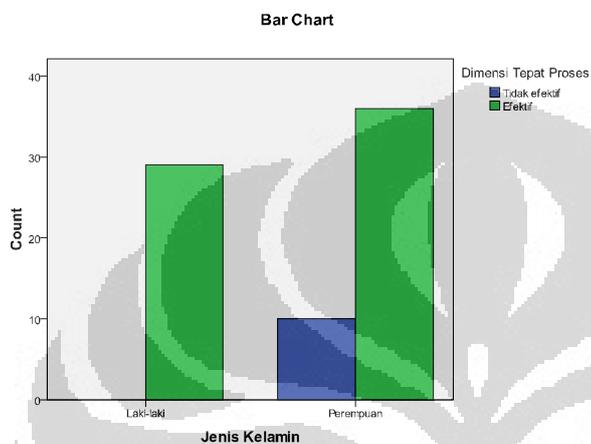
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Proses	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Jenis Kelamin * Dimensi Tepat Proses Crosstabulation

			Dimensi Tepat Proses		Total
			Tidak efektif	Efektif	
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	0	29	29
		% within Dimensi Tepat Proses	.0%	44.6%	38.7%
	Perempuan	Count	10	36	46
		% within Dimensi Tepat Proses	100.0%	55.4%	61.3%

Total	Count	10	65	75
	% within Dimensi Tepat Proses	100.0%	100.0%	100.0%



3. Pekerjaan

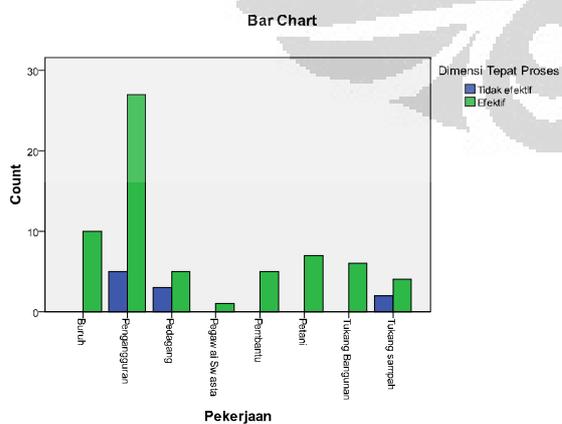
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan * Dimensi Tepat Proses	75	100.0%	0	.0%	75	100.0%

Pekerjaan * Dimensi Tepat Proses Crosstabulation

			Dimensi Tepat Proses		Total
			Tidak efektif	Efektif	
Pekerjaan	Buruh	Count	0	10	10
		% within Dimensi Tepat Proses	.0%	15.4%	13.3%
	Pengangguran	Count	5	27	32
		% within Dimensi Tepat Proses	50.0%	41.5%	42.7%

Pedagang	Count	3	5	8
	% within Dimensi Tepat Proses	30.0%	7.7%	10.7%
Pegawai Swasta	Count	0	1	1
	% within Dimensi Tepat Proses	.0%	1.5%	1.3%
Pembantu	Count	0	5	5
	% within Dimensi Tepat Proses	.0%	7.7%	6.7%
Petani	Count	0	7	7
	% within Dimensi Tepat Proses	.0%	10.8%	9.3%
Tukang Bangunan	Count	0	6	6
	% within Dimensi Tepat Proses	.0%	9.2%	8.0%
Tukang sampah	Count	2	4	6
	% within Dimensi Tepat Proses	20.0%	6.2%	8.0%
Total	Count	10	65	75
	% within Dimensi Tepat Proses	100.0%	100.0%	100.0%



Lampiran 7

**ALOKASI PENDISTRIBUSIAN BERAS RASKIN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SETIAP BULANNYA PADA TAHUN 2010**

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH RTM	JUMLAH BERAS (KG)	NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH RTM	JUMLAH BERAS (KG)
I	KRAMAT JATI	2,398	35,970	VI	DUREN SAWIT	4,805	72,075
	1 Cawang	450	6,750		1 Klender	1,975	29,625
	2 Cililitan	313	4,695		2 Pondok Bambu	480	7,200
	3 Kramat Jati	412	6,180		3 Duren Sawit	739	11,085
	4 Batu Ampar	233	3,495		4 Malaka Sari	235	3,525
	5 Balekambang	176	2,640		5 Malaka Jaya	117	1,755
	6 Tengah	564	8,460		6 Pondok Kopi	455	6,825
	7 Dukuh	250	3,750		7 Pondok Kelapa	804	12,060
II	JATINEGARA	8,777	131,655	VII	CIPAYUNG	4,221	63,315
	1 Kmp. Melayu	1,275	19,125		1 Lubang Buaya	1,053	15,795
	2 Bali Mester	363	5,445		2 Setu	387	5,805
	3 Bidara Cina	1,580	23,700		3 Bambu Apus	647	9,705
	4 Cip. Cempedak	956	14,340		4 Ceger	378	5,670
	5 Rawa Bunga	1,161	17,415		5 Cipayung	456	6,840
	6 Cip. Besar Utara	1,488	22,320		6 Cilangkap	318	4,770
	7 Cip. Besar Sel	1,379	20,685		7 Pondok Ranggon	445	6,675
	8 Cip. Muara	575	8,625		8 Munjul	537	8,055
III	PULOGADUNG	7,888	118,320	VIII	CAKUNG	9,957	149,355
	1 Kayu Putih	2,217	33,255		1 Jatinegara	1,987	29,805
	2 Rawa Mangun	1,455	21,825		2 Rawa Terate	973	14,595
	3 Pisangan Timur	1,196	17,940		3 Penggilingan	2,069	31,035
	4 Cipinang	934	14,010		4 Cakung Barat	1,088	16,320
	5 Jatinegara Kaum	755	11,325		5 Cakung Timur	1,389	20,835
	6 Pulo Gadung	470	7,050		6 Ujung Menteng	668	10,020
	7 Jati	861	12,915		7 Pulogebang	1,783	26,745
IV	CIRACAS	3,093	46,395	IX	PASAR REBO	2,076	31,140
	1 Rambutan	466	6,990		1 Gedong	258	3,870
	2 Susukan	521	7,815		2 Cijantung	515	7,725
	3 Ciracas	954	14,310		3 Baru	146	2,190
	4 Kelapa Dua Wetan	533	7,995		4 Kalisari	419	6,285
	5 Cibubur	619	9,285		5 Pekayon	738	11,070
V	MATRAMAN	3,824	57,360	X	MAKASAR	3,817	57,255
	1 Kebon Manggis	509	7,635		1 Cipinang Melayu	1,066	15,990
	2 Palmeriam	857	12,855		2 Kebon Pala	1,155	17,325
	3 Kayu Manis	1,130	16,950		3 Halim PK	309	4,635
	4 Utan Kayu Selatan	434	6,510		4 Makasar	863	12,945
	5 Pisangan baru	789	11,835		5 Pinang Ranti	424	6,360
	6 Utan Kayu Utara	105	1,575				
					Jumlah Total	50,856	762,840

SEKRETARIS KOTA JAKARTA TIMUR,

Drs. H. ARIFIN, M.M.
NIP 010068068

Lampiran 8

DATA UMUM

PKK KELURAHAN PENGGILINGAN TAHUN 2010

No	Nama Wilayah	Jumlah PKK RT	Jumlah Dasa Wisma	Jumlah KRT	Jumlah KK	Jumlah Rumah		Jumlah Jiwa		Jumlah Kader						Jumlah Tenaga			
						Sehat	Kurang Sehat	L	P	Anggota TP PKK		Umum		Khusus		Honoror		Bantuan	
										L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0	0	0	0
1	RW 01	15	68	750	1456	1458	288	2798	2456	0	0	0	83	0	37	0	0	0	0
2	RW 02	10	40	460	840	840	10	1620	1604	0	0	0	48	0	55	0	0	0	0
3	RW 03	12	55	790	1522	1346	96	2264	2717	0	0	0	94	0	21	0	0	0	0
4	RW 04	14	36	510	1400	520	0	2105	3765	0	0	0	66	0	26	0	0	0	0
5	RW 05	19	79	1250	2155	1769	147	4642	4835	0	0	0	121	0	111	0	0	0	0
6	RW 06	12	43	460	907	907	123	1531	1767	0	0	0	43	0	39	0	0	0	0
7	RW 07	17	74	1332	2262	2259	560	1090	1178	0	0	0	148	0	30	0	0	0	0
8	RW 08	15	66	1599	2370	2370	975	1997	2340	0	0	0	128	0	40	0	0	0	0
9	RW 09	17	46	490	694	694	0	1472	1451	0	0	0	81	0	57	0	0	0	0
10	RW 10	9	18	170	251	251	1	536	527	0	0	0	35	0	18	0	0	0	0
11	RW 11	12	32	360	692	692	0	355	374	0	0	0	48	0	30	0	0	0	0
12	RW 12	18	60	615	1119	1128	42	2460	2443	0	0	0	66	0	49	0	0	0	0
13	RW 13	10	18	200	324	284	0	562	605	0	0	0	29	0	37	0	0	0	0
14	RW 14	11	62	620	1155	1155	169	2556	2521	0	0	0	80	0	40	0	0	0	0
15	RW 15	3	6	60	90	90	0	213	287	0	0	0	13	0	6	0	0	0	0
16	RW 16	5	10	250	185	185	0	355	345	0	0	0	15	0	41	0	0	0	0
17	RW 17	10	33	450	1092	1094	28	451	641	0	0	0	39	0	36	0	0	0	0
18	RW 18	9	18	250	405	405	0	205	200	0	0	0	39	0	30	0	0	0	0
	Jumlah	218	764	10616	18919	17447	2439	27212	30056	0	34	0	1226	0	737	0	0	0	0

Lampiran 9



PENGURUS RW 08/3

Kp. Pedaengan Kel. Penggilingan Cakung Jakarta - Timur

Sekretariat : Jl. Raya Penggilingan Kp. Pedaengan Rw.08/3

<p>Nomor : R-18/Sel-Rw/W12 Lampiran : Perihal : Pemohonan Riset</p>	<p>Jakarta, Mei 2012</p> <p>Kepada Yth. Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Indonesia Di Depok</p>
--	---

U.p Ketua Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Negara

Menjawab Surat Saudara No:1978/H2-F9.D07.1/PDP.08/04/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal Pemohonan Mengadakan Riset, dengan ini perlu disampaikan bahwa mahasiswa/ tersebut dibawah ini :

Nama	Nomor Pokok Mahasiswa	Program Studi
Linda Dwi Erlia Wijayanti	1006816994	Ilmu Administrasi Negara

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui Izin Riset di Kp. Pedaengan Kel. Penggilingan Cakung Jakarta Timur yang terletak di Jl. Raya penggilingan Kp Pedaengan rw. 08/3 selama 1 minggu terhitung mulai tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan 25 Mei 2012.

Dalam pelaksanaan tersebut, kami mohon agar mahasiswa/ tersebut mematuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku di Kp. Pedaengan Kel. Penggilingan Cakung Jakarta Timur.

Demikian agar maklum dan perbuatannya diucapkan terimakasih.

Resmi Kami,

R.W 08 / 3

KEL. PENGGILINGAN

(Arfan Dadi) *ditanda*
Sekretaris RW 08

Lampiran 10

Dokumentasi RTS-PM raskin





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Linda Dwi Erlia Wijayanti

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Agustus 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Margahyu Jaya Blok C No 45 Rt/Rw 001/015 Bekasi Timur

Pendidikan : 1995 – 2001 SDN Margahyu III
2001 – 2004 SMP 2 Bekasi
2004 – 2007 SMA KORPRI Bekasi
2007 – 2010 D3 Administrasi Perkantoran Sekretari FISIP Universitas Indonesia
2010 – Sekarang Ekstensi Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia

Hobi : Berenang, belanja, jalan-jalan, dan mendengarkan musik

Pengalaman Magang : Praktek Kerja Lapangan pada PT Lintasarta Divisi Corporate Sales II

Pengalaman Bekerja : Sekretaris Kepala Biro Administrasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (2011- sekarang).